

Buku Rembag Kaistimewan Mangsa Pageblug : 12 *Podcast* Terpilih dari Serial *Podcast* “Rembag Kaistimewan” Paniradya Kaistimewan Tahun 2021 merupakan salah satu buku yang diterbitkan oleh Paniradya Kaistimewan dalam rangka menyebarluaskan Informasi Keistimewaan DIY. Informasi dan edukasi tentang Keistimewaan DIY yang dirangkum dalam penulisan buku ini adalah merupakan informasi yang juga telah disampaikan melalui media *podcast* melalui kanal *YouTube* “Paniradya Kaistimewan”

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya sehingga penyusunan buku Rembag Kaistimewan Mangsa Pageblug : 12 *Podcast* Terpilih dari Serial *Podcast* “Rembag Kaistimewan” Paniradya Kaistimewan Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.



Rembag Kaistimewan Mangsa Pageblug



Paniradya Haistimewan
ပဏ္ဍိတအဖွဲ့အစည်း

Rembag Kaistimewan Mangsa Pageblug

12 *Podcast* Terpilih dari Serial *Podcast* “Rembag Kaistimewan”
Paniradya Kaistimewan Tahun 2021

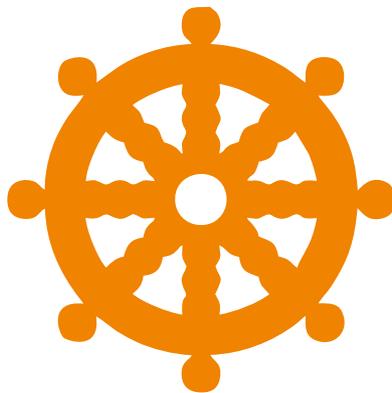
Tim Penulis:
Haryadi Baskoro
Wawan Isnawan
Bahrul Fauzi Rosyidi
Livy Laurens



Rembag Kaistimewan

Mangsa Pageblug

12 Podcast Terpilih dari Serial Podcast
“Rembag Kaistimewan”
Paniradya Kaistimewan Tahun 2021



Haryadi Baskoro
Wawan Isnawan
Bahrul Fauzi Rosyidi
Livy Laurens

Rembag Kalstimewan Mangsa Pageblug

**12 Podcast Terpilih dari Serial Podcast
Rembag Keistimewaan Yogyakarta
Paniradya Kalstimewan Tahun 2021**

@Yogyakarta, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Kepengarangan

Penulis :

Haryadi Baskoro

Wawan Isnawan

Bahrul Fauzi Rosyidi

Livy Laurens

Editor :

Yulius Felicianus, S.E.

Layouter :

Matheus Dwi Rubiyanto

ISBN : 9786237120100

Halaman : xii + 242 Hal.



Penerbit :

Best Publiser (Galangpress Group) Anggota Ikapi

Bekerjasama Dengan :

Paniradya Kaistimewan Yogyakarta

Percetakan :

Tandabaca Kinarya Cipta

Cetakan I : Februari 2022

Cetakan II : Agustus 2022



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Buku Rembag Kaistimewan Mangsa Pageblug : 12 *Podcast* Terpilih dari Serial *Podcast* “Rembag Kaistimewan” Paniradya Kaistimewan Tahun 2021 merupakan salah satu buku yang diterbitkan oleh Paniradya Kaistimewan dalam rangka menyebarkan Informasi Keistimewaan DIY. Informasi dan edukasi tentang Keistimewaan DIY yang dirangkum dalam penulisan buku ini adalah merupakan informasi yang juga telah disampaikan melalui media *podcast* melalui kanal *You Tube* “Paniradya Kaistimewan”

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat- Nya sehingga penyusunan buku Rembag Kaistimewan Mangsa Pageblug : 12 *Podcast* Terpilih dari Serial *Podcast* “Rembag Kaistimewan” Paniradya Kaistimewan Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Kepada para Penulis yaitu Sdr. Haryadi Baskoro, Sdr. Wawan Isnawan, Sdr. Bahrul Fauzi Rosyidi, dan Sdn. Livy Laurens dan seluruh tim penulisan buku, kami mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menyusun buku ini, mulai dari pengumpulan data, melakukan *focus group discussion (FGD)* hingga terbit buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan, dan juga menjadi sumber bacaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terbitnya buku ini, maka akan semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keistimewaan DIY serta kegiatan-kegiatan yang mendukung keistimewaan DIY.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat selesai tepat waktu, kami haturkan terima kasih. Kritik dan saran tentunya akan menjadi pemacu untuk mampu menyusun buku dan kajian yang lebih baik lagi.

Semoga bermanfaat, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Paniradya Pati

Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si.

Kata Pengantar

Sejak 2020, Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta menayangkan secara berkala acara *podcast* “Rembag Kaistimewan”. Pada dasarnya acara ini adalah “*papan kagem rembagan bab Kaistimewan Ngayogyakarta*”, forum untuk berembug tentang Keistimewaan DIY. Secara teknis *podcast* ini menjadi sarana diskusi, komunikasi, dan interaksi tentang Keistimewaan DIY.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “berembug” secara umum berarti berbincang-bincang dan berunding dan secara lebih spesifik menunjuk pada musyawarah antar para pemuka dan tokoh masyarakat. Program siaran *podcast* “Rembag Kaistimewan” sejalan dengan konsep itu, sebab selalu menghadirkan para pemuka dan para tokoh masyarakat yang berbincang dan berdialog interaktif membahas Keistimewaan DIY.

Acara *podcast* ini merupakan terobosan digital yang dilakukan secara kreatif oleh Paniradya Kaistimewan DIY. Program ini merupakan salah satu program siaran unggulan dalam kanal YouTube Paniradya Kaistimewan. Sampai buku ini selesai ditulis YouTube Channel Paniradya Kaistimewan telah diikuti banyak *subscribers*, mengindikasikan bahwa isu-isu seputar

Keistimewaan DIY merupakan *trending topic* yang menarik banyak kalangan.

Selama masa pandemi di tahun 2021. Paniradya Kaistimewan telah menayangkan beberapa program *podcast* ini dengan berbagai topik yang menarik. Karena keterbatasan maka buku ini hanya memilih 12 *podcast* yang kami sajikan secara acak. Pembaca dapat memulai membaca dari bab mana saja sesuai minat dan kebutuhannya.

Keduabelas *podcast* itu menggambarkan bahwa Keistimewaan DIY itu, pertama, sangat responsif menangani pandemi Covid 19. Hal itu dapat dilihat pada pembahasan dalam Bab 7 (Jamu Mempertahankan Eksistensi di Masa Pandemi), Bab 9 (Tingkatkan Kesadaran Diri, Sudah Pandemi! Ayo Vaksin!), dan Bab 12 (BKK DANAIS: Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan dalam Penanganan Covid-19).

Kedua, menggambarkan bahwa pelaksanaan (implementasi) Keistimewaan DIY itu berfokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari Bab 3 (9 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY), Bab 8 (Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Membangun Perekonomian, Meningkatkan Kesejahteraan), Bab 10 (Arah Strategi Perencanaan dan Kebijakan Dana Keistimewaan), dan Bab 11

(Kalurahan Maritim Menyongsong Abad Samudra Hindia).

Ketiga, Keistimewaaan DIY itu sangat menekankan pentingnya kebudayaan dan sejarah sebagai basisnya. Hal itu dikupas tuntas dalam Bab 1 (Basa Jawi Pangukuhing Kaistimewan Ngayogyakarta) dan Bab 2 (Amanat 5 September 1945). Menurut Paniradya Pati Aris Eko Nugroho, SP., M.Si, kebudayaan adalah kembangnya pembangunan Keistimewaaan DIY. Melalui kewenangan kebudayaan ini pulalah Keistimewaaan DIY dapat berdampak luas karena kebudayaan itu sendiri luas tidak hanya mencakup kesenian.

Keempat, Keistimewaaan DIY itu responsif terhadap perubahan zaman, khususnya revolusi industri 4.0 yang sekarang terus segera berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Beberapa topik *podcast* “Rembag Kaistimewan” mengedepankan pembahasan tentang pembangunan digital yaitu Bab 4 (Penyediaan Akses Internet bagi Warga DIY), Bab 5 (*Grand Design* Keistimewaaan: Strategi Perencanaan Kebijakan menuju Kesejahteraan), dan Bab 6 (HUT UMKM ke-6 Go Digital, Go Global).

Seri rembugan soal Keistimewaaan DIY di masa pandemi (*rembag kaistimewaaan mangsa pageblug*) yang dikelola secara digital oleh Paniradya Kaistimewan memberikan banyak inspirasi dan

motivasi. Gagasan-gagasan cemerlang muncul manakala kita sedang dirundung malang.

Buku ini barulah edisi yang pertama dan akan berlanjut dengan edisi-edisi selanjutnya yang akan terus mereview *podcast-podcast* “Rembag Kaistimewan”. Pola *rembugan* adalah pola belajar dialogis kreatif yang menjadi ajang curah gagasan yang berkelanjutan. Karena itu dalam setiap bab bukan hanya berisi review dari proses rembugan itu tetapi juga memberi kupasan tentang poin-poin apa saja yang berpotensi untuk dibahas lebih dalam dan lebih luas lagi.

Selamat berrembug,

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Basa Jawi Pangukuhing Kaistimewan Ngayogyakarta	1
Amanat 5 September 1945	23
9 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY	47
Penyediaan Akses Internet bagi Warga DIY	67
<i>Grand Design</i> Keistimewaan : Strategi Perencanaan Kebijakan menuju Kesejahteraan	87
HUT UMKM ke-6 Go Digital, Go Global	107
Jamu Mempertahankan Eksistensi di Masa Pandemi	119
Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Membangun Perekonomian, Meningkatkan Kesejahteraan	133
Tingkatkan Kesadaran Diri, Sudah Pandemi! Ayo Vaksin!	155
Daftar Pustaka	173

Arah Strategi Perencanaan dan Kebijakan Dana Keistimewaan.....	177
Kalurahan Maritim Menyongsong Abad Samudra Hindia	189
BKK DANAIS : Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan dalam Penanggulang Covid-19	203
Lampiran 1 Data Podcast Rembag Kaistimewan Paniradya Kaistimewan 2021.....	215
Lampiran 2 : Apresiasi untuk Forum-forum Dialog di DIY	239

Bab 1.

Basa Jawi Pangukuhing Kaistimewan

Ngayogyokarto

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 4 November 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya

Kaistimewan

Nara sumber :

- Prof. Dr. Suwarna Dwijonagoro, M.Pd (Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta)
- Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY)
- Abdul Afif Rosyidi, S.Pd (Guru SMAN 1 Mlati Sleman)

Moderator : Ninda Fillasputri

Siaran *podcast* ini mengambil topik yang bersifat taktis bagi Keistimewaan DIY, yaitu strategi kultural untuk memperkuat Keistimewaan itu. Rembugan kali ini menegaskan fungsi Bahasa Jawa sebagai penguat Keistimewaan DIY. Pembahasannya multi persepektif sebab menampilkan nara sumber dari kalangan akademisi (Prof. Dr. Suwarna Dwijonagoro, M.Pd), wakil dari Pemda DIY (Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH) serta praktisi pendidikan Bahasa Jawa (Abdul Afif Rosyidi, S.Pd).

Identitas dan Penguat Keistimewaan DIY

Bahasa Jawa memainkan peran penting dalam penguatan Keistimewaan DIY. Hal itu dijelaskan oleh Prof Suwarna dengan menekankan bahwa kebudayaan merupakan ciri khas Keistimewaaan DIY sehingga menjadi salah satu Kewenangan Istimewa sebagaimana ditegaskan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta ini, setiap kebudayaan yang khas pasti memiliki unsur-unsur yang khas pula yang menjadi penandanya. Kebudayaan Yogyakarta langsung dikenali dari unsur-unsurnya yang khas. Budaya kebendaan misalnya, banyak yang menjadi penanda kebudayaan Yogyakarta seperti Tugu Yogya, Kraton Kasultanan, Pura Pakualaman, Benteng Kraton, dan sebagainya. Adapun Bahasa Jawa juga merupakan unsur khas kebudayaan Yogyakarta. Bahasa Jawa menjadi penanda kebndayaan dalam Keistimewaan Yogyakarta. Karena itu Bahasa Jawa harus dijadikan identitas sekaligus penguat Keistimewaan DIY.

Bahasa menunjukkan bangsa. Demikianlah Bahasa Jawa menunjukkan identitas ke-Yogya-an. Dari tutur kata seseorang dapatlah diidentifikasi apakah dia orang Yogya, atau setidaknya dia orang yang menerima pengaruh positif budaya Yogya. Ketika kita mendengar seseorang berkata dengan kalem “injih”, “nuwun

sewu”, atau “matur nuwun”, setidaknya kita dapat menduga bahwa dirinya orang Yogya.

Keistimewaan Bahasa Jawa

Sebagai penguat Keistimewaan DIY, Bahasa Jawa itu sendiri sangat istimewa. Keistimewaan Bahasa Jawa, pertama, terletak pada fungsi Bahasa Jawa sebagai wadah nilai-nilai budaya. Prof Suwarna memberi contoh sebuah kata, misalnya “blangkon”. Kata ini bukan sekedar nama sebuah benda tetapi memuat budaya busana Jawa yang dalam dan luas. Artinya jika kata “blangkon” ini dihilangkan maka budaya busana Jawa yang dalam dan luas itu juga tereduksi.

Kedua, bahasa Jawa itu menjadi dasar unggah-ungguh atau tatakrama Yogyakarta. Bahasa Jawa menurut Prof Suwarna mencakup dua dimensi yang integral yaitu tata bahasa dan tata krama. Tata bahasa menunjuk pada kesantunan berbahasa, menggunakan diksi yang tepat dan santun. Tetapi, berbahasa Jawa tidak cukup dibunyikan saja tetapi disertai sikap dan perilaku yang sepadan seperti contoh dalam tabel di bawah ini.

Bahasa Jawa sebagai Basis Unggah-Ungguh

Tata Bahasa	Tata Krama
Santun Berbahasa	Sopan Berperilaku (Patrap)
“Nderek langkung”	Berjalan melewati orang lain dengan sikap sopan, minta

	ijin, sambil badan merunduk wujud hormat pada orang yang dilewati
“Menika”	Menunjuk sesuatu (orang, benda) dengan jempol, bukan dengan telunjuk, sebagai tanda menghormati sesuatu atau seseorang yang ditunjuk.
“Nuwun sewu”	Memohon ijin dengan sikap merunduk dengan tangan “ngapurancang” sebagai ungkapan rendah hati dan sopan.
“Dalem”	Sikap sopan saat dipanggil oleh orang lain
“Matur nuwun”	Sikap sopan saat diberi sesuatu oleh orang lain, dibarengi sikap tangan menyembah
“Nyuwun pangapunten”	Sikap sopan saat memohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan, dibarengi sikap tangan menyembah

Itulah keistimewaan Bahasa Jawa, yaitu terintegrasinya tata babasa dan tata nilai budaya Jawa. Karena itu belajar berbahasa Jawa adalah sekaligus belajar berbudaya Jawa. Untuk menjadi orang Yogyakarta sejati bukan hanya berbahasa Jawa tetapi harus berbudaya (tata krama) Jawa.

Ketiga, Bahasa Jawa menunjukkan kompleksitas sistem sosial Jawa. Hal itu terlihat dari sistem stratifikasi bahasa (*unda usuk*) dalam Bahasa Jawa

yang aslinya terdiri dari 14 tingkatan. Adapun yang umum dipelajari hanyalah tiga level yaitu Bahasa Jawa Ngoko, Bahasa Jawa Kromo Madya, dan Bahasa Jawa Krama Inggil. Untuk masa sekarang sering diringkaskan menjadi dua level saja yaitu Bahasa Jawa Ngoko dan Bahasa Jawa Krama.

Sistem stratifikasi bahasa Jawa itu menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta merupakan masyarakat yang kompleks. Para warga di dalamnya sangat sadar akan status sosial dan peran (*role*) mereka dalam konstelasi sosial vertikal dan horizontal. Sikap hormat dan menjaga kohesi sosial diutamakan.

Kebijakan tentang Bahasa Jawa

Menurut Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH., Negara Republik Indonesia sudah memiliki kebijakan politis yang mendukung pembangunan Keistimewaan DIY. Amandemen UUD 1945 menajamkan Pasal 32 tentang kebudayaan menjadi pasal yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa daerah. Dengan amandemen itu, konstitusi kita mendukung penuh pembangunan tata nilai budaya daerah termasuk tata nilai bahasa daerah.

Kebijakan membangun Basa Jawa di Yogyakarta menurut Ariyanti sudah kuat jauh sebelum lahirnya UU Nomot 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Instruksi Gubernur DIY No 1 tahun 2009 misalnya, khusus tentang penggunaan Bahasa Jawa “Seduna Pasrawungan nganggo Basa Jawa”. Sejak itu Bahasa Jawa digunakan dalam interaksi di kalangan ASN di Pemerintahan Daerah DIY paling tidak sehari dalam seminggu. Hal itu merupakan komitmen dan tindakan nyata melestarikan Bahasa Jawa.

Sekarang dengan Keistimewaan DIY, upaya melestarikan dan mengembangkan Bahasa Jawa sebagai identitas dan penguat Keistimewaan DIY semakin digalakkan. Bersama Paniradya Kaistimewan sedang menyusun Buku “Pawira” (Pandom Wicara Basa Jawa). Buku ini memberikan pedoman praktis untuk memulai aktif berbahasa Jawa seperti bagaimana membuka acara, berpidato, memulai diskusi, dan menanggapi sesuatu semua dalam Bahasa Jawa.

Menurut Ariyanti, pelestarian dan pengembangan Bahasa Jawa sudah ditekankan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang tata nilai budaya Yogyakarta. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa sebelum UU Keistimewaaan disahkan, Pemerintah Daerah DIY sudah memiliki *political will* yang kuat dan konsisten untuk membangun budaya berbahasa Jawa.

Proses Belajar

Ariyanti menegaskan bahwa yang penting adalah proses belajar. Kebijakan berbahasa Jawa tidak akan

menjadikan ASN dan masyarakat Yogyakarta berbahasa Jawa jika kita tidak mempraktikkannya.

Belajar dengan berpraktik langsung (*learning by doing*) harus dilakukan dengan tidak ragu dan takut salah. Pada awalnya masih bercampur-campur tidak masalah. Paling tidak kita sudah mulai menyisipkan kata-kata Jawa seperti “injih”, “nuwun sewu”, atau “matur nuwun”. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Tetapi jika kita sama sekali tidak pernah menyicil seperti itu maka Bahasa Jawa akan bisa hilang sama sekali.

Dari proses belajar yang penuh “*trial and error*” itu, kita dapat meningkatkan level belajar ke tingkatan yang lebih serius. Dalam hal inilah Ariyanti menegaskan pentingnya buku pedoman “Pawira” tersebut. Dari praktik-praktik yang bersifat spontan kemudian kita belajar lebih serius.

Prof Suwarna mendorong ASN untuk belajar lebih serius sebab mereka adalah pemberi teladan bagi masyarakat awam. Yang sering terjadi menurut Suwarna adalah kebiasaan ASN atau pejabat untuk berpidato dengan “men-Jawa-kan” bahasa Indonesia seperti, “Dengan mengucapkan bismillah, acara kula nyatakan dibuka kanti resmi”. Yang benar adalah, “Kanthi bismillah, adicara ing wanci menika tumuli kawiwitan.”

Adapun di kalangan masyarakat, menurut Prof Suwarna, salah kaprah yang sering terjadi adalah fenomena yang disebutnya sebagai “krama desa” dan “krama kutha”. Gejala “krama desa” itu adalah kesalahan dalam upaya menjadikan “krama” istilah-istilah yang sudah “krama” dan menjadikan “krama” nama daerah. Misalnya kata “jawah” menjadi “jawoh”, kata “tiyang sepuh” menjadi “tiyang sepah”, kata “Kulon Progo” menjadi “Kilen Pragi”, kata “Wonosari” menjadi “Wonosantun”, dan kata “Boyolali” menjadi “Bajul Kesupen”.

Adapun gejala “krama kutha” menurut Prof Suwarno adalah gejala memodifikasi istilah dalam Bahasa Indonesia menjadi di-Jawa-kan namun dengan tidak tepat. Misalnya kata “mulai” menjadi “milai”. Ada pejabat berkata, “Bapak lan ibu, mangga acara kita mulai.” Yang benar adalah, “Bapak lan ibu, acara kula bikak kanthi resmi.”

Generasi Milenial

Menurut Prof Suwarna, kebijakan nasional tentang pendidikan karakter menjadi pintu masuk untuk menggalakkan pendidikan Bahasa Jawa. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter yang menegakan proses-proses pembiasaan dan pembudayaan kepribadian (PPK). Pendidikan karakter menjadi pintu masuk bagi pendidikan Bahasa Jawa karena Bahasa

Jawa mengintegrasikan antara tata bahasa (Santun Berbahasa) dengan tata krama (sikap dan perilaku luhur).

Prof Suwarna punya metode kreatif untuk mendorong para mahasiswa mencintai Bahasa Jawa. Menurutnya, dengan metode ini para mahasiswa bisa dijadikannya menjadi “Wong Ngayogyo” hanya dalam lima menit. Metodenya adalah berucap dan bertindak “RAJIN” yaitu

- Bersikap “ngapurancang” yaitu sikap tegak sopan penuh hormat dengan menaruh kedua telapak tangan di depan.
- Mengarahkan jempol ke arah seseorang atau sesuatu yang ditunjuk.
- Mengucapkan kata-kata yang berciri “n” yaitu “injih”, “mangga”, “matur nuwun”, dan “nuwun sewu”.

Barbahasa Jawa adalah berbicara dan berperilaku Jawa. Jika belum fasih berbahasa Jawa, setidaknya kita berperilaku Jawa dengan sikap-sikap sopan tersebut. Itulah identitas perilaku Yogyakarta. Namun jika mau lengkap, kita harus kuat dalam berbahasa dan berperilaku Jawa tersebut.

Guru SMAN 1 Mlati Sleman Abdul Afif Rosyidi, S.Pd, ada beberapa proses belajar yang perlu diterapkan pada generasi milenial khususnya pelajar. Pertama, yang penting generasi milenial masa kini itu sering mendengar Bahasa Jawa. Kata kuncinya adalah “sering

mendengar” sehingga Bahasa Jawa tidak menjading sesuatu yang asing.

Kedua, karena itu, proses belajar berbahasa Jawa harus dipraktekkan di rumah dan di sekolah. Anak akan fasih berbahasa Jawa jika di lingkungan keluarganya digunakan Bahasa Jawa dan di sekolah diajarkan Bahasa Jawa. Tetapi jika hanya belajar 2 jam Bahasa Jawa di sekolah dan di rumah tidak memakai Bahasa Jawa maka anak tidak pasti akan susah berbahasa Jawa.

Ketiga, jangan takut salah dalam berpraktik bahasa Jawa. Anak-anak perlu dibiasakan untuk setidaknya memakai istilah-istilah Bahasa Jawa seperti “mangga”, “maturnuwun”, “nyuwun tulung”, “pareng”. Meskipun masih bercampur dengan Bahasa Indonesia, tidak masalah.

Mengenai hal belajar tanpa takut salah ini, Prof Suwarna mengkritik ASN yang terkadang menghindari berbahasa Jawa karena takut salah. Kecenderungannya, dalam pidato atau rapat, ASN meminta ijin untuk berbahasa Indonesia karena takut sakah. Seharusnya meminta ijin untuk berbahasa Jawa dengan tidak sempurna dan memohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Sebab jika kita terus-menerus menghindari berbahasa Jawa maka Bahasa Jawa itu akan hilang dengan sendirinya.

Keempat, generasi milenial perlu diajar dan belajar secara kreatif. Sebagai guru, Abdul Afif sering mengajar Bahasa Jawa dengan metode digital. Misalnya, para siswa diminta membuat “vlog” tentang sebuah topik dengan penjelasan-penjelasan yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Jawa seperti nama-nama tanaman, bangunan, tarian, dan sebagainya. Para siswa kemudian mengunggah konten-konten berbahasa Jawa itu di kanal YouTube. Yang terbaik dipilih untuk diunggah di kanal YouTube milik Pak Guru Abdul.

Prof Suwarna menambahkan bahwa belajar berbahasa Jawa itu perlu “*sae dan leres*”. Arti “*sae*” itu berarti sesuai dengan konteksnya (*empan papan*). Adapun “*leres*” itu berarti tepat secara tata bahasa. Berbahasa Jawa secara “*sae*” itu berarti tidak dituntut harus rumit atau kompleks manakala kita berbicara kepada sesama teman atau kawan akrab. Baru jika berbicara dalam konteks pertemuan formal maka harus berbahasa Jawa secara kompleks. Dengan demikian, generasi milenial jangan takut berbahasa Jawa dengan kawan-kawannya dengan bahasa Jawa yang sederhana. Yang penting dipraktekkan dulu, tidak perlu menunggu harus “*canggih*”. Dari praktik-praktik sederhana itulah kemudian selalu dievaluasi dan direvisi sehingga kita semakin hari semakin bisa berbahasa Jawa cera tepat dan benar (*leres*) menurut tata bahasanya.

Rembugan Berlanjut

Rembugan tentang Bahasa Jawa sebagai penguat Keistimewaan DIY terus berlanjut. Di akhir acara *podcast* itu muncul banyak pertanyaan dari para *netizen* yang tertarik dan antusias. Artinya diskusi akan terus berlanjut dan dari *podcast* ini banyak topik diskusi lebih lanjut yang perlu dikembangkan.

Sebagai catatan, pelestarian dan pengembangan Bahasa Jawa sebagai identitas dan penguat Keistimewaan DIY itu perlu dibahas dalam konteks Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang terkait. Menurut Pasal 35 dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY, kebijakan pembangunan Kewenangan Kebudayaan itu diselenggarakan untuk (1) melindungi, mengembangkan, (3) memanfaatkan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, karsa, dan karya. Adapun obyek pembangunannya adalah kebudayaan yang mengakar di DIY yang meliputi (1) nilai-nilai, (2) pengetahuan, (3) norma-norma, (4) adat istiadat, (5) benda budaya, (6) seni, (7) tradisi luhur.

Pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY dijelaskan tentang bagaimana kebijakan pembangunan kebudayaan itu dilakukan. Jadi, dari Pasal 35 ayat (1)

dijelaskan tentang bentuk kebijakannya, dan pada Pasal 35 ayat (2) dijelaskan tentang bagaimana melakukan kebijakan itu.

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan

Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY

Pasal 35 ayat (1)	Pasal 35 ayat (2)
Kebijakan	Cara Melakukan Kebijakan
Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan sabagai hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang mengakar di DIY yang meliputi kebudayaan yang mengakar di DIY yang meliputi (1) nilai-nilai, (2) pengetahuan, (3) norma-norma, (4) adat istiadat, (5) benda budaya, (6) seni, (7) tradisi luhur.	<ul style="list-style-type: none"> a. inventarisasi b. pendokumentasian c. penyelamatan d. penggalian e. penelitian dan pengembangan f. pengayaan g. pendidikan h. pelatihan i. penyajian j. peeyebarluasan k. revitalisasi l. dekonstruksi dan rekonstruksi m. penyaringan n. rekayasa

Keterangan peristilahan (berdasar Bagian Penjelasan dari Pasal 35 Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY

- “Inventarisasi” adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara bersifat fisik maupun non fisik.
- “Pendokumentasian” adalah kegiatan menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
- “Penyelamatan” adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan.
- “Penggalian” adalah mengungkap, memilah, dan mengkaji data dan/atau informasi kebudayaan.
- “Penelitian dan pengembangan” melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- “Pengayaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses

eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.

- “Penyajian” adalah penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
- “Revitalisasi” adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru, dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- “Dekonstruksi dan rekonstruksi” adalah pembangunan kembali kebudayaan sesuai aslinya.
- “Penyaringan” adalah upaya untuk memilah kebudayaan yang bersifat positif dan negatif untuk keperluan pengembangan.
- “Rekayasa” adalah upaya penciptaan kebudayaan sesuai perkembangan.

Menurut Pasal 36 dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY, yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah “Tata Nilai Budaya Yogyakarta”. Pada Pasal 36 ayat (2) Tata nilai tersebut mencakup: (!) tata nilai religion-spiritual, (2) tata nilai moral, (3) tata nilai kemasyarakatan, (4) tata nilai adat dan tradisi, (5) tata nilai pendidikan dan pengetahuan, (6) teknologi, (7) tata nilai penataan ruang dan arsitektur, (8) tata nilai mata pencaharian, (9) tata nilai

kesenian, (9) tata nilai bahasa, (10) benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (11) tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan, (12) keuangan dan kebangsaan, (13) tata nilai semangat ke Yogyakarta.

Berikut ini adalah penjelasan pada Bagian Penjelasan dari Pasal 36 Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY:

- Yang dimaksud dengan “Tata Nilai Budaya Yogyakarta” adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong-gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sengguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).
- Yang dimaksud dengan “tata nilai religion-spiritual” adalah nilai-nilai dalam masyarakat DIY yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai moral” adalah menjaga kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia harus dimulai dari diri manusia sendiri dengan menjaga kebenaran pemikiran dan ucapan,

kebaikan perilaku, keharmonisan dan keindahan tatanan pergaulan hidup, baik dengan sesama manusia, dengan alam semesta, maupun terutama dengan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

- Yang dimaksud dengan “tata nilai kemasyarakatan” adalah masyarakat (*bebrayan agung*) dipahami sebagai suatu keluarga tetapi keluarga yang besar. Landasan utama suatu keluarga ialah kasih sayang (*sih kinasihan, asih ing sesami*) di antara para anggotanya. Hidup bermasyarakat haruslah dilandasi oleh kasih sayang dengan mewujudkan dan senantiasa menjaga kerukunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai adat dan tradisi” adalah adat sebagai sesuatu yang dikenali, diketahui, dan diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan komunitas atau masyarakat tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai pendidikan dan pengetahuan” adalah pendidikan merupakan proses pembudayaan manusia yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengelola, dan meningkatkan

kualitas kecerdasan kehidupannya, baik kecerdasan kejiwaan yang meliputi religion-spiritualitas (taqwa), moralitas (karsa), emosionalitas (rasa), dan intelektualitas (cipta) maupun kesehatan dan pengembangan raganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

- Yang dimaksud dengan “tata nilai teknologi” adalah teknologi pada hakikatnya merupakan praktek penyiasatan atau rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dan bahkan keinginan hidupnya, secara lebih efektif dan efisien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai penataan ruang dan arsitektur” adalah pemilihan lokasi topografis Keraton (baik sebagai pusat spiritual, kekuasaan, maupun budaya), penentuan wujud dan penamaan sosok bangunan hingga detail ornamen dan pewarnaannya, tata letak dan tata rakit bangunan, penentuan dan penamaan ruang terbuka, pembuatan dan penamaan jalan, bahkan hingga penentuan jenis dan nama tanaman, kesemuanya itu secara simbolik-filosofis melambangkan nilai-nilai perjalanan hidup manusia dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

- Yang dimaksud dengan “tata nilai mata pencaharian” adalah meskipun hidup di dunia hanya sementara, tetapi tugas mulia yang harus ditunaikan manusia ialah bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih rame ing gawe*) mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai kesenian” adalah kesenian merupakan ekspresi estetik manusia dalam menjalani dan memaknai kehidupan dengan berbagai cara dan sarana baik yang terdapat pada diri manusia sendiri, hasil ciptaannya, maupun segala sesuatu yang disediakan oleh alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai bahasa” adalah bahwa Bahasa Jawa menunjukkan dan sekaligus mengatur hubungan antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

- Yang dimaksud dengan “tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya” adalah wujud fisik kebudayaan (budaya material) sebagai hasil aktualisasi kemampuan cipta, karsa, dan rasa masyarakat Yogyakarta yang kasat mata (*tangible*) merepresentasikan tahap-tahap peradaban beserta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan” adalah seorang pemimpin dituntut memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin baik dalam hal pengetahuan, keberanian, maupun kearifan. Seorang pemimpin harus berani tampil di depan memberi teladan bagi yang dipimpin (*ing ngarsa sung tuladha*), seorang pemimpin harus menggugah semangat atau memotivasi yang dipimpin (*ing madya mangun karsa*) agar lebih giat dalam perjuangan hidup, dan memberi dorongan, kekuatan, dan perlindungan (*ing wuntat tut wuri handayani*) agar yang dipimpin kian percaya diri dan senantiasa memperoleh kemajuan dalam menapaki kehidupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

- Yang dimaksud dengan “tata nilai kejuangan dan kebangsaan” adalah Yogyakarta merupakan satu komponen yang amat penting dalam sejarah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Yang dimaksud dengan “tata nilai semangat keyogyakartaan” adalah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) dan dalam rangka meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*), masyarakat Yogyakarta memiliki nilai-nilai khas sebagai penciri khusus keyogyakartaan dan dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Bab 2.

Amanat 5 September 1945

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan (Edisi Spesial)

Waktu : 5 September 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya Kaistimewan

Nara sumber :

- Dr. Sri Margana (sejarawan Universitas Gadjah Mada)
- Hendro Muhaimin, MA (tenaga ahli Parampara Praja, Peneliti pada Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada)
- Dr. Haryadi Baskoro (kolumnis isu-isu Keistimewaan DIY)

Moderator : Wawan Isnawan

Sebelum mendiskusikan sejarah Amanat 5 September 1945, moderator membeberkan kronologi sejarah dari momen Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga momen seputar Amanat tersebut. Kronologi penggabungan Yogyakarta dengan Republik Indonesia merupakan bagian dari peristiwa Kemerdekaan RI yang bersejarah itu. Dalam buku “Tahta untuk Rakyat” (1982), kronologi itu dicatat sebagai berikut:

- 17 Agustus 1945 – Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Sukarno-Hatta.
- 18 Agustus 1945 – UUD 1945 disahkan. Pasal 18 mengakui daerah istimewa berdasar hak asal-usulnya. Pada Bagian Penjelasan dari Pasal 18 ditulis demikian: “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.
- 18 Agustus 1945 – HB IX mengirim “kawat” kepada Sukarno-Hatta dan KRT Radjiman Wedjodiningrat (Ketua BPUPKI) mengucapkan selamat atas terbentuknya Negara RI
- 19 Agustus 1945 – Soekarno menandatangani Piagam Kedudukan untuk Sultan HB IX dan Piagam Kedudukan untuk Paku Alam VIII
- 20 Agustus 1945 – HB IX kembali mengirim “kawat : kali ini HB IX sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai) Yogyakarta. Kawat ditujukan kepada Soekarno-Hatta (Presiden dan Wapres RI). Isinya HB IX menyatakan “sanggup berdiri di belakang pimpinan mereka” . Lalu Paku Alam VIII mengirim pernyataan yang sama.

- 5 September 1945 – Sultan HB IX dan Paku Alam VIII masing-masing mengeluarkan amanat yang menegaskan bahwa Kasultanan dan Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia.
- 6 September 1945 – Dua utusan Pemerintah Pusat (Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis) datang ke Yogya menyampaikan Piagam Kedudukan dari Soekarno untuk HB IX dan PA VIII

Adapun isi dari Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX adalah sebagai berikut.

AMANAT

SRI PADUKA INKENG SINUWUN KANJENG SULTAN

Kami, Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menetapkan

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan

Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya.

3. Bahwa berhubung antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat, 5 September 1945

Hamengku Buwono IX

Poin-poin Penting

Haryadi Baskoro mengawali diskusi dengan menggarisbawahi beberapa poin penting dalam Amanat 5 September itu sebagai berikut”

- Secara lugas Sultan HB IX menegaskan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan. Hal itu berarti bahwa asal-usulnya merupakan sebuah negara tersendiri yang memiliki (1) pemerintahan, (2) penduduk, (3) wilayah, (4) diakui kedaulatannya.
- Secara lugas Sultan HB IX menegaskan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta setelah bergabung

dengan Negara RI adalah “daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia”.

- Di dalam daerah istimewa ini, Sultan HB IX menegaskan dirinya sebagai Kepala Daerah yang memegang semua kekuasaan dan pemerintahan di Yogyakarta,
- Hubungan Negeri Kasultanan Ngayogyakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung
- Sultan HB IX sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Embrio Keistimewaan DIY

Menurut Haryadi Baskoro, sejarah Amanat 5 September 1945 tidak bisa dipahami secara terlepas dari kronologi sejarah sebelumnya. Terbitnya amanat itu merupakan – istilah sekarang – rangkaian “gercep” (gerak cepan) Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Begitu bergabung dengan RI dan mendapat dukungan dari Presiden RI Soekarno, dwi tunggal Yogyakarta ini bertindak tegas untuk menegaskan bahwa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa di dalam Negara RI.

Setelah menerima “kawat” ucapan selamat atas terbentuknya Republik Indonesia dari Sultan HB IX pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno segera mengirimkan “Piagam Kedudukan” yang

ditandatanganinya pada tanggal 19 Agustus 1945. Ada dua piagam, yang satu untuk Sultan HB IX dan yang satu lagi untuk Sri Paku Alam VIII. Namun kedua piagam itu baru sampai di Yogyakarta pada tanggal 6 September 1945, dibawa oleh dua utusan Pemerintah Pusat (Menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis),

Isi “Pagam Kedudukan” dari Presiden Soekarno untuk Sultan Hamengku Buwono IX adalah sebagai berikut.

**PIAGAM KEDUDUKAN
SRI PADUKA INGGENG SINUWUN KANJENG
SULTAN HAMENGGU BUWONO IX**

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan
Inggeng Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono ,
Senopati ing Ngalaga, Abdurahman Sayidin
Panotogomo, Kalifatullah Inggeng Kaping IX ing
Ngayogyakarta Hadiningrat,
pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa
Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala
pikiran, tenaga, jiwa dan raga
untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian
daripada Republik Indonesia

Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Sukarno

Beberapa poin penting dari piagam itu adalah sebagai berikut:

- Presiden RI menghormati kekuasaan (otoritas) Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta. Hal itu terlihat dari penyebutan gelar.
- Presiden RI menetapkan kedudukan Sultan HB IX sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta. Hal itu berarti merupakan pengakuan kedaulatan Kasultanan Yogyakarta, tidak seperti perlakuan penjajah Belanda maupun penjajah Jepang yang menekan, meminggirkan, dan akhirnya hendak menumpas Raja dan Kasultanan Yogya.
- Namun demikian hal itu bukan berarti ada negara di dalam negara. Kasultanan Yogyakarta tidak menjadi negara merdeka di dalam Negara RI, Karena itu Presiden RI menegaskan bahwa Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Sampai pada tahap ini Yogyakarta belum disebut atau ditetapkan sebagai Daerah Istimewa di dalam RI.
- Presiden RI menetapkan Sultan HB X untuk memimpin Daerah Yogyakarta itu. Dalam hal ini Presiden RI menaruh kepercayaan bahwa Sultan HB IX akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Yogyakarta itu,

Adapun isi “Pagam Kedudukan” dari Presiden Soekarno untuk Sri Paku Alam VIII adalah sebagai berikut.

PIAGAM KEDUDUKAN

SRI PADUKA KANJENG GUSTI

PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM VIII

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam Ingkang Kaping VIII,

pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanheng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Pakualaman sebagai bahan daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

Sukarno

Beberapa poin penting dari piagam itu adalah sebagai berikut:

- Presiden RI menghormati kekuasaan (otoritas) Sri Paku Alam VIII sebagai Adipati Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Hal itu terlihat dari penyebutan gelar.

- Presiden RI menetapkan kedudukan Sri Paku Alam VIII sebagai Adipati Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Hal itu berarti merupakan pengakuan kedaulatan Kasultanan Yogyakarta, tidak seperti perlakuan Penjajah Belanda maupun Penjajah Jepang yang menekan, meminggirkan, dan akhirnya hendak menumpas kerajaan-kerajaan di Yogyakarta.
- Namun prinsipnya di dalam Negara RI tidak ada negara di dalam negara. Karena itu ditegaskan bahwa Daerah Pakualaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia.
- Presiden RI menetapkan Sultan HB X untuk memimpin Daerah Yogyakarta itu. Dalam hal ini Presiden RI menaruh kepercayaan bahwa Sri Paku Alam VIII akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Pakualaman itu,

Dengan bergabungnya Yogyakarta ke dalam Negara RI maka hal itu berarti Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman tidak bisa menjadi kerajaan yang merdeka. Sebab, di dalam Republik Indonesia tidak ada negara di dalam negara. Bergabung dengan RI berarti menjadi bagian dari Negara RI. Adapun sejarah panjang eksistensi Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman tidak boleh hilang begitu saja. Di satu sisi harus menundukkan diri sebagai bagian dari Negara RI namun di sisi lain ingin melanjutkan warisan leluhur

sebagai kerajaan-kerajaan yang kuat. Karena itu pilihannya adalah menjadi “daerah istimewa” di dalam Negara RI.

Karena itu, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII masing-masing menerbitkan Amanat tertanggal 5 September 1945 yang keduanya menegaskan bahwa Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah “daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia”. Dengan demikian Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai raja Kasultanan dan Adipati Kadipaten Pakualaman menegaskan bahwa kerajaan-kerajaannya itu adalah “daerah istimewa di dalam Negara Republik Indonesia”. Karena itu menurut Sujanto dalam buku “Daerah Istimewa di dalam NKRI” (1988), Amanat 5 September 1945 adakag “embrio” Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII itu sendiri konstitusional, sebab UUD 1945 (asli yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sebelum sekarang diamandemen) memberi peluang terbentuknya daerah-daerah istimewa di dalam Negara RI. Pasal 18 UUD 1945 itu berbunyi demikian: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pada Bagian Penjelasan dari Pasal 18 tersebut berbunyi demikian: “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

Menegaskan Keistimewaan Yogyakarta

Sejarawan Universitas Gadjah Mada Sri Margana mengatakan bahwa Keistimewaan Yogya harus ditegaskan kembali dengan Amanat 5 September 1945 itu karena kekuasaan politik kenegaraannya sudah berubah. Dulu di jaman penjajahan Belanda, Kerajaan Yogyakarta diakui sebagai entitas politik. Karena itu terhadap kerajaan Yogyakarta, pihak Belanda selalu membuat kontrak politik setiap kali ada Sultan baru yang naik tahta.

Adapun di dalam negara baru Republik Indonesia, konstitusinya tidak memungkinkan ada negara di dalam negara. Karena itu bergabungnya Nagari Yogyakarta ke dalam Negara RI mau tidak mau membuat Kerajaan Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten) harus melebur dengan Negara RI dengan menjadi bagian di dalamnya. Justru karena itulah maka untuk melanjutkan sejarah Kerajaan Yogyakarta maka

Sultan HB IX dan Paku Alam VIII segera menegaskan status Keistimewaan Yogyakarta di dalam Negara RI.

Jika tidak ada penegasan tentang Keistimewaan DIY seperti itu maka kemungkinannya Yogyakarta hanya menjadi seperti provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu dialami oleh Surakarta yang sebenarnya juga berpeluang sama untuk menjadi daerah istimewa. Namun karena sikap tegas dan cepat dari Surakarta berbeda dengan Yogyakarta maka hanya Yogyakarta yang menjadi Daerah Istimewa di dalam Negara RI.

Amanat 5 September 1945 dan Keistimewaan DIY

Haryadi Baskoro setuju dengan pandangan Sujamto dalam bukunya berjudul “Daerah Istimewa di dalam NKRI” (1988) bahwa Amanat 5 September 1945 adalah embrio Keistimewaan DIY. Amanat ini memberi penegasan bahwa dua kerajaan yang ada di Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten) kedua-duanya adalah daerah istimewa di dalam Negara RI. Lalu bagaimana prosesnya sampai ada penegasan bahwa Yogyakarta merupakan satu Daerah Istimewa di dalam RI?

Setelah terbitnya dua Amanat 5 September 1945, tonggak perkembangan Keistimewaan Yogya yang berikutnya adalah terbitnya Amanat 30 Oktober 1945. Menurut Sujamto (1988), Amanat 30 Oktober 1945 menegaskan bahwa Yogyakarta yang terdiri dari Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah satu (1) Daerah Istimewa di dalam Negara RI. Sebab

sebelumnya, Amanat 5 September 1945 itu berimplikasi bahwa ada dua daerah istimewa yaitu daerah istimewa Kasultanan dan daerah istimewa Pakualaman.

Sujamto menulis demikian, “Menyadari bahwa dengan dua Amanat 5 September 1945 itu lahir dua daerah istimewa di Yogyakarta dan dengan demikian kurang menguntungkan untuk perkembangan selanjutnya maka pada fase berikutnya, yaitu dalam Amanat 30 Oktober 1945 tidak lagi dibuat dua amanat dengan isi yang sama akan tetapi satu amanat yang ditandatangani berdua. Ini untuk menunjukkan bahwa di Yogyakarta hanya ada satu daerah istimewa” (Sujamto, 1988, hal 205).

Kecuali itu, Amanat 30 Oktober 1945 itu juga diterbitkan untuk mensikapi dua peristiwa yang terjadi setelah terbitnya Amanat 5 September 1945. Kedua peristiwa itu adalah:

- 22 Oktober 1945 – Komisaris Tinggi di hadapan HB IX dan PA VIII menyatakan tidak perlu adanya “Subcommisariat” di Yogyakarta
- 29 Oktober 1945 – “Komite Nasional Daerah Yogyakarta” membentuk “Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta” yang menjadi Badan Legislatif (Badan Pembuat Undang-Undang).

Isi dari Amanat 30 Oktober 1945 yang dikeluarkan dan ditandatangani bersama oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII adalah sebagai berikut.

AMANAT

SRI PADUKA INKENG SINUWUN KANJENG SULTAN HAMENGKU BUWONO IX & SRI PADUKA KANJENG GUSTI

PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM, KEPALA DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Amanat Kami berdua pada tanggal 5 September 1945.
2. Bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dahulu dipegang oleh pemerintah jajahan (dalam jaman Belanda dijalankan oleh gubernur dengan kantornya, dalam jaman Jepang oleh Koti Zimu Koku Tyokan dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua.
3. Bahwa Tuan Komisari Tinggi pada tanggal 22 Oktober 1945 di Kepatihan Jogjakarta di hadapan Kami berdua dengan disaksikan oleh para pembesar dan para pemimpin telah

menyatakan tidak perlunya akan adanya Subcommisariat dalam Daerah Kami berdua.

4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1945 oleh Komite Nasional Daerah Yogyakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerja yang dipilih dari antara anggota-anggotanya, atas kehendak rakyat dan panggilan masa, yang disertai untuk menjadi Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan haluan jalannya Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Daerah Yogyakarta, maka Kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta, dengan ini menyatakan:

Supaya jalannya pemerintahan dalam daerah kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Badan Pekerja tersebut adalah suatu Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang) yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat dalam daerah kami berdua untuk membikin undang-undang dan menentukan haluan jalannya pemerintahan dalam daerah

kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dari segala bangsa dalam daerah kami berdua mengindahkan amanat kami ini.

Jogyakarta, 30 Oktober 1945

HAMENGKU BUWONO IX

PAKU ALAM VIII

Beberapa poin penting dalam amanat itu adalah sebagai berikut

- Kekuasaan yang dulu dipegang oleh penjajah telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali kepada HB IX dan PA VIII. Pada tanggal 26 September 1945, semua pegawai kantor-kantor (pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan perusahaan, karyawan pabrik) menjalankan aksi untuk mengambil alih kekuasaan dan pimpinan yang sampai saat itu masih berada di tangan orang asing. Aksi-aksi itu didukung penuh oleh rakyat, pemuda-pemuda, dan BKR. Keesokan harinya, tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengeluarkan pengumuman kepada seluruh penduduk bahwa pada tanggal 26 September 1945 kekuasaan Pemerintah Daerah Yogyakarta seluruhnya telah berada di tangan bangsa Indonesia.

- Komisaris Tinggi di hadapan HB IX dan PA VIII menyatakan tidak perlu adanya “Subcommisariat” di Yogyakarta.

HB IX – PA VIII semufakat dengan “Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta” untuk menjadikan Badan Pekerja itu sebagai “Wakil Rakyat” yang membuat undang-undang dan menjalankan pemerintahan sesuai kehendak rakyat (demokrasi).

Semangat Kebangsaan

Tenaga ahli Parampara Praja DIY Hendro Muhaimin mengatakan bahwa suasana kebatinan pada seputar momentum Kemerdekaan RI itu diliputi semangat kebangsaan yang luar biasa. Beberapa tokoh dari Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sendiri bahkan terlibat dalam sidang-sidang BPUPKI. Mereka antara lain Pangeran Bintoro, Pangeran Purboyo, dan Pangeran Suryo.

Pada masa itu bukan hanya Kasultanan dan Kadipaten saja, tetapi juga banyak kerajaan yang masih eksis di nusantara, yang sama-sama berpikir untuk menyatakan sikap jika Republik Indonesia diproklamkan. Semangat kebangsaan Indonesia meliputi segenap bangsa Indonesia. Namun begitu RI diploklamirkan, ternyata Kasultanan dan Kadipaten di Yogyakarta adalah yang cepat menyatakan bergabung dan mendukung RI.

Yogyakarta sebagai Modal RI

Menurut Hendro Muhaimin yang juga peneliti di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Amanat 5 September 1945 itu menjadi modal politik bagi Kemerekaan RI. Sebab, sebagai sebuah negara merdeka, RI membutuhkan unsur-unsur negara yang jelas yaitu (1) penduduk, (2) wilayah, (3) pemerintahan, (4) pengakuan kedaulatan. Pada waktu itu, unsur-unsur itu belum kuat bahkan belum jelas. Dengan bergabungnya Yogyakarta di dalam RI dan penegasan politis bahwa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa di dalam RI itu maka RI memiliki keempat modal dasar tersebut,

Karena itu Hendro menyatakan bahwa Amanat 5 September 1945 itu bukan hanya embrionya Keistimewaan DIY tetapi juga embrionya NKRI. Uniknya adalah kemunculan dwi tunggal baik di Negara RI (Soekarno – Hatta) dan dwi tunggal DIY (Sulan HB IX – Paku Alam VIII).

Untuk itu sejarah Amanat 5 September 1945 seharusnya diperingati sebagai peringatan nasional. Hal bukan berarti kita hendak menonjolkan Yogyakarta, tetapi menegakkan kronologi tentang Kemerdekaan RI itu sendiri.

“Bergabung” dan “Berhubungan Langsung”

Menurut Sri Margana, proses yang terjadi pada Agustus 1945 itu adalah “Yogyakarta bergabung dengan RI”.

Tepatnya, Nagari Yogyakarta yang terdiri dari dua kerajaan (Kasultanan dan Kadipaten) bergabung dengan Negara RI. Logika “bergabung” itu adalah karena kronologinya adalah RI menyatakan merdeka dulu (17 Agustus 1945) dan kemudian Nagari Yogya menyatakan selamat dan mendukung RI.

Proses bergabungnya Nagari Yogyakarta ke dalam RI dan kemudian pengakuan Yogyakarta sebagai daerah istimewa di dalam RI adalah urusan antara penguasa Nagari Yogyakarta (Sultan dan Paku Alam yang bertahta) dengan Presiden RI. Sultan HB IC dan Paku Alam VIII itulah yang menyatakan bergabung lalu Presiden RI Soekarno yang secara langsung memberikan Piagam Kedudukan kepada kedua beliau.

Dengan Amanat 5 September 1945 itu, Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menegaskan bahwa soal Keistimewaan DIY adalah soal hubungan langsung antara dwi tunggal DIY ini dengan Presiden RI. Pada bagian ketiga dari amanat itu ditulis demikian: “Bahwa berhubung antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia”

Melanjutkan Sejarah

Keistimewaan DIY bukan hanya setelah masuk di dalam RI. Menurut sejarawan Sri Margana, Yogyakarta

pada masa penjajahan merupakan sebuah *speciaal gebied* (daerah istimewa). Pada jaman pendudukan Jepang, Pemerintahan Bala Tentara Jepang juga mengakui Yogyakarta sebagai daerah Koti yang juga berarti daerah istimewa yang berupa kerajaan.

Menurut Margana, konsep penetapan daerah-daerah tertentu sebagai daerah-daerah istimewa sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Hindu di nusantara para masa silam. Biasanya dibangun prasasti-prasasti khusus yang berfungsi menjadi semacam sertifikat atau surat keputusan yang diberikan kepada tokoh yang berjasa atau wilayah yang istimewa. Misalnya daerah perdikan yang dinyatakan istimewa karena penduduknya dibebaskan untuk tidak membayar pajak. Ada pula daerah istimewa karena mempunyai keunggulan sumber daya alamnya seperti ada sumber air atau hutan jati. Jadi, eksistensi daerah-daerah istimewa di nusantara sudah mentradisi sejak lama.

Dengan demikian jika pada 1945 Negara RI mendukung daerah-daerah istimewa bukanlah hal baru. Penetapan daerah-daerah istimewa merupakan kekhasan politik pemerintahan daerah di nusantara.

Menurut Margana, Amanat 5 September 1945 itu juga berbicara tentang kekuasaan atau kewenangan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Dalam konteks saat itu, kewenangan-kewenangannya mencakup semua urusan di Yogyakarta. Hal itu ditegaskan pada bagian

kedua amanat itu: “Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.”

Lima Kewenangan Istimewa DIY sebagaimana ditulis dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY adalah kelanjutan dari kewenangan-kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Amanat 5 September 1945 itu. Dalam konteks kenegaraan RI, tidak mungkin Kepala Daerah DIY menguasai semua kewenangan. Sebab dalam konteks negara tentu ada kewenangan-kewenangan yang harus berada di pemerintah pusat seperti misalnya urusan kemiliteran. Karena itu di dalam UU Keistimewaan itu dibatasi hanya ada lima Kewenangan Istimewa.

Energi Sejarah untuk Keistimewaan DIY Masa Kini

Haryadi Baskoro merefleksi peringatan sejarah Amanat 5 September 1945 untuk memperbesar semangat kontribusi DIY kepada Indonesia. Bahwa Yogyakarta Istimewa bukan hanya untuk dirinya, tetapi Yogyakarta Istimewa untuk Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa sejak Keistimewaannya masih embrio, kontribusi Yogyakarta bagi RI sudah sangat besar. Selama 1946-1949 menjadi Ibukota RI.

Serangan Umum 1 Maret 1949 membuka jalan bagi pengakuan dunia akan kedaulatan RI. Bahkan menurut catatan KPH Yudahadiningrat, Sultan HB IX membiayai APBN pertama RI. Meminjam bahasa Slamet Sutrisno, Yogya itu seperti seorang ibu yang dengan penuh perjuangan mengasuh, merawat, dan menyelamatkan bayi Republik Indonesia (*Kedaulatan Rakyat*, 17 Maret 2008).

Pada era Orde Baru (1966-1998), Sultan HB IX berjasa luar biasa dalam upaya pemulihan ekonomi negara yang sedang sangat terpuruk. Berkat beliau, RI mendapat banyak dukungan dana dari berbagai negara. Ironisnya, Keistimewaan Yogya malahan hampir dihapuskan. Selama masa penggodokan RUU Nomor 5 Tahun 1974, DIY dan DI Aceh akan dihapuskan dengan alasan pemerintahan daerah di nusantara harus diseragamkan.

Kontribusi Yogya dalam menggulirkan Gerakan Reformasi Nasional sangat signifikan. Di akhir kekuasaan rezim Orde Baru, Sultan HB X dan Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat 20 Mei 1998 untuk mendukung reformasi. Sementara segenap rakyat Yogya menggelar 'Pisowanan Ageng' sebagai pengerahan *people power*. Alhasil, sehari kemudian rezim lama runtuh dan roda pembaruan pun bergulir.

Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana kontribusi Yogya bagi RI pasca UUK? Jika di era Keistimewaan

Yogya masih dalam embrio saja kontribusinya besar, semestinya sekarang lebih dahsyat. Selama 70 tahun (1950-2012) Keistimewaan DIY berkontribusi besar meski hanya ditopang oleh undang-undang yang belum lengkap. Semestinya sekarang setelah UUK mengatur DIY secara rinci dan jelas, kontribusi Yogya bagi RI menjadi luar biasa.

Jika Yogya hanya sibuk dengan urusan dirinya sendiri, di situlah kemerosotan keistimewaan yang sesungguhnya. Apalagi jika kemudian bermasalah atau berkonflik internal dalam urusan keistimewaan itu. Misalnya konflik berebut Dana Keistimewaan (Danais). Yogya bukan lagi ibu pengasuh bayi RI. Yogya hanyalah seorang ibu tua bangka yang nasibnya bergantung pada anaknya yang kepeduliannya sebenarnya tak jelas.

Bab 3.

9 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 3 September 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Nara sumber :

- Tri Agus Nugroho, S.Sos., M.Sc (Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY)
- Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pari Paniradya Kaistimewan DIY)
- Resti Dian Puspita Sari (pelajar SMAN 1 Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman)
- Drs. Bakhtiar Nurhidayat (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY)

Moderator : Wijil Rachmadhani

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan nama UUK disahkan pada tanggal 31 Agustus 2012. Dengan demikian sampai 31

Agustus 2021 UUK genap berusia 9 tahun. Masa 9 tahun ini merupakan masa pelaksanaan atau implementasi UUK tersebut.

Kambing Hitam

Diskusi dimulai dari ironi yang diutarakan oleh Paniradya Pati Aris Eko Nugroho, SP., M.Si. Keistimewaan DIY setelah UUK disahkan terkadang bukan hanya disalahpahami tetapi juga dijadikan kambing hitam manakala ada atau terjadi sesuatu yang buruk atau negatif di Yogyakarta. Misalnya, ketika ada kasus-kasus “klitih”, orang menyindir “Iho, katanya Yoga Istimewa, kok ada kriminalitas seperti itu?”

Apalagi ketika masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan muncul. Orang dengan cepat menjadikan hal keistimewaan sebagai kambing hitam: “Katanya Yoga itu Istimewa, kok kemiskinan masih merebak?” Lebih repot lagi jika kemudian dikaitkan dengan Dana Keistimewaan.

Mengenai gejala itu. Aris mencoba mendudukan persoalan Keistimewaan DIY secara proporsional. Pertama, memang benar bahwa salah satu tujuan pengaturan Keistimewaan DIY sebagaimana diamanatkan UUK khususnya Pasal 5 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat DIY. Namun hal itu bukan satu-satunya tujuan. Ada lima tujuan pengaturan Keistimewaan DIY menurut UUK yaitu sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
 - b. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
 - e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Kedua, Keistimewaan DIY hanya mencakup 5 Kewenangan Istimewa yang merupakan ranag kewenangan dalam pelaksanaan Keistimewaan DIY. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 7 UUK sebagai berikut.

Pasal 7

- (1) Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- (2) Kewenangan dalam urusan keistimewaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Ketiga, Dana Keistimewaan (Danais) dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Keistimewaan DIY itu (Pasal 5) dengan berfokus untuk menggerakkan lima Kewenangan Istimewa itu (Pasal 7). Dengan demikian baik pengelolaan Keistimewaan DIY maupun pengelolaan Danais yang menyertainya terbatas oleh regulasi untuk hak-hal tersebut. Adapun untuk penanganan urusan-urusan pembangunan DIY yang masih banyak sektornya digunakan dana dari APBD.

Pengertian tentang Keistimewaan DIY dan Danais DIY seperti itu perlu dipahamkan kepada semua pihak dan masyarakat luas. Hal itu akan mengurangi timbulnya salah pengertian dan kecenderungan mencari kambing hitam. Meskipun demikian Paniradya Kaistimewaan tetap memikirkan bagaimana Keistimewaan DIY itu berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab itu juga merupakan salah satu tujuan Keistimewaan DIY (Pasal 5 UUK).

Kebudayaan sebagai Kembangnya Keistimewaan

Menurut Paniradya Pati Aris, pembangunan di bidang kebudayaan merupakan kembangnya Keistimewaan DIY. Bahkan kelima urusan Kewenangan Istimewa DIY itu semuanya berbasis pada kebudauaan. Kepemimpinan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berkaitan erat dengan kepemimpinan dalam kasultanan dan kadipaten yang merupakan pusat-pusat kebudayaan. Pembangunan di bidang kelembagaan pemerintahan juga berbasis budaya sehingga sekarang dalam hal nomenklatur misalnya, ditransformasi dengan bahasa Jawa seperti Dinas Kebudayaan yang diubah menjadi “Kundha Kabudayan”. Demikian juga pembangunan di budang tata ruang dan pertanahan, semua berbasis pada kebudayaan Yogyakarta.

Pandangan tentang kebudayaan sebagai kembangnya Keistimewaan DIY didukung oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY Tri Agus Nugroho, S.Sos., M.Sc. Menurutnya, Keistimewaan DIY yang diatur dalam UUK memberikan peluang baru untuk mengembangkan kebudayaan DIY. Adapun kebudayaan itu sendiri luas. Menurut Pasal 35 dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY, kebijakan pembangunan Kewenangan Kebudayaan itu diselenggarakan untuk

(1) melindungi, mengembangkan, (3) memanfaatkan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, karsa, dan karya. Adapun obyek pembangunannya adalah kebudayaan yang mengakar di DIY yang meliputi (1) nilai-nilai, (2) pengetahuan, (3) norma-norma, (4) adat istiadat, (5) benda budaya, (6) seni, (7) tradisi luhur.

Pandangan tentang kebudayaan sebagai kembangnya Keistimewaan DIY juga didukung oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Drs. Bakhtiar Nurhidayat. Sebelum UUK disahkan, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang pendidikan berbasis kebudayaan. Hal itu juga berkaitan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY periode 2005-2025 yang memadukan anyara penmdidikan dan kebudayaan. Visi RPJPD periode tersebut adalah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusan pendidikan, pusat kebudayaan, dan tujuan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara.

Ketika UUK yang terbit menjadikan kebudayaan sebagai kembangnya maka konsep pendidikan berbasis kebudayaan semakin diutamakan. Kebudayaan dalam hal ini adalah nilai-nilai (*value system*) ke-Yogya-an yang harus diajarkan kepada para anak didik sehingga muncul sumber daya manusia Yogya yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur.

Soal Danais

Konsekuensi dsari UUK adalah dikucurkannya Dana Keistimewaan (Danais). Dengan Danais itulah diharapkan Pemerintah Daerah DIY melalui Kewenangan-kewenangan Istimewanya (Pasal 7 UUK) bisa bergerak untuk mewujudkan tujuan-tujuan Keistimewaan DIY itu (Pasal 5 UUK).

Besaran Danais itu sendiri terus meningkat, menunjukkan kemampuan Pemda DIY dalam mengelolanya. Tahun 2013 adalah tahun pertama DIY mendapatkan Danais, waktu itu sebesar Rp. 231 miliar. Sekarang pada 2021 DIY menerima kucuran Danais sebesar Rp. 1,32 triliun.

Dengan Danais itu percepatan pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka Keisrtimewaan Yogya semakin signifikan. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) misalnya, bekembang cepat karena dukungan Danais.

Pada 2021, atas arahan dari Gubernur DIY Sultan HB X, Danais bisa dialokasikan langsung masuk ke kelurahan-kelurahan. Hal ini juga berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 yang mendorong Pemda DIY untuk bertindak taktis dalam pengelolaan Danais agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Paniradya Pati Aris Eko Nugroho, kelemahan birokrat adalah kurang mampu bertindak fleksibel dan dinamis karena terpaku para regulasi.

Dalam soal Danais untuk mendukung penanggulangan pandemi Covid-19 misalnya, Pemda DIY tidak bisa langsung menggunakan Danais begitu saja. Baru setelah ada peraturan menteri keuangan maka Pemda DIY bisa melakukan refokusing pengalokasian Danais.

Kolaborasi

Karena kecenderungan kekakuan karena urusan regulasi itu maka Pemerintah Daerah DIY khususnya Paniradya Kaistimewan membuka diri untuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 misalnya, Pemda DIY bekerjasama misalnya dengan KADIN DIY untuk menggelar pelaksanaan-pelaksanaan vaksinasi massal.

Mengenai kekakuan yang terkadang menyebabkan kelambaban, Paniradya Pati Aris menyatakan menerima semua kritik dan saran, Menurutnya, kritik itu seperti jamu yang menyehatkan. Semakin banyak dan bervariasi jamu yang diminum, diharapkan Pemda DIY semakin mendapatkan berbagai manfaat yang menyehatkan kinerjanya. Namun demikian Aris juga mengatakan bahwa yang penting juga ada masukan yang bersifat solutif.

Sebagai perencana pembangunan, Paniradya Kaistimewan membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak untuk melakukan pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan itu. Kolaborasi internal perlu dijalin antara Paniradya Kaistimewan dengan

lembaga-lembaga OPD sebagai para pelaksananya. Mulai 2020, Paniradya Kaistimewaan bekerjasama dengan berbagai OPD teknis, misalnya dalam menggerakkan kegiatan Padat Karya Yoga Istimewa.

Aris Eko Nugroho sekali lagi mengatakan bahwa Paniradya Kaistimewaan sebagai lembaga perencana pembanguna di bidang Keistimewaan sangat terbuka terhadap semua kritik dan saran. Masyarakat luas dapat menyampaikan masukan secara langsung dengan datang di kantor Paniradya Kaistimewaan atau melalui media yang telah disediakan. Aris juga menyanggupi apabila diundang oleh masyarakat untuk melakukan sosialisasi, berdialog, dan berdiskusi. Untuk itu Aris menyatakan bahwa bukan hanya dirinya sebagai Paniradya Pati, tetapi juga 4 Kepala Bidang dan 4 Kepala Seksi dalam Paniradya Kaistimewaan siap untuk berdialog dengan masyarakat.

“Jogja Kota Hanacaraka”

Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY Tri Agus Nugroho menjelaskan bahwa saat menginjak usia 9 tahun UUK, DIY melakukan langkah besar yang menasional dan mendunia. Langkah itu berupa tindakan membangun peradaban luhur Yogyakarta dan Jawa dengan memperkuat eksistensi aksara Jawa.

Dengan dukungan Danais DIY, Gerakan Jogja Kota Hanacaraka. Dinas Kebudayaan bersama para pendidik Bahasa Jawa dan berbagai elemen pecinta dan pendukung Bahasa Jawa berjuang untuk mendigitalisasi aksara Jawa. Gerakan yang mendorong seluruh masyarakat pengguna digital untuk memakai aksara Jawa ini telah didukung lebih dari 4.000-an partisipan.

Menjadikan aksara Jawa diakui dunia tidak mudah sebab hal itu membutuhkan adanya para penggunanya dalam jumlah besar yang signifikan. Aksara Jawa sekarang masih pada tahapan *limited use* karena belum digunakan sebagai teks dalam penggunaan sehari-hari, Aksara Jawa sudah banyak dipakai tetapi masih bersifat dekoratif seperti dalam gambar, poster, logo, dan belum dalam penggunaannya sebagai teks. Aksara Jawa masih harus diperjuangkan untuk mencapai tingkatan *recommended use* dimana aksara itu digunakan dalam bentuk teks untuk berbagai urusan dan keseharian.

Dinas Kebudayaan DIY sangat serius mengakselerasi Gerakan Jogja Kota Hanacaraka itu. Digitalisasi aksara Jawa sudah dilengkapi dengan ketersediaan tutorial pengaktifan *Javanese Font*. Untuk masyarakat juga disediakan blog di internet yang dapat digunakan dengan mudah untuk berkarya tulis dengan aksara Jawa. Digitalisasi aksara Jawa terus menerus disempurnakan hingga nantinya akan ada

konverter dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa dan kemudian ke aksara Jawa.

Menurut Agus, digitalisasi aksara Jawa bukan sekadar membangun keunggulan komparatif namun memacu semangat kompetitif. Artinya aksara Jawa bukan hanya menjadi ciri pembada Yogyakarta dibanding daerah atau masyarakat-masyarakat lain. Namun digitalisasi itu mendorong kompetisi kita untuk menggunakan aksara itu. Sebab, digitalisasi itu menyebabkan aksara Jawa dikenal dunia dan semua orang berpeluang untuk menggunakannya. Justeru karena itulah orang Jawa dan Yogyakarta harus waspada sebab bukan tidak mungkin orang asing lebih tekun mempelajarinya. Bukan hal baru jika kita menemukan fakta tentang adanya orang-orang Barat yang justeru lebih peduli dan mencintai budaya Jawa, bahasa Jawa, dan aksara Jawa.

Namun Agus juga menyatakan optimis akan gerakan pelestarian aksara Jawa itu. Sebagai contoh, Dinas Kebudayaan DIY pernah menerika surat resmi dari Pemerintah Desa Srimulyo yang keseluruhan suratnya itu menggunakan aksara Jawa. Hal itu menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin aksara Jawa dilestarikan penggunaannya.

Optimisme itu bertambah karena pelestarian aksara Jawa dapat berimplikasi ekonomi. Menurut Agus, eksotisme aksara Jawa yang unik dapat dimanfaatkan

untuk memajukan industri kreatif, misalnya penggunaannya untuk aksesoris kerajinan tangan, batik, fashion, dan sebagainya.

Adapun sebagai sebuah *cultural movement*, Gerakan Jogja Kota Hanacaraka perlu digemakan. Dinas Kebudayaan akan terus mempopulerkan sosialisasi penggunaan aksara Jawa dengan mengembangkan isu-isu perbincangan publik yang menarik seperti “aksara Jawa dalam kemasan produk”, “aksara Jawa dan peran seniman”, “aksara Jawa dan musik bernuansa Jawa”, dan sebagainya. Menurut Agus, yang penting bukan hanya digitalisasinya tetapi juga literasi aksara Jawa itu.

Tanggapan Generasi Milenial

Yang menarik, Rembag Kaistimewa kali ini menampilkan figur generasi milenial untuk ikut *urun rembug*. Pelajar SMAN 1 Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Resti Dian Puspita Sari yang hadir memberi testimoni tentang responnya terhadap pengembangan Bahasa Jawa dalam Keistimewaan DIY.

Resti adalah sosok milenial yang sangat antusias belajar berbahasa Jawa. Pada masa duduk di bangku Sekolah Dasar, Resti mulai “mengetahui” Bahasa Jawa. Menurutnya, menginjak masa studi di bangku SMP, mulai memasuki tahap “mencintai” Bahasa Jawa tersebut.

Menurut Resti, rasa cinta dan bangga berbahasa Jawa pada generasi milenial bisa ditumbuhkan dengan pendekatan pembelajaran yang relevan. Dalam pengalamannya, setiap kali Resti memakai media sosial – misalnya tayangan TikTok atau setidaknya men-share stiker WA bernuansa Jawa – banyak kawan yang merespon dan senang, Demikian juga setiap kali Resti mengunggah stori bernuansa Jawa di Instagram, banyak yang merespon positif,

Menanggapi fakta itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Drs. Bakhtiar Nurhidayat mendorong para guru untuk mengembangkan metode pembelajaran Bahasa Jawa yang berbasis teknologi digital. Para guru tidak cukup hanya mempersiapkan materi pembelajaran tetapi juga metode pembelajaran yang inovatif-kreatif yang relevan untuk generasi *native digital* masa kini

Diskusi Berlanjut

Di akhir acara *podcast* kali ini, muncul banyak pertanyaan dari para warganet. Dengan demikian diskusi tentang implementasi UUK masih perlu dilanjutkan. Dari diskusi ini setidaknya ada dua poin penting yang bisa dibahas lebih lanjut, (1) pentingnya evaluasi berkelanjutan, (2) peningkatan orientasi Keistimewaan DIY menuju dampak peradabannya yang mengglobal.

Pertama, evaluasi implementasi Keistimewaan DIY berdasar UUK adalah sebuah tuntutan untuk memajukan Keistimewaan DIY itu sendiri. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) sudah merupakan undang-undang yang rinci dan lengkap tentang Keistimewaan DIY. Apalagi ketika Perdais demi Perdais diterbitkan dan disahkan, UUK dan Perdais sudah secara gamblang memberikan tujuan, arah, dan sstrategi-strategi pembangunan Keistimewaan DIY.

Adapun implementasi UUK adalah berupa program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Keistimewaan DIY tersebut. Program-program pembangunan itu berkenaan dengan urusan-urusan yang menjadi Kewenangan Istimewa di dalam Keistimewaan DIY.

Dalam 5 (lima) tahun pertama pelaksanaan (implementasi) Keistimewaan DIY menurut UUK, sudah mulai kelihatan capaian-capaiannya. Namun juga masih banyak kekurangan dan tidak sedikit pula masalah dan kesulitan yang terjadi.

Yang justru menjadi poin positif adalah tindakan Pemerintah Daerah DIY yang cepat melakukan evaluasi berbasis riset akademis. Upaya itu dilaporkan dalam buku “Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan DIY Tahun 2013-2017”, diterbitkan oleh Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2018. Harapannya,

tradisi evaluasi berbasis riset akademis ini terus berlanjut di masa yang akan datang.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Keistimewaan DIY itu adalah

- 1) Memantau dan mengendalikan agar Arah Kebijakan Keistimewaan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam UU No 14 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Secara teknis proses evaluasi bertujuan memetakan rangkaian proses perencanaan, implementasi, monitoring atas efektivitas program-program keistimewaan yang telah dilaksanakan.
- 3) Mengetahui seberapa jauh dampak jangka pendek (*output*), jangka menengah (*outcome*) dan jangka panjang (*impact*) pada warga masyarakat.
- 4) Memetakan kesenjangan (*gap*) antara proses perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program-program keistimewaan.
- 5) Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas kesenjangan yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk usulan kegiatan yang lebih sesuai,

Kedua, Gerakan Jogja Kota Hanacaraka yang muncul dalam momen 9 tahun UUK itu merupakan

terobosan signifikan dalam implementasi Keistimewaan DIY. Gerakan ini memberi orientasi global dalam memajukan peradaban Keistimewaan DIY, sehingga Yogya Istimewa bukan hanya untuk Indonesia tetapi untuk dunia. Pada peringatan Sewindun UUK pada 2020 yang diadakan dengan pameran seni relief, patung dan lukis di Grhatama Pustaka, tema yang dimunculkan adalah Yogya Istimewa untuk Indonesia. Adapun pada momen 2021 ini, kita naik level dengan mulai melancarkan dampak global peradaban Yogyakarta melalui digitalisasi aksara Jawa dan gerakan-gerakannya itu.

Optimisme tentang pelestarian bahasa Jawa di tengah gerusan budaya global dan penetrasi kultur Barat semakin menguat. Meskipun prakteknya tak lancar, pemerintah-pemerintah daerah di Jateng dan DIY sudah bertekad untuk mewajibkan berbahasa Jawa di lingkungan kerja mereka. Sekarang, Bahasa Jawa malahan semakin mendunia lewat berkembangnya situs ensiklopedi bebas di internet (Wikipedia) yang khusus berbahasa Jawa.

Sikap beberapa pemerintah daerah sejatinya telah menunjukkan *political will* yang positif. Pemkot Yogya misalnya, melalui Instruksi Walikota No 1 Tahun 2009 telah menetapkan hari Sabtu sebagai hari berbahasa Jawa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Instruksi itu sendiri mengacu pada Instruksi Gubernur DIY No1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa

Jawa pada hari tertentu di lingkungan Provinsi DIY yang telah lebih dahulu diberlakukan.

Kebijakan serupa juga dilancarkan oleh Pemkot Surakarta. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bakal mewajibkan setiap warganya menggunakan bahasa Jawa sehari dalam satu pekan. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang sudah disahkan DPRD Jawa Tengah. Namun implementasi kewajiban sehari berbahasa Jawa itu baru akan dilaksanakan pada 2013 nanti.

Kabar baik juga datang dari dunia maya. Sejak 8 Maret 2004 silam, ensiklopedi elektronik berbasis internet bernama Wikipedia telah memiliki versi barunya yang berbahasa Jawa, dikenal sebagai "Wikipedia Basa Jawa". Seperti Wikipedia edisi bahasa lainnya, Wikipedia berbahasa Jawa menggunakan perangkat lunak media Wiki dengan fitur yang pada dasarnya serupa. Dari ensiklopedia maya ini kita dapat mencari banyak informasi dengan kategori-kategori utama: Budaya, Ilmu, Filsafat, Geografi, Jawa, Sejarah, Sosiologi, Seni, Tokoh, dan Wayang.

Perkembangan "Wikipedia Basa Jawa" ini cukup pesat. Pada September 2011 tercatat memiliki pengguna terdaftar sebanyak 10.659 orang. Jumlah kontributor pun berkembang dari hanya dua orang menjadi 44 orang, sehingga artikel-artikelnya semakin

banyak. Namun, meski sudah memiliki 37.877 artikel, jumlah itu baru menempati urutan ke-66 dari total 285 edisi bahasa Wikipedia di dunia, masih di bawah bahasa lokal Ceko dan bahasa lokal di India.

Semangat untuk menggenjot pertumbuhan ensiklopedi elektronik ini terus digalang. Telah diluncurkan kompetisi "Papat Limpat 2012", yaitu lomba menulis artikel di ensiklopedi "Wikipedia Basa Jawa". Kompetisi yang berlangsung 7 Mei 2012 hingga April 2013 ini diikuti oleh 150 mahasiswa dari 7 Perguruan Tinggi: IKIP PGRI Semarang, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Yogyakarta.

Namun harus diingat bahwa bahasa senantiasa menunjukkan bangsa. Bahasa Jawa, misalnya, menunjukkan bagaimana budaya menghormati orang lain, contohnya dengan memakai *basa ngoko* untuk membicarakan diri sendiri dan memakai *basa krama* untuk membicarakan lawan bicara atau orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Jawa dibangun di atas filosofi yang mendalam. Artinya, pelestarian Bahasa Jawa jangan sekedar usaha melestarikan pengetahuan dan praktek berbahasanya, tetapi juga merevitalisasi filosofi, budaya, karakter, dan kepribadian kejawaannya.

Ungkapan "orang Jawa kehilangan Jawanya" (*wong Jowo ilang Jawane*) menunjuk pada dekadensi budi luhur kejawaannya. Mungkin kita masih bisa dan bahkan fasih berbahasa Jawa, namun apakah benar-benar menghayati budaya Jawa, itu persoalan lain. Karena itu, pelestarian Bahasa Jawa harus dibarengi dengan pembangkitan kembali kearifan-kearifan lokal dalam budaya Jawa itu sendiri.

Upaya pelestarian bahasa tanpa upaya revitalisasi filosofi tidak akan kuat. Sebagai contoh, sejak 1979, bulan Oktober di Singapura diperingati sebagai "Bulan Mandarin". Kampanye mengaktifkan kembali Bahasa Mandarin itu dibarengi dengan penguatan kultural untuk melawan kekuatan westernisasi. Perdana Menteri Lee Kwan Yew pernah menegaskan bahwa akan terjadi bencana jika Singapura dikuasai budaya Barat. Dengan kekuatan bahasa dan filosofi Timur itulah Singapura bangkit!

Bab 4.

Penyediaan Akses Internet bagi Warga DIY

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 14 Oktober 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Nara sumber :

- Nur Ikhwan Rahmanto, S.Ant., M.URP (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY)
- Ir. Rony Primanto Hari, M.T, (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY)
- Sukohadi (Pengelola Kebun Teh Ki Suko Dusun Nglinggo Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo DIY)

Moderator : Ninda Fillasputri

Keistimewaan DIY yang diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah mendorong digitalisasi pembangunan di berbagai sektor. Pada 2018 Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelesaikan masterplan Jogja Smart Province (JSP) yang kemudian dijadikan Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang “Rencana Aksi Jogja Smart Province 2019-2023”.

Dalam rangka percepatan, Pemda DIY menggalakkan pembangunan infrastruktur digital di DIY, Salah satunya adalah penyediaan akses internet bagi warga DIY untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Jogja Smart Province (JSP)

Rony Primanto selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi DIY membuka diskusi dengan memaparkan program pembangunan bertajuk Jogja Smart Province (JSP). Pada dasarnya JSP adalah kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis dan pengembangan potensi-potensi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kolaborasi digital menjadi sangat penting sebab setiap OPD rata-rata sudah mempunyai kegiatan dan infrastruktur digital sendiri-sendiri meskipun ada yang masih minimalis. Setiap kabupaten dan kota yang ada di DIY juga sudah mengembangkan sistem *smart city* yang semakin hari semakin canggih. Karena itu JSP hadir bukan menjadi pesaing dan tidak dalam rangka menghegemoni atau mendominasi, JSP hadir untuk mensinergikan dan menghilabirasikan semua sistem gital yang sudah ada supaya dapat bekerja lebih efisien dan efektif.

Dalam rangka penguatan kolaborasi itu, JSP mengerjakan empat hal yaitu (1) menyediakan akses dan infrastruktur digital untuk masyarakat dan para

petugas pelayanan publik, (2) membuat peta jalan (*road map*) pengembangan teknologi digital di DIY, (3) melakukan intergrasi berbagai pelayanan publik supaya kinerja dan kerjasama menjadi efisien dan efektif, (4) menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Danais untuk WiFi Publik

Dalam implementasi Keistimewaan DIY sejak terbitnya UUK, pembangunan digital mendapat perhatian penting. Dana Keistimewaan (Danais) pun dikucurkan sebagian untuk mendukung program penyediaan akses dan infrastruktur digital untuk masyarakat dan para petugas pelayanan publik yang salah satunya adalah penyediaan WiFi gratis untuk masyarakat. Lokasi-lokasi yang diberi pancaran WiFi gratis antara lain adalah:

- Tempat-tempat dilakukannya kegiatan pelayanan publik seperti di kantor-kantor Pemerintah. Dengan demikian kinerja para pelayan publik dipercepat dan masyarakat terbantu akses informasinya, Menurut Rony sudah ada 438 kantor desa yang diberi fasilitas WiFi gratis oleh Dinas Kominfo DIY.
- Tempat-tempat wisata publik yang menjadi sasaran kunjungan masif. Disamping memberikan layanan kepada masyarakat, fasilitas WiFi ini akan meningkatkan kualitas destinasi wisata.

- Tempat-tempat yang menjadi pusat-pusat kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar dapat mendukung pengembangan usaha. Menurut Rony, sampai Oktober 2021 sudah ada di 71 titik.
- Tempat-tempat yang merupakan ruang-ruang publik (*public spaces*) yang banyak dikunjungi, dijadikan tempat kegiatan sosial dan tempat belajar masyarakat. Ini bukan hanya di perkotaan tetapi juga di daerah yang minus. Sejauh ini sudah tersedia di 51 lokasi.
- Tempat-tempat pendidikan formal khususnya SMA dan SMK, sejauh ini sudah ada di 118 titik.

Pelayanan WiFi gratis ini dirancang mudah diakses oleh masyarakat, Untuk mendapatkannya, tinggal *log in* saja tanpa *password*. Rony Primanto menambahkan bahwa kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu hingga Alun-alun Selatan sudah sepenuhnya didukung oleh layanan WiFi gratis ini.

Keistimewaan dan Kemajuan Jaman

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY Nur Ikhwan Rahmanto, S.Ant., M.URP mengatakan bahwa pembanugunan Keistimewaan DIY harus mengikuti perkembangan jaman, Nur mengutip pendapat Alfin Tofler yang mengatakan bahwa masyarakat berkembang dari era pertanian, era industri, dan

sekarang era informasi. Menurutnya Indonesia masa kini telah memasuki era informasi sehingga pembangunan infrastruktur informasi harus diperkuat.

Mengenai pembangunan infrastruktur itu, Rony Primanto melaporkan bahwa pada tahun 2020 telah berhasil dibangun jaringan Fiber Optik sepanjang 460 km yang terentang mulai dari ujung timur Gunungkidul sampai ujung barat Kulon Progo, serta dari ujung utara Sleman sampai ujung selatan Bantul. Pembangunannya lancar berkat Dana Keistimewaan (Danais) DIY.

Menurut Rony Primanto, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur digital ini. Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah setidaknya berupa inisiatif untuk mengajukan proposal permohonan pembangunan infrastruktur itu. Proposal dapat diajukan kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi DIY dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kominfo di kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika proposal itu dinilai layak dan memenuhi syarat maka pembangunan pun segera dilaksanakan.

Literasi Digital

Baik Nur Ikhwan maupun Rony Primanto kemudian menehaskan bahwa yang tak kalah penting selain pembangunan infrastruktur digital adalah literasi digital. Masyarakat harus diedukasi supaya dapat

menggunakan teknologi digital itu untuk memajukan peri kehidupannya.

Rony menjelaskan bagaimana Dinas Kominfo DIY telah mengembangkan sistem pelatihan digital secara komprehensif yang mencakup beberapa program utama yaitu sebagai berikut:

- Program Bijak Bermedia Sosial. Pada masa kepemimpinan Menkoninfo RI Rudiantara, hal itu terhubung juga dengan Gerakan Nasional Literasi Digital “Siberkreasi” yang kala itu digalakkan untuk meredam berbagai bentuk penyalahgunaan medsos seperti hoaks, *cyber bullying*, dan *cyber radicalism*,
- Program Pelatihan TIK. Ini merupakan pengenalan dan pelatihan penggunaan digital secara umum untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat.
- Program “Kebun Inovasi”. Ini adalah pelatihan dan pendampingan yang bersifat tahap lanjut bagi kelompok-kelompok aktivis digital yang berminat mengembangkan *start-up* secara serius. Program ini bukan hanya menjaring anak-anak muda dengan memberi pelatihan agar memulai usaha *start-up digital*, namun juga sampai membantu menawarkan usaha mereka kepada investor, serta membukakan jaringan yang lebih luas.
- Program UMKM yaitu pelatihan penggunaan teknologi digital untuk memajukan UMKM (Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah). Pelatihan itu cukup komprehensif mulai dari bagaimana cara membuat foto produk yang menarik, membuat konten iklan digital, hingga strategi berjualan di *marketplace* digital.

- Program *Smart Village* yaitu memajukan kompetensi digital pamong dan masyarakat di pedesaan, Pembangunan digital mulai dari desa ini sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk “membangun dari pinggiran”. Dalam konteks DIY ini dilkaitkan langsung dengan pembangunan desa wisata, desa budaya, desa mandiri budaya, dan sebagainya.

Dalam rangka memajukan literasi digital itu, Dinas Kominfo juga membangun fasilitas berupa beberapa *co-working space*. Tempat berkarya berikut peralatan digital untuk berkarya yang disediakan dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma. Bahkan juga disediakan komputer dengan perangkat keyboard huruf braile yang dapat dimanfaatkan oleh kaum difabel. Menurut Rony, kaum difabel telah banyak memanfaatkan bahkan ada yang telah berhasil menciptakan aplikasi sigital.

Fasilitas *co-working space* semakin lama semakin dilengkapi dengan peralatan-peralatan digital yang “produktif”. Dalam fasilitas ini masyarakat bisa memanfaatkan bukan hanya televisi digital namun juga

kamera, alat editing digital, dan sebagainya untuk berkarya konten digital secara kreatif. Dengan demikian *co-working space* menjadi semacam “rumah produksi” yang jika dimanfaatkan maiskmal maka benar-benar akan produktif,

Mengenai *co-working space* ini, Nur Ikhwan mendorong masyarakat untuk menggunakannya. Pemerintah Daerah dengan Dana Keistimewaan (Danais) berniat untuk mengembangkan pusat-pusat produksi digital ini. Hanya yang penting menurut Ikhwan adalah keseriusan kelompok masyarakat yang mengajukan proposal pembangunan *co-working space*. Jangan sampai sudah dibangun tetapi kemudian tidak dipakai secara berkelanjutan.

Menurut catatan Rony, di lapangan ternyata edukasi dgital yang diperlukan itu bukan hanya menyangkut edukasi tentang gitialisasinya tetapi juga edukasi tentang pembangunan yang bersifat mendasar. Sebab faktanya, masih ada-ada saja warga masyarakat yang, misalnya, memotong kabel-kabel jaringan internet karena tidak senang dan berprasangka buruk terhadap pembangunan jaringan itu. Karena itu pemerintah akan selalu bekerjasama dengan masyarakat setempat dan diharapkan ada warga yang bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun.

Padahal, pembangunan infrastruktur digital itu sendiri sering tidak mudah. Daerah-daerah yang

terpencil yang tidak komersial dan sulit dijangkau adalah daerah sasaran pembangunan. Hal itu supaya pembangunan infrastruktur benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,

Nur Ikhwan kembali menyoroti pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pembangunan digital akan semakin cepat manakala masyarakat aktif secara swadaya sehingga Dinas Kominfo bekerja lebih efisien dan efektif. Dinas Kominfo tinggal perlu melatih para pelatih dan pembina, sehingga mereka bisa bergerak mandiri untuk menularkan ilmunya kepada lebih banyak orang.

Transformasi Digital Desa Kebun Teh

Dalam acara *podcast* kali ini juga hadir Sukohadi, Pengelola Kebun Teh Ki Suko Dusun Nglinggo Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo DIY. Sukohadi memberikan testimoni tentang transformasi ekonomi desa kebun teh yang dibinanya setelah mendapat bantuan WiFi publik gratis dari Dinas Kominfo DIY yang didukung oleh Danais DIY.

Sebelum terdukung oleh fasilitas WiFi, proses bisnis teh berjalan lambat karena sulitnya informasi dan komunikasi. Daerah yang sering disebut “Gelangprojo” (perbatasan Magelang, Kulon Progo, Purworejo) ini dulu sulit sinyal. Mengirim atau menerima pesan WA saja memakan waktu semalam baru terbaca.

Dulu sebelum ada fasilitas WiFi ber-Danais, proses jual beli teh sangat lamban. Misalnya jika *buyer* yang order (memesan) teh pada haru Sabtu maka Sukohadi dan tim harus mengambil teh-teh di petani dengan jalan turun-naik bukit sejauh 7-8 km. Baru pada hari Minggunya, teh siap untuk diterima oleh *buyer*. Artinya, transaksi itu memakan waktu karena jarak.

Setelah ada fasilitas jaringan internet, proses transaksi dan produksi seperti itu berjalan lancar. Begitu ada order dari *buyer*, Sukohadi langsung kontak ke produsen teh melalui pesan WA. Para petani pun bergegas menyiapkan dan mengemas teh-tehnya. Pada hari itu pula produk teh langsung sampai kepada *buyer*.

Kecepatan proses itu juga mengindarkan banyak kerugian. Dulu, ketika proses sangat lamban, *buyer* terkadang membatalkan pembelian. Bahkan pernah suatu kali teh sudah dikirim tetapi *buyer* tidak membayar. Sekarang, karena prosesnya cepat, Sukohadi baru akan mengirim teh jika *buyer* sudah transfer biaya pembeliannya. Proses pengiriman uang mudah dan pendeteksiannya juga bisa seketika itu karena proses tranfer dilakukan secara digital (*e-banking*).

Dukungan fasilitas internet juga sangat membantu proses branding dan marketing. Dulu, pengenalan produk dilakukan dari mulut ke mulut. Sekarang promosi dan penjualan dilakukan melalui proses-proses

online. Hal ini mendorong usaha para pengusaha gurem. Ada petani yang asetnya naik 100 persen berkat fasilitas digital ini.

Sarana WiFi dan internet juga sangat mendukung pengembangan “wisata agroeduwisata” Kebun Teh Ki Suko Dusun Nglinggo Pagerharjo, Samigaluh. Sukohadi menjelaskan bahwa di Kebun Teh Kisuko para wisatawan bukan hanya bisa menikmati pemandangan yang indah namun juga belajar banyak tentang dunia teh. Di sini telah dikembangkan paket-paket wisata teh yang lengkapnya mencakup 11 hari. Salah satunya adalah edukasi tentang produksi teh hijau (*green tea*) premium. Di sini dijelaskan dan dipraktikkan, misalnya bagaimana teh hijau diseduh dalam air panas bersuhu 80 derajat Celcius sebanyak 150 ml yang memiliki kualitas unggul seperti cairan iinfus yang jika dikonsumsi mampu menurunkan hipertensi (tekanan darah tinggi) dan mengatasi banyak penyakit lainnya.

Melalui internet, branding dan promosi online Kebun Teh Ki Suko berdampak besar. Bahkan ketika konten promosi itu diikuti lomba di tingkat nasional, berhasil meraih juara pertama. Ketika pandemi Covid-19 membuat banyak bisnis lesu, bisnis Kebun Teh Kisuko tetap lancar berkat promosi dan transaksi secara online.

Sukohadi menambahkan sharing-nya tentang perkembangan agroeduwisata Kebun Teh Ki Suko.

Sejauh ini destinasi wisata alam ini telah menarik minat dan kehadiran para wistawan mancanegara. Pernah ada rombongan wisatawan dari Jepang yang *stay* sampai 11 hari. Kehadiran mereka tentu saja menjadi berkah bagi setiap pengusaha di kawasan Kebun Teh Ki Suko, mulai dari pengusaha *home stay* hingga kuliner. Para wisatawan belajar dari bagaimana memetik daun teh dengan baik, memilih daun teh yang baik, mengemas produk, sampai bedah nurtisi. Tim Kebun Teh Ki Suko pun menyampaikan semua informasi itu secara akademis berbasis riset. Karena itu pula Kebun Teh Ki Suko banyak diminati para wisatawan asing yang berlatar belakang akademisi dan peneliti, misalnya pernah datang dari Jerman dan Kanada. Melalui penyebaran informasi secara digital, Kebun Teh Ki Suko telah dikenal dunia. Bahkan di dunia media informasi pariwisata di Jerman, informasi agroeduwisata Kebun Teh Ki Suko menjadi yang terbesar pengaruhnya.

Sukohadi menambahkan bahwa bantuan sarana WiFi dan internet dari Dana Keistimewaan (Danais) DIY ini juga mendukung proses belajar mengajar masyarakat. Anak-anak sekolah sangat terbantu sehingga bisa belajar online secara lancar.

Sebagai catatan, Sukohadi dan para pemimpin komunitas memutuskan agar sarana WiFi ini dipusatkan di satu lokasi saja dan berdampak pada radius 30 meter. Permusatan itu menyebabkan

aktivitas masyarakat bisa terpusat juga. Interaksi sosial terbangun, bukan hanya interaksi digital. Kecuali itu penggunaan internet juga bisa diawasi sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan seperti halnya pornografi di kalangan generasi muda.

Diskusi Berlanjut

Rembuan *podvst* tentang pembangunan digital ini direspon banyak warganet. Banyak pertanyaan masuk sehingga perlu dikembangkan diskusi-diskusi selanjutnya. Digitalisasi di DIY perlu dicermati secara lebih khusus agar digitalisasi tak berujung pada sekedar pragmatisme kehidupan. Di sisi lain, pemberian fasilitas teknologi cerdas bagi masyarakat tidak serta merta memakukan kecerdasan masyarakat itu sendiri.

Salah seorang Tenaga Ahli Masterplan Jogja Smart Province (JSP) yang direkrut Dinas Kominfo DIY pada 2018, mengkritisi pembangunan digitalisasi di Yogya dan Indonesia agar berimplikasi pada pencerdasan masyarakat, bukan sekedar pembangunan teknologi cerdas itu sendiri. Berikut adalah cuplikan pemikirannya yang telah dimuat di Rubrik Opini *KOMPAS*, 25 Januari 2019 dengan judul “Kota Cerdas Vs Manusia Cerdas.

Penekanan pada aspek manusia itu terlihat dari indikator penilaian dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018 yang diajukan Kompas mengacu pada model lingkaran kota cerdas menurut pegiat kota

cerdas internasional Boyd Cohen. Dimensi masyarakat cerdas (*smart people*) diberi bobot paling tinggi (29 persen). Persentase dimensi lainnya adalah 20 persen untuk kualitas hidup (*smart living*), 16 persen untuk lingkungan (*smart environment*), 12 persen untuk pemerintahan (*smart government*), 12 persen untuk ekonomi (*smart economy*), dan 11 persen untuk mobilitas (*smart mobility*).

Penekanan pada aspek manusia sangat penting oleh sebab kecerdasan sebuah kota terletak pada kecerdasan masyarakat atau penduduknya. Penggunaan teknologi informasi super cerdas tidak otomatis menjadikan para penggunanya juga cerdas. Manusia adalah subyek dan bukan obyek dari setiap dimensi kota cerdas itu.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Indra Yasmine juga menekankan bahwa roh kota cerdas bukan pada seberapa gampang dan masifnya koneksi internet, penerapan berbagai aplikasi, dan aneka platform berbasis digital (*Kompas*, 14/1/2019). Kota cerdas adalah kota yang berhasil membangun kebersamaan komunitas secara cerdas.

Rumusan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Artinya, sejak awal bangsa Indonesia sebagai entitas manusia setanah air itu diposisikan

sebagai subyek. Pembangunan, termasuk pembangunan berbasis teknologi digital, adalah dalam rangka memajukan bangsa.

Jika konsisten dengan tujuan mencerdaskan bangsa, entitas-entitas bangsa yang lebih kecil, seperti kota, perlu dibangun sebagai komunitas manusia (masyarakat perkotaan) yang cerdas. Manusia cerdas dibedakan dengan teknologi cerdas, dalam hal manusia adalah pencipta dan pengguna (subyek) teknologi dan bukan sebaliknya.

Adapun konsep kota cerdas (*smart city*) yang sekarang mengglobal cenderung dimaknai sebagai penekanan pada maksimalisasi dan intensifikasi penggunaan teknologi informasi untuk memecahkan masalah-masalah di perkotaan. Itulah sebabnya, pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) berlomba-lomba membangun digitalisasi demi meraih predikat cerdas itu.

Karut marut di media sosial – mulai dari hoaks, ujaran kebencian, *cyber bullying*, *cyber radicalism* – semestinya membuat kita bertanya kembali tentang makna cerdas itu sendiri. Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai telah terjadi perubahan yang bersifat degeneratif dalam media digital (*Kompas*, 15/4/2017). Media sosial (medsos) yang dulu jadi media perekat sosial kini cenderung menjadi alat eksklusif sosial yang hegemonik dalam dunia maya dan dunia nyata.

Gerakan radikal dan anarkis dikembangkan dari isu-isu artifisial yang direkayasa di dunia maya. Media sosial direkayasa menjadi alat penyugesti gerakan-gerakan radikal, karena itu harus dibedakan antara *smart city* dan *smart citizen* – warga (negara) cerdas.

Konsep baru kota cerdas jangan mengabaikan sekian banyak teori dan konsep kecerdasan manusia yang telah kita pelajari sekian lama. Ambil contoh yang paling simpel. Kalau telepon pintas hanya membuat kita jadi sibuk sendiri dengan gawai tersebut (*phubbing*), bukankah kita telah kehilangan kecerdasan sosial (*social intelligence*)? Kalau medsos dipakai untuk menyebarkan pornografi dan radikalisme SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), bukankah kita telah kehilangan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual? Kalau medsos membuat kita berperilaku narsis dan tanpa berpikir panjang menyebarkan kabar bohong, bukankah kita telah kehilangan kecerdasan intrapersonal (*intrapersonal intelligence*)? Jika kota cerdas berorientasi pada semata-mata kemudahan dan kenyamanan masyarakat berbasis digital, bukankah itu sekadar menciptakan manusia-manusia pragmatis?

Keprihatinan akan degenerasi dalam media digital itu telah meresahkan kaum budayawan di Yogyakarta (DIY). Apalago Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY 2017-2022 mengangkat visi “memuliakan martabat manusia Jogja”. Seruan kaum

budayawan tentang pengutamaan tentang pembangunan manusia berbudaya telah mendorong tim ahli dan tim perumus rencana induk Jogja Smart Province (JSP) memofivikasi model lingkaran kota cerdas dengan menaruh sistem nilai filosofi budaya (kearifan lokal) di pusat lingkaran itu.

Bagan lingkaran provinsi cerdas dalam rencana induk JSP yang diresmikan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pada Agustus 2018 itu menjadikan tiga nilai filosofi Yogyakarta pada bagian sentral. Pertama, filosofi *hamemayu hayuning bawana* yang bermakna kultural bagi setiap insan untuk memperindah kehidupan dunia. Kedua, filosofi *sangkan paraning dumadi* yang bermakna keutamaan membangun sumber daya manusia yang berkepribadian, berkarakter, intelek, dan spiritual (multikompetensi holistik). Ketiga, filosofi *manunggaling kawula lan gusti* yaitu keutamaan kesatuan pemimpin dan rakyat dalam demokrasi gotong-royong dan kepemimpinan “tahta untuk rakyat”.

Bagan atau model lingkaran provinsi cerdas ala Yogyakarta inilah yang dipromosikan sebagai pembangunan kawasan (kota, kabupaten, provinsi) cerdas berbasis budaya. Pembangunan manusia bermartabat menjadi fokus dan sentralnya. Kemajuan multikecerdasan manusia menjadi tujuan utama digitalisasi.

Kecuali itu, rencana induk JSP juga unik dalam pengembangan dimensi-dimensinya. Disamping punya dimensi-dimensi yang sudah umum seperti *smart government*, *smart living*, *smart society* dan *smart environment*, JSP punya tambahan satu dimensi lagi yaitu *smart culture* (budaya cerdas). Dimensi itu mencakup solusi-solusi indikatif digital untuk memajukan kualitas hidup sumber daya manusia Yogyakarta yang bermartabat, berkearifan lokal, ber Bhinneka Tunggal Ika, ber Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam UU Keistimewaan DIY (UU Nomor 13 Tahun 2012).

Dimensi budaya cerdas rupanya memberi ruang aksi dan aktualisasi bagi masyarakat Yogyakarta. Pada 11 Januari 2019, segenap elemen masyarakat meluncurkan ensiklopedia digital jogjapedia, difasilitasi Dinas Kominfo DIY. Ensiklopedia digital itu merupakan upaya membangun wacana kohesi sosial dan edukasi kolektif. Sistem informasi digital ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, kelompok kepentingan, lembaga lintas disiplin ilmu dan lintas budaya untuk saling berbagi informasi dan ilmu.

Dalam konteks revolusi pendidikan 4.0, ensiklopedia digital yang bersifat *open content* ini memungkinkan masyarakat luas sebagai jejaring pembelajar menjadi kreator materi pembelajaran (*learners as content producer and sharer*). Dengan demikian semua

pembelajar cepat bertumbuh tidak hanya dalam belajar tetapi juga dalam mengajar (*learner as teacher*).

Manusia cerdas di dalam kota cerdas bukan sekedar penikmat kemudahan dan kenyamanan hidup berbasis digital. Manusia disebut cerdas jika mampu menciptakan, mengendalikan, serta menggunakan teknologi digital untuk sebesar-besar kemajuan multikecerdasan dirinya. Dengan demikian kemajuan multikecerdasan warga (*smart citizen*) menjadi parameter keberhasilan pembangunan kota cerdas.

Bab 5.

Grand Design Keistimewaan: Strategi Perencanaan

Kebijakan menuju Kesejahteraan

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 30 September 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Nara sumber :

- Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec (Tenaga Ahli *Grand Design* Keistimewaan DIY)
- Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)
- GKR Mangkubumi (Parampara Praja DIY)

Moderator : Firman Putra, S.Sn.

Pada tahun 2020 dan 2021, Paniradya Kaistimewan bersama berbagai pihak terkait tengah berfokus untuk menyusun Rencana Induk atau *Grand Design* Keistimewaan DIY periode 2022-2042/.

Pemahaman tentang Grand Design

Tenaga Ahli *Grand Design* Keistimewaan DIY Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Grand Design* Daerah Istimewa

Yogyakarta Periode 2022-2042 adalah rencana induk atau *masterplan* pembangunan jangka panjang. Dengan demikian *Grand Design* ini menggambarkan kondisi ideal Keistimewaan DIY pada 20 tahun yang akan datang. Ancangannya harus jelas.

Grand Design DIY dapat diperbandingkan dengan misalnya *masterplan* pengembangan sebuah lembaga kampus. Dalam *masterplan* kampus itu, harus digambarkan secara konseptual tentang kondisi yang diharapkan terjadi pada 20 tahun ke depan. Misalnya pada 20 tahun kemudian kampus itu sudah punya gedung sendiri, ada sekian ribu lulusan, akreditasi terbaik, jaringan luar negeri, jumlah guru besar memadai, dan seterusnya. Dengan adanya tujuan yang terukur itu maka kita menyusun rencana-rencana untuk mewujudkan tujuan itu. Rencana-rencana itu diperiodisasi per lima tahun yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Keselarasan dan Arah dari Pusat

Prof Edy menekankan bahwa penyusunan *Grand Design* Keistimewaan DIY ini harus selaras dengan perencanaan-perencanaan pembangunan tentang DIY, *Grand Design* ini harus selaras betul dengan rencana pembangunan nasional dan juga rencana pembangunan DIY di luar lima urusan Keistimewaan DIY itu.

Tentang pentingnya keselarasan itu, Paniradya Pati Aris Eko Nuhgroho mengingatkan bahwa selama ini Pemda DIY telah mempunyai beberapa dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, buku biru, Perda, Perdais, dan sebagainya. Dengan demikian *Grand Design* Keistimewaan DIY 2022-2042 itu merupakan sistem atau sekumpulan design-design tentang Keistimewaan DIY masa depan. *Grand Design* ini menjadi dokumen bersama dalam memberi arah dan haluan kebijakan pembangunan DIY masa depan.

Untuk meningkatkan keselarasan itu Pemda DIY juga menerima arahan dan masukan dari Pemerintah Pusat. Menurut Aris, Pemerintah Pusat sangat menekankan pentingnya tujuan-tujuan Keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUK DIY, itu yang harus menjadi sasaran *Grand Design* DIY 2022-2042.

Keistimewaan DIY Tak Sekadar Urusan Danais

Parampara Praja GKR Mangkubumi mewanti-wanti supaya masalah Keistimewaan DIY itu jangan hanya dibaca sebagai persoalan Dana Keistimewaan (Danais), Begitu juga dalam penyusunan *Grand Design* DIY 2022-2042 ini, kita harus visioner dan idealis.

Menurut GKR Mangkubumi, *Grand Design* DIY 2022-2042 ini adalah tonggak atau pilar untuk membangun Keistimewaan DIY secara berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat mengidentikkan Keistimewaan DIY itu hanya sekedar Danais. Keistimewaan DIY lebih luas

dari hanya urusan dana. Secara teknis pun Danais bukan “bensin” bagi pembangunan DIY yang besar ini. Jika pembangunan DIY merupakan mobil, Danais itu ibarat “oli” nya saja, yang secara volume kecil tetapi jika digunakan secara tepat maka berdampak pada percepatan.

Paniradya Pati Aris Eko Nugroho juga mengingatkan bahwa besaran Danais itu hanya 23 persen dibanding keseluruhan APBD. Jadi secara teknis tidak mungkin hanya dengan Danais maka semua pekerjaan di DIY ditangani. Danais harus dialokasikan sesuai peruntukannya menurut regulasi yang sudah digariskan.

GKR Mangkubumi mengatakan bahwa jangan mengukut Keistimewaan DIY dari Danais semata. Dulu sebelum diterbitkan UUK 2012, banyak sekali kegiatan kebudayaan yang mencerminkan Keistimewaan DIY dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya seperti kegiatan “Merti Desa”. Sekarang, jangan sampai kita malah tidak melakukan apa-apa jika tidak ada Danais yang dikucurkan.

Karena itu menurut GKR Mangkubumi, sambil menyusun perencanaan ini dan itu, kita harus terus mempelajari dan mendalami Keistimewaan DIY. Di lingkup Parampar Praja sendiri secara rutin ada kegiatan “Sinau Bareng UUK” di mana kita mencermati dan mendalami substansi-substansi Keistimewaan DIY bukan sekedar sebatas kulitnya saja.

Prof Edy Suandi Hamid menambahkan supaya kegiatan belajar tentang Keistimewaan DIY itu terus diperluas dan diintensifkan. Bukan hanya Parampara Praja tetapi juga semua ASN harus belajar. Masyarakat dan generasi muda juga harus mendalaminya. Kampus-kampus harus bergerak untuk memberikan pendidikan formal tentang Keistimewaan DIY seperti sudah dilakukan di Universitas Widya Mataram. Pemahaman yang tepat dan mendalam mengurangi banyak kesalahpahaman akibat kedangkalan pengetahuan.

Pengarusutamaan Kebudayaan

Paniradya Pati Aris Eko Nugroho mengatakan bahwa pembangunan kebudayaan merupakan “kembangnya” Keistimewaan DIY. Ke depan kebudayaan dikembangkan bukan hanya untuk memajukan peradaban DIY namun juga mensejahterakan masyarakat yang merupakan tujuan Keistimewaan DIY itu.

GKR Mangkubumi mengingatkan pentingnya penguatan kebudayaan DIY yang berakar pada sejarah. Kita masih harus memperjuangkan supaya DIY untuk menjadi “heritage city” yang diakui dunia. Untuk itu sinergi antara pemerintah daerah dengan kasultanan dan kadipaten harus diperkuat.

Karena Yogyakarta sebagai heritage city berbasis sejarah maka perkembangan budaya sejak Eyang Sultan Hamengku Buwono I harus kita pelajari kembali.

Tata kota Yogyakarta dengan basis Sumbu Filosofi perlu diperdalam dan dibangun dengan cermat dan mendetail.

Menurut GKR Mangkubumi, pengutamaan pembangunan kebudayaan akan berdampak pada pemajuan ekonomi, bukan sebaliknya. Sebab, kalau kita hanya memulai dari pembangunan yang berorientasi ekonomi semata, kebudayaan bisa terpinggirkan, terabaikan, dan tergadaikan. Kalau misalnya kita hanya membangun pariwisata supaya mendapat keuntungan besar, kita bisa malah mengabaikan atau malah menjual (komodifikasi) kebudayaan. Tetapi jika kita membangun kebudayaan secara sangat serius, pasti akan berdampak ekonomi karena Yogyakarta menjadi destinasi pariwisata. Prinsip “memayu hayuning bawana” berarti memperindah peradaban Yogyakarta yang sudah indah. Keindahan itu yang pada gilirannya akan membukakan berkah ekonomoi bagi masyarakatnya.

Keindahan budaya dan alam Yogyakarta harus dibangun secara berkelanjutan. Dengan demikian keindahannya kelak masih akan bersinar setelah 100 bahkan 500 tahun lagi. Pelestarian alam itu berarti “jadikanlah gunung sebagaimana gunung” dan “jadikanlah laut sebagaimana laut”. Pengejaran pada ekonomi berpotensi untuk mengeksploitasi dan merusaknya. Pengarusutamaan kebudayaan akan melestarikan alam, memperindahkannya, dan akhirnya memberikan kesejahteraan,

Prof Edy Suandi Hamid mengingatkan bahwa masalah kesejahteraan di DIY masih harus banyak dibenahi, Ketimpangan dan kemiskinan harus diperbaiki. Karena itu pembangunan Keistimewaan DIY yang berbasis kebudayaan harus dipikirkan masak-masak supaya berdampak pada kesejahteraan.

Proses Penyusunan

Karena itu Prof Edy mengatakan bahwa penyusunan *Grand Design* Keistimewaan DIY 2022-2042 ini tidak bisa “*sak deg sak nyet*”. Desainnya harus holistik-komprehensif. Diperlukan masukan dari banyak pihak supaya tidak ada poin-poin yang kelewatan.

Paniradya Pati Aris melaporkan bahwa selama ini sudah dilakukan serangkaian FDG (*Focus Group Discussion*) dengan para narasumber ahli. Paniradya Kaistimewan juga berkoordinasi dengan OPD-OPD sehingga penyusunan *Grand Design* ini bersifat holistik dan menjadi landasan sinergi dan kolaborasi lintas OPD.

Paniradya kaistimewan juga menjangkau aspirasi dari masyarakat luas. GKR Mangkubumi menekankan bahwa Keistimewaan DIY adalah milik kita semua, dari Yogyakarta untuk Yogyakarta, Musrenbang Keistimewaan harus dikembangkan, diluaskan, dan diintensifkan. Masyarakat jangan hanya komplain tetapi memberikan masukan-masukan yang solutif.

Diskusi Berlanjut

Sampai buku ini selesai ditulis, Paniradya Kaistimewan sedang terus menyempurnakan draft *Grand Design* Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042. Nantinya rencana induk ini akan dijadikan sebagai Peraturan Gubernur DIY dengan nomor tertentu. Paniradya Kaistimewan terus menjaring aspirasi dari semua elemen masyarakat DIY untuk menyempurnakan rencana induk tersebut.

Berikut ini adalah poin-poin *Grand Design* Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 yang sudah jelas namun dapat pula mendorong dan diskusi lebih lanjut untuk penyempurnaannya (sumber : Paniradya Kaistimewan DIY, 2021).

- Kurun waktu *Grand Design* ini hadir diantara kurun waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025, RPJP Daerah 2012-2025, dan periodisasi. Pelaksanaan *Grand Design* Tahun 2022-2042 terbagi dalam 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yaitu Lima Tahun Pertama (2022-2027), Lima Tahun Kedua (2027-2032), Lima Tahun Ketiga (2032-2037), dan Lima Tahun Keempat (2037-2042).
- *Grand Design* digunakan sebagai haluan dalam menyusun RPJPD dan RPJMD dalam menguatkan urusan keistimewaan. *Grand Design* memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program

kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. *Grand Design* sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam rencana pembangunan baik lima tahunan maupun sekala tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

- Dokumen *Grand Design* Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 diharapkan menjadi haluan dan arahan sebagai kaidah umum teknik pembangunan keistimewaan ini mampu menjamin keterpaduan, sinergitas, efektivitas dan keefisienan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pemanfaatan dana keistimewaan dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya untuk memberikan informasi yang sederhana diantaranya tentang visi Pembangunan DIY, tujuan keistimewaan, arah kebijakan keistimewaan, ukuran keberhasilan, strategi pelaksanaan, dan road map, serta keterkaitan *Grand Design* sendiri dengan

perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan *Grand Design* DIY diproyeksikan memiliki lingkup waktu 20 tahun yang diuraikan dalam kurun waktu 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya yang terinternalisasi pada dokumen perencanaan urusan keistimewaan.

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam *Grand Design* ini adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
- *Grand Design* Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 adalah haluan, arahan dan pedoman pelaksanaan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan
- Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Maksud disusunnya *Grand Design* DIY 2022-2042 adalah sebagai berikut. *Grand Design* Tahun 2022-2042 disusun dengan maksud sebagai haluan, arahan, dan acuan kerja bagi penyelenggaraan urusan keistimewaan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 20 tahun. Dokumen ini juga sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rencana pembangunan.
- Tujuan disusunnya disusun *Grand Design* DIY 2022-2042 adalah sebagai berikut. *Grand Design* Tahun 2022-2042 disusun dengan tujuan untuk memberikan haluan, arah, dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan keistimewaan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
- Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya *Grand Design* Tahun 2022-2042 adalah untuk : (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan keistimewaan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (5) mengoptimalkan partisipasi kasultanan/kadipaten, masyarakat, masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga menjadi produk kolektif (*budaya saling silang*).

- Tujuan *Grand Design* DIY 2022-2042 pada dasarnya sama dengan tujuan pengaturan Keistimewaan DIY menurut Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Tujuan yang hendak dicapai *Grand Design* Tahun 2022-2042 adalah: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mewujudkan kepastian hukum pemerintah yang demokratis diwujudkan melalui pelaksanaan amanat masyarakat DIY oleh Pemerintah Daerah DIY. Kepastian hukum diperoleh melalui penerbitan aturan pelaksana bagi tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat – kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan

masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat, (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia – tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka- Tunggal-Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY dan pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY, (4) menciptakan pemerintahan yang baik – Pemerintahan yang baik diwujudkan melalui pelaksanaan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum, (5) melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

- Ruang lingkup *Grand Design* DIY 2022-2042 akan membahas poin-poin penting di antaranya (1) gambaran umum Keistimewaan DIY, (2) isu-isu strategis dalam pembangunan DIY, (3) haluan kebijakan Keistimewaan DIY yang mencakup tujuan Keistimewaan DIY, arah kebijakan Keistimewaan

DIY, indikator-indikator keberhasilan, dan peta jalan (*road map*).

- Yang dimaksud dengan isu-isu strategis dalam *Grand Design* DIY 2022-2042 adalah urusan-urusan khusus yang merupakan Kewenangan-kewenangan Istimewa DIY yaitu (1) urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, (2) urusan kelembagaan pemerintahan daerah, (3) urusan kebudayaan, (4) urusan pertanahan, dan (5) urusan tata ruang.
- Isu Strategis *Grand Design* DIY 2022-2042 yang berkaitan dengan urusan kelembagaan pemerintahan adalah sebagai berikut. Dalam proses penataan bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY sebagai konsekuensi yuridis diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 perlu memperhatikan, setidaknya, 4 (empat) aspek, yaitu: (1) aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli; (2) aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional; (3) aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan yang ideal; dan (4) aspek perbandingan dengan bentuk dan tata kelola pemerintahan daerah lainnya yang bersifat khusus atau istimewa. Bentuk kelembagaan baru Pemerintah DIY harus mematuhi dan menerapkan tiga aspek yang pertama demi mewujudkan tujuan kelembagaan Pemerintah DIY yang lebih efektif,

efisien, responsif, akuntabel, transparan, dan partisipatif, dengan tetap menghormati kearifan lokal dan dapat memberikan perlindungan terhadap kelompok marginal. Sedangkan perbandingan dengan bentuk dan tata kelola pemerintahan yang diterapkan pemerintah daerah yang juga bersifat khusus atau istimewa lainnya diperlukan untuk memperoleh lesson learned dari kelembagaan yang telah diterapkan demi mendapatkan bentuk kelembagaan yang lebih baik dan lebih implementatif. Dengan itu, kelembagaan baru Pemerintah DIY dapat terhindar dari kekurangan atau hambatan yang pernah atau sedang dihadapi oleh kelembagaan pemerintah daerah yang juga bersifat khusus atau istimewa. Konstruksi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebenarnya merupakan penerapan desentralisasi yang bersifat asimetris. Prinsip asimetris ini mengakibatkan kewenangan pelaksanaan urusan desentralisasi akan berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tujuan ideal dari prinsip ini adalah untuk memberikan jaminan dan pengakuan terhadap kemajemukan dari setiap daerah dalam sebuah negara kesatuan. Oleh sebab itu, setiap daerah akan berbeda kelembagaan dan kewenangan yang dimilikinya. Pola dasar inilah yang digunakan para *founding fathers* Indonesia dalam mengakomodasi keistimewaan dan kekhususan setiap daerah

ataupun wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Isu strategis kebudayaan dalam *Grand Design* DIY 2022-2042 berkaitan dengan langkah kedepan yang harus dilakukan yaitu: (1) "mengembalikan" nilai-nilai yang memang harus dikembalikan karena nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY, (2) "merehabilitasi", nilai-nilai keistimewaan budaya yang sudah menunjukkan tanda keredupan, (3) "menguatkan", nilai-nilai keistimewaan budaya yang mengalami pelemahan oleh nilai-nilai budaya baru dan oleh generasi baru Yogyakarta, dan (4) "mengembangkan", nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan jaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.
- Isu strategis tata ruang dalam *Grand Design* DIY 2022-2042 cukup kompleks. Salah satunya berkaitan dengan 18 satuan ruang strategis dalam penataan ruang keistimewaan DIY, yaitu : (1) Satuan ruang strategis kasultanan pada Tanah Keprabon : Karaton, Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Sumbu Filosofi dan Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Gunung Merapi, Pantai Samas - Parangtritis, (2)

Satuan ruang strategis kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon yaitu: Kerto – Plered, Kotabaru, Candi Prambanan - Candi Ijo, Sukoliman, Perbukitan Menoreh, Karst Gunungsewu. Pantai Selatan Gunungkidul, (3) Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon yaitu Puro Pakualaman dan Makam Girigondo, (4) Satuan ruang strategis kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon yaitu Pusat Kota Wates dan Pantai Selatan Kulon Progo.

- Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tata ruang DIY adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun secara hirarkis: (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).
- Rencana Tata Ruang merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. DIY dan kabupaten/Kota di DIY telah memiliki RTRW, yang sudah mengakomodasi fungsi dan peruntukan kawasan sesuai dengan kedalaman skala masing-masing yaitu untuk Nasional 1 : 250.000, provinsi 1 : 100.000 , kota 1 : 25.000 dan Kabupaten 1: 50.000. sehingga pengaturan pemanfaatan ruang terkait dengan status kepemilikan tanah kasultanan

dan tanah kadipaten sudah diatur di dalamnya. Dengan demikian, fungsi dan peruntukan kawasan pemanfaatan ruang di atas tanah-tanah kasultanan dan kadipaten harus mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- Dalam bidang tata ruang, terdapat 4 (empat) nilai dasar yang sangat perlu diletakkan sebagai “rujukan” sekaligus “panduan” dalam penataan ruang DIY dimasa datang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ke 4 (empat) nilai dasar tersebut adalah : (a) memayu hayuning bawana, (b) sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak, (c) catur gatra tunggal, dan (d) pathok negara.
- Memayu hayuning bawana memberikan ajaran bahwa penataan ruang dan lingkungan harus menuju pada upaya menciptakan ruang wilayah Yogyakarta secara keseluruhan yang rahayu dengan membuang jauh-jauh prinsip-prinsip tindakan pembangunan yang eksploitatif. Sedangkan konsep Sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak berpesan secara simbolik bahwa bentuk dan susunan tata ruang Yogyakarta yang tersusun oleh poros inti Panggung Krapyak–Tugu Pal Putih adalah kawasan inti ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, yang harus dirawat dan dilindungi, karena kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi identitas Yogyakarta. Setiap upaya penataan kota, harus

berawal dan mengambil rujukan poros ini, sehingga kawasan yang membujur dari utara ke selatan dan diapit oleh Kali Code dan Kali Winongo harus menjadi kawasan inti Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Catur gatra tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas Keraton, Masjid, Alun-Alun, dan Pasar juga merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota; dengan demikian, elemen-elemen ini menjadi kesatuan yang menyambung dengan kawasan inti yang berporos Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak.
- Pathok Negara, sebagai konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta memberikan ajaran bahwa pembatasan perkembangan fisik keruangan kota untuk melindungi fungsi-fungsi lahan pertanian dan perdesaan yang menjadi penyangganya adalah sangat penting. Pembangunan Jalan Lingkar (Ring Road) yang menempatkan Masjid Mlangi (Barat Kota) dan Ploso Kuning (Utara Kota) berada di luarnya merupakan suatu contoh yang baik. Sedangkan Masjid Babadan (Timur Kota) dan Masjid Dongkelan (Selatan Kota) yang sudah terlanjur berada dalam posisi di dalam ring road perlu kearifan dalam pengelolaan tata ruang sekitarnya terutama dalam aspek skala kepadatan dan

ketinggian bangunan. Ajaran ini harus diikuti dengan dibangunnya perangkat pengendalian tata ruang yang kuat, teguh, konsisten dan dipercaya masyarakat.

- Dalam konteks Tata Ruang Wilayah DIY secara keseluruhan, keempat nilai dasar keistimewaan tata ruang tersebut diatas memberikan pelajaran bahwa tata ruang DIY adalah tata ruang yang berbasis budaya. Dengan demikian, maka tata ruang DIY kedepan adalah tata ruang yang tersusun oleh satuan-satuan budaya, termasuk didalamnya Tata Ruang Budaya Karst (Gunung Kidul), Tata Ruang Budaya Pertanian Irigasi (Sleman Barat, Bantul Tengah), Tata Ruang Budaya Lereng Merapi, Tata Ruang Budaya Pantai, dan sebagainya). Dibawah payung UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka segala kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang harus didasarkan pada satuan-satuan ruang budaya.

Bab 6.

HUT UMKM ke-6 Go Digital, Go Global

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 12 Agustus 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Nara sumber :

- Ir. Hermawan Ardiyanto, MBA (Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi, dan Digital Marketing KADIN DIY)
- Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY)
- Muhammad Sumpeno (Owner Pheryno Leather)

Moderator : Wijil Rachmadhani

Hari UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Ternyata, sejarah Hari UMKM itu berkaitan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari UMKM nasional pertama kali diperingati pada 12 April 2016. Sejarah Hari UMKM bermula dari dideklarasikannya “Piagam Yogyakarta” yang merupakan hasil Kongres Nasional UMKM dan Temu Nasional Pendamping ke-2 (TNP2) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 25-26 Mei 2021. Acara itu diikuti oleh ratusan pendamping koperasi dan UMKM dari seluruh Indonesia.

Disamping mendeklarasikan “Piagam Yogyakarta”, Kongres dan Temu Nasional tersebut juga mendeklarasikan Hari UMKM Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus dijadikan Hari UMKM juga karena bertepatan dengan tanggal lahir Muhammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) yaitu pada 12 Agust 1902. Bung Hatta adalah tokoh peletak dasar ekonomi kerakyatan Indonesia. Kongres dan Temu Nasional di Yogyakarta itu sendiri sangat signifikan, Dakan acara itu juga Deklarasi Kode Etik Pendamping dan Tri Darma UMKM.

Itulah sebabnya, *podcast* Rembag Kaistimewan yang membahas digitalisasi UMKM kali ini juga dalam rangka peringat HUT ke-6 Hari UMKM Nasional di mana HUT ke-1 UMKM dihitung dari tanggal 12 April 2016. Wakil Gubernur DIY Paku Alam X memberi sambutan sebelum *podcast* ini dimulai. Beliau menyampaikan (1) apresiasi atas naiknya perekonomian DIY pada semester pertama tahun 2021, (2) motivasi supaya semua pelaku ekonomi di DIY bersinergi untuk maju bersama, (3) motivasi agar UMKM menjadi tulang punggung perekonomian DIY,(4) mendorong tumbuhnya ekosistem UMKM, dimulai dari yang sudah terbangun yaitu sinergi-kolaborasi antara Pemda DIY, KADIN, Dinas Koperasi dan UKM, dan sebagainya, (5) motivasi agar UMKM DIY merambah ekspor ke mancanegara,

Pemulihan UMKM

Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH menegaskan bahwa Paniradya Kaistimewan sangat mempedulikan para pelaku UMKM di DIY yang terdampak pandemi Covid-19. Paniradya Kaistimewan juga mengalokasikan dana ratusan miliar untuk penanganan pandemi termasuk penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Untuk itu Paniradya Kaistimewan juga menggalang sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta KADIN DIY.

Upaya pemulihan ekonomi UMKM dilakukan dengan berbagai cara. Dalam hal inilah Dana Keistimewaan (Danis) DIY dikucurkan untuk mendukung berbagai program pemulihan tersebut,. Harapannya tentu saja supaya UMKM bisa bangkit kembali, berpromosi, menjual ke pasar secara efektif.

Ariyanti juga mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM yang sukses mengembangkan sistem digital SiBakul Joga sebagai markethub dan sarana pembinaan UMNKM. Melalui sarana digital ini para UMKM dapat mengembangkan jangkauan pemasarannya secara *online*.

Peangalokasian Danais bukan hanya dalam rangka penulihan akibat pandemi, tetapi juga dalam rangka mendorong UMKM DIY naik kelas. UMKM DIY

diharapkan terus melompat dari *local branding* menjadi *national branding* dan kemudian *global branding*. Pengembangan UMKM itu disinergikan dengan pembangunan semangat kewirausahaan di kawasan pedesaan (pembangunan desapreneur).

Go Digital dan Go Global

Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi, dan Digital Marketing KADIN DIY Ir. Hermawan Ardiyanto, MBA juga menyatakan prihatin dengan keterpurukan UMKM akibat pandemi. Mereka melemah karena pandemi berkepanjangan telah membatasi banyak kegiatan usaha, menyebabkan orang tidak berbelanja, dan pariwisata yang menjadi ajang UMKM berjualan pun meredup.

Keterpurukan itu mendorong KADIN bersama Dinas Koperasi dan UKM memutar otak mencari jalan keluar. Solusi yang diharapkan mampu membawa pemulihan adalah digitalisasi dan ekspor. Kalau hanya mengandalkan pasar nasional, situasinya masih lemah. Namun untuk mempercepat penjangkauan pasar global maka UMKM harus mengoptimalkan teknologi digital. Pada pertengahan tahun 2021 ini UMKM DIY mulai ekspor perdana ke Amerika Serikat.

Dana Keistimewaan (Danais) juga dialokasikan untuk proses digitalisasi berorientasi global itu. Sebab untuk menjangkau pasar global, UMKM perlu melakukan pemasaran secara global pula. Mereka

harus mempunyai *company profile* yang bagus, poparan *product knowledge* yang mantab, memiliki *website* yang komprehensif, dan seterusnya. Pada tahun 2021 setidaknya ada 100-an UMKM yang dipersiapkan kapasitas digitalnya dengan bantuan Danais DIY.

Hermawan berharap ke depan UMKM bisa bermain sendiri di ranah global. Sebab, di era digital ini pada dasarnya peluang kita sama. Siapapun bisa melakukan ekspor. Ada banyak kemudahan di dalam kegiatan ekspor. Masuk ke Amerika Serikat pun relatif mudah, kecuali bahan makanan. Agar bisa bermain sendiri itu, Hermawan menegaskan bahwa kuncinya adalah digitalisasi dan kelihaihan dalam berstrategi. *Digital marketing* yang inovatif membukakan banyak peluang.

Menurut Hemawan, kita perlu juga merekrut generasi milenial yang berkapasitas untuk mendukung kreativitas digital marketing para UMKM. Sebagai generasi *native digital*, mereka berpotensi lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi-komunikasi untuk memasarkan produk-produk UMKM.

Pengalaman UMKM

Dalam *podcast* Rembag Kaistimewan kali ini turun hadir Muhammad Sumpeno, owner Pheryno Leather sebagai nara sumber. UMKM ini berfokus membuat produk-produk kulit sapi yang dikreasi menjadi tas,

dompet, cover buku, tempat kartu, dan berbagai produk untuk kebutuhan sehari-hari.

UMKM yang dikelola Sumpeno, sama seperti kebanyakan UMKM lainnya, terdampak berat oleh pandemi Covid-19. Dulu sebelum pandemi, setiap kali pameran bear di Jakarta, bisa meraup keuntungan Rp. 40-50 juta. Di tengah pandemi, ketika Sumpeno berpameran di Jakarta hanya meraup keuntungan sekitar 20 persen dari sebelumnya.

Pandemi Covid-19 menuntut Sumpeno untuk mengoptimalkan strategi digital. Sebelum pandemi, pemasaran dilakukan secara *online* hanya 30 persen, yang 70 persen secara *offline*. Sekarang terbalik dan ternyata itu yang menolong Sumpeno dan usahanya terus bertahan dan bahkan berkembang di tengah pandemi. Dalam hal ini Sumpeno bersyukur karena dapat bergabung dengan sistem digital SiBakul Jogja yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Berkat arahan, binaan, dan dukungan itu maka usaha Sumpeno kini berangsur bangkit kembali.

Tentang Prestasi “SiBakul Jogja”

Dalam rangka mewujudkan tatakelola data Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpadu, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah DIY membutuhkan sebuah Sistem Informasi Pendataan dan Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha di wilayah Yogyakarta berbasis

website bernama SiBakul Jogja. Laman web Sibakul.Jogja dapat diakses pada alamat: <https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id>

Sibakul.Jogja saat ini memiliki keuntungan free ongkir saat minimal pembelian Rp.50.000 dalam radius 30 km. Syarat mendaftar program adalah (1) terdaftar di SiBakul Jogja, (2) punya aplikasi Grab dan Geogle Maps, (3) memiliki stok barang harian, (4) produk makanan menyertakan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluwarsa, (5) kemasan memenuhi standar.

Sistem digital SiBakul terus berkembang dan dipertajam kemampuan fungsinya. Berikut adalah liputan harianjogja.com berjudul “Aplikasi SiBakul Jogja Tambah Fitur Layanan Data dan Informasi”. (18 Agustus 2021).

Aplikasi Pembinaan SiBakul Jogja Dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) DIY terus berinovasi menambah fitur-fitur layanan yakni penyediaan data UMKM sebagai bentuk layanan informasi bagi publik.

“Data di SiBakul Jogja tidak lagi terbatas untuk acuan dalam pembinaan koperasi dan UMKM DIY namun juga untuk pelayanan data bagi masyarakat umum dalam bentuk informasi yang bisa diakses publik,” jelas Kepala Diskop UKM Srie Nurkyatsiwi.

Fitur ini menyediakan sistem bagi data dalam bentuk pemberian akses maupun integrasi dengan aplikasi

data yang dikembangkan Pemerintah selaku pembina koperasi dan UMKM. Mekanismenya, ada surat resmi permintaan data dari pemohon yang menunjukkan kebutuhan jenis data yang diminta, disertai dengan surat pernyataan agar data tidak disebarluaskan. “Misalnya suatu instansi membutuhkan data nama UMKM, jenis usaha, alamat usaha di Kota Yogyakarta, kepada instansi tersebut akan diberi akses sesuatu kebutuhan dalam jangka waktu tertentu,” kata Siwi.

Akses data ini dapat dilihat pada laman web <https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id>. Layanan pemberian akses ini bisa membuka peluang kolaborasi pembinaan koperasi dan UMKM antar multipihak dari sejumlah pemangku kepentingan di DIY. Namun demikian keluasaan dalam mendapatkan data ini masih dibatasi mengingat adanya informasi yang dikecualikan seperti NIK, NIB, dan sebagainya.

Menurut Siwi, penyediaan fitur informasi UMKM untuk publik ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini yaitu percepatan peningkatan perekonomian. Dengan integrasi data ini diharapkan pembinaan dari berbagai pihak pada UMKM tidak tumpang-tindih namun saling mendukung agar UMKM naik kelas.

Penyediaan fitur ini juga sekaligus menyokong aplikasi IDMC (*Integrated Development Management Center*) dan juga Jogja Center yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY.

IDMC merupakan aplikasi pengintegrasian dari beberapa aplikasi yang sudah tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Aplikasi ini berfungsi sebagai *Decision Support System*. Data dan informasi di dalamnya akan digunakan untuk mempermudah pengambilan kebijakan di lingkungan Pemda DIY agar lebih cepat dan tepat. “Fitur baru kami ini seperti gayung bersambut, sehingga data koperasi dan UMKM DIY serta kegiatan-kegiatannya bisa diintegrasikan dengan IDMC maupun Jogja Center tersebut,” kata Siwi.

Aplikasi SiBakul Jogja tahun ini diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 dengan judul “Rajutan SiBakul” akronim dari “Cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Inovasi Dekstop UKM ini muncul sebagai pemenang di Top 45 Inovasi pada halaman yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dengan menyingkirkan 1.500 inovasi lainnya.

Sistem digital Sibakul Jogja yang berprestasi di tingkat nasional terus menerus dikembangkan. Sekarang SiBakul Joga telah menjadi markethub sebagaimana diulas oleh krjogja.com dengan judul V(20 Oktober 2021) sebagai berikut.

Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Pemda DIY atau yang dikenal dengan SiBakul Jogja kini telah bertransformasi menjadi markethub

seiring dengan adanya pandemi Covid-19. Kehadiran SiBakul Jogja Markethub ini merupakan bagian dari stimulus dari Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa memasarkan produknya dengan difasilitasi pemasarannya melalui daring.

“Bahkan UMKM yang produknya terbeli dibantu dengan keringanan bebas ongkos kirim (ongkir) yang biayanya ditanggung oleh Pemda DIY. Intinya SiBakul Jogja didisain sebagai media UMKM, membantu pemasaran produk-produk yang layak. Sehingga skema free ongkir adalah bentuk investasi Pemda DIY guna lebih membedakan UMKM, dalam rangka pemulihan ekonomi dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat DIY,” tutur Kepala Dinkop UKM DIY Srie Nurkyatsiwi.

Siwi menjelaskan bahwa SiBakul Jogja merupakan pusat data Koperasi dan UMKM DIY di mana seluruh kegiatan pembinaan Koperasi dan UMKM di wilayah DIY wajib berintegrasi dengan sistem data SiBakul Jogja. Upaya ini bertujuan agar dapat menjaga soliditas, keterbaruan, akurasi dan integritas data Koperasi dan UMKM yang sangat membantu memberi gambaran yang tepat postur kekuatan Koperasi dan UMKM di DIY sehingga dapat diarahkan secara tepat, efektif, dan berdampak.

“Sistem manajemen kegiatan pembinaan Koperasi dan UMKM di DIY ini diharapkan secara efektif mampu

memandu Koperasi dan UMKM dalam menentukan langkah modernisasi cara pengelolaan dan memajukan lembaganya. Dengan demikian Koperasi dan UMKM betul-betul menjadi tulang punggung roda ekonomi yang tangguh, efektif, dan modern,” ujarnya.

SiBakul Jogja menghadirkan tatakelola UMKM modern berbasis data yang valid dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan, integrasi aplikasi dan kolaborasi optimasi potensi Koperasi dan UMKM DIY. Secara garis besar UMKM yang ikut markethub bebas ongkir jumlahnya sudah 2.000 UMKM pada pertengahan 2021. Sementara UMKM yang sudah terdaftar lewat SiBakul Jogja sudah mencapai 300.000 UMKM.

“SiBakul Jogja sebenarnya sudah ada sejak 2019 lalu, namun pada saat diluncurkan masih dalam skema pendataan UKMK yaitu proses mendata dan membina klaster UMKM. Sebab awalnya ratusan ribu UMKM belum berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan adanya SiBakul Jogja maka UMKM Jogja sudah berbasis NIK sehingga tiap NIK dapat diketahui jenis usahanya, punya sertifikasi atau tidak dan punya daya saing atau tidak,” papar Siwi.

Siwi menambahkan bahwa transaksi SiBakul Jogja Markethub mencapai 150 transaksi per hari pada tahun 2021. Sedangkan total ongkir yang digulirkan telah mencapai Rp. 1,5 miliar sejak awal 2020 sampai

Agustus 2021. Stimulus ini memberikan dampak terhadap ekonomi yang digerakkan atau volume pembelian yang terjadi di UMKM sekitar Rp. 10,5 miliar atau hampir tujuh kali lipat ongkir yang digerakkan berdampak pada perputaran roda perekonomian daerah. Demikialah sistem digital memacu perkembangan ekonomi di DIY.

“Layanan bebas ongkir SiBakul Jogja Markethub sudah menjajaki pasar ekspor luar negeri. Artinya komitmen SiBakul Jogja terhadap pemberdayaan UMKM yang tangguh sudah sangat serius. Kami sangat berharap SiBakul Jogja menjadi rumah bagi UMKM, tempat berkonsultasi terkait dengan tatakelola bisnis ke depannya sebagai wujud komitmen dan kesungguhan Pemda DIY,” pungkasnya.

Bab 7.

Jamu Mempertahankan Eksistensi di Masa Pandemi

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 28 Juli 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Nara sumber :

- dr. Sistia Utami, M.Si (Kepala Puskesmas Sedayu Kab. Bantul)
- Wagiyanti (Ketua Kelompok Jamu Jati Usaha Mulia)
- dr. Wahyu Pamungkasih, M.Sc (Kepala Puskesmas Banguntapan Kab. Bantul)

Moderator : Ninda Fillasputri

Pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan dan bahkan telah banyak merenggut korban jiwa mendorong semua pihak untuk mengoptimalkan semua usaha penanggulangan. Dalam hal inilah dunia pengobatan bukan hanya mengembangkan pengobatan medis modern tetapi juga merevitalisasi kembali pengobatan tradisional seperti meminum jamu.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, jamu bukan hanya berdimensi pengobatan alternatif tetapi juga

berdimensi budaya. Banyak jamu ramuan tradisional yang berakar pada sejarah, menjadi bagian dari budaya tradisional, dan menjadi produk yang memajukan ekonomi rakyat. Karena itu Paniradya Kaistimewan juga menyalurkan Dana Keistimewaan (Danais) untuk mendukung pelestarian dan pemajuan jamu tradisional.

Danais dukung Jamu

Kepala Puskesmas Sedayu Kabupaten Bantul dr. Sistia Utsami, M.Si dan Kepala Puskesmas Banguntapan Kabupaten Bantul dr. Wahyu Pamungkasih, M.Sc memberi apresiasi atas pengalokasian Dana Keistimewaan (Danais) DIY untuk pengembangan pengobatan tradisional. Keduanya membeberkan bagaimana dukungan Danais memajukan produksi jamu dan juga pengobatan tradisional di desa-desa di tempat mana puskesmas-puskesmas yang mereka pimpin berada.

Dokter Sistia menjelaskan bahwa dukungan Danais di dasarnya digunakan untuk pemberian pendampingan bagi ibu-ibu produsen dan penjual jamu tradisional. Di beberapa padukuhan di kelurahan itu sudah ada para penjual jamu yang berjualan jamu secara turun-temurun. Mereka mengerjakannya secara tradisional tanpa pengetahuan akademis yang kuat. Pendampingan yang dilakukan meningkatkan kompetensi mereka misalnya dalam hal menjaga

supaya jamu berkualitas dan higienis. Ibu-ibu yang sudah dilatih kemudian menjadi *trainer* bagi kawan-kawannya yang lain.

Pendampingan untuk meningkatkan kompetensi meramu jamu tradisional itu kemudian berkembang menjadi pendampingan untuk meningkatkan kompetensi pengobatan tradisional lainnya. Salah satunya adalah pemberian pelatihan untuk praktik pijat tradisional dan pengobatan *acupuncture-acupressure*. Pelatihan ini membukakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk bekerja di bidang pengobatan tradisional.

Sistia menambahkan bahwa berkat dukungan Danais, bukan hanya produksi jamu meningkat dan penjual jamu semakin aktif, tetapi tradisi minum jamu juga direvitaliasi. Setiap hari Selasa di Sedayu ditetapkan sebagai “Hari Minum Jamu”. Para pasien Puskesmas Sedayu juga direkomendasi untuk meminum jamu disamping mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter untuk penyembuhan sakit mereka.

Sementara itu dr. Wahyu mengisahkan perkembangan yang serupa berkat dukungan Dana Keistimewaan (Danais) DIY. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan dengan dukungan Danais memacu pertumbuhan kelompok-kelompok di Banguntapan untuk menekuni profesi pengobatan tradisional. Ada yang dilatih untuk membuat dan

menjual jamu, yang lain dilatih untuk profesi pengobatan *acupressure*. Pelatihan itu dilakukan dengan menyesuaikan pada minat masing-masing peserta pelatihan. Pendampingan dan pelatihan itu dilakukan dengan tujuan memperkuat dan mengembangkan potensi lokal yang ada,

Dengan dukungan Danais pula, para pasien mendapatkan bantuan jamu tradisional. Para pasien tidak dipaksa untuk meminum jamu, namun diberi informasi dan masukan tentang manfaat jamu. Disamping mendapatkan obat medis yang diresepkan, mereka mendapatkan pula jamu-jamuan sebagai komplemen.

Kebijakan Nasional

Menurut dr. Wahyu, pemajuan pengobatan tradisional juga merupakan kebijakan nasional di bidang pembangunan kesehatan. Pada tahun 2016 terbit Peraturan Pemerintah yang mengatakan bahwa kesehatan tradisional itu merupakan bagian dari kesehatan itu sendiri. Artinya, kearifan tradisional yang sudah ada di dalam diri masyarakat untuk menjaga kesehatan tidak perlu dibuang. Dan faktanya, lebih dari 40 persen orang Indonesia mengkonsumsi obat-obat tradisional disamping obat-obatan “konvensional” (obat medis yang diresepkan oleh dokter medis). Sebagai contoh, saat orang sakit batuk dan pilek, disamping meminum obat medis, juga mengkonsumsi jahe.

Pada tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI yang mendukung pengembangan pengobatan tradisional sebagai integrasi dengan pengobatan konvensional versi kedokteran medis modern. Dengan demikian jika Pemerintah Daerah DIY mendukung pengobatan tradisional seperti jamu, dan mengalokasikan Danais untuk mendukungnya, hal itu sudah selaras dengan kebijakan nasional.

Kementerian Kesehatan RI juga menerbitkan Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang terus menerus direvisi. Buku elektronik (*e-book*) ini bisa diunduh secara gratis. Dalam buku ini, disamping memberikan banyak petunjuk teknis medis, juga memberikan informasi panduan tentang pengobatan tradisional seperti penggunaan jamu untuk kesehatan menghadapi ancaman pandemi Covid-19.

Bertolak dari kebijakan nasional yang mengakomodir sistem pengobatan tradisional, dr. Wahyu mendukung masyarakat untuk mengkonsumsi jamu untuk kesehatan. Menurutnya, jamu mempunyai sifat promotif, preventif, dan pelengkap dalam upaya kesehatan masyarakat. Namun dalam mengkonsumsi jamu sebaiknya tidak bersamaan dengan saat meminum obat medis. Perlu ada jarak kurang lebih dua jam, meminum obat medis dan dua jam kemudian mengkonsumsi jamu.

Danais Mendongkrak Usaha Jamu

Dalam *podcast* ini juga hadir Ketua Kelompok Usaha Jamu di Sedayu Wagiyanti. Di daerahnya ada beberapa kelompok usaha jamu. Adapun kelompok yang dipimpinnya itu didampingi oleh Puskesmas Sedayu yang dikepalai oleh dr. Sistia Utami, M.Si.

Wagiyanti mengaku merasakan dampak sangat positif dari dukungan Danais. Pendampingan dan penyuluhan sangat membantu para pengusaha jamu tradisional untuk memajukan usahanya. Selama ini Wagiyanti dan kawan-kawan hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun di dalam membuat jamu. Setelah pembinaan dengan dukungan Danais, mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Lalu munculah kreasi produk-produk jamu yang mulai diberi merek-merek bernuansa lokal:

- Jamu “Jeniper”, singkatan dari jeruk nipis peras. Ini merupakan ramuan tradisional jeruk dipadu dengan madu untuk obat batuk. Ramuan ini diwariskan turun-temurun lintas generasi.
- Jamu “Sri Wedari”, singkatan dari “Sedayu Produksi Wedang Perkuat Diri”, jamu untuk menambah imun atau daya tahan tubuh.
- Jamu “Putri Singset”, ramuan tradisional untuk mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Ramuan ini terdiri dari unsur sayuran dan buah. Meskipun

namanya ada unsur “putri” namun bisa untuk semua gender dan untuk semua usia.

- Jamu “Sirna Lara”, ramuan tradisional untuk penyembuhan tertentu.
- Jamu “Ramji”, singkatan dari ramuan siji. Jamu untuk kesehatan ini dibuat dari bahan jahe merah, jeruk nipis, dan kayu manis. Ramuan ini diambil dari Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi 5 (Kementerian Kesehatan RI).

Wagiyanti mempunyai impian untuk bukan hanya mengembangkan bisnis jamu, tetapi merevitalisasi jamu tradisional Yogyakarta dan Indonesia. Ia dan kelompoknya mendirikan “Omah Jamu” sebagai pusat kegiatan. Ia pun terlibat dalam upaya mensosialisasikan jamu. Menurutnya, sekarang masyarakat sudah sangat bersemangat untuk mempopulerkan jamu. Generasi muda pun tertarik dan terlibat dalam gerakan minum jamu. Beberapa anak muda dari Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Singosaren misalnya, membuat “jingle” (lagu pendek) untuk mempromosikan jamu.

Diskusi Berlanjut

Diskusi soal jamu, apalagi dikaitkan dengan Keistimewaan DIY ini memancing banyak pertanyaan dari para pemirsa. Dalam konteks Yogyakarta dan masyarakat-masyarakat berbasis budaya lainnya, masalah jamu dan pengobatan tradisional masih

sangat eksis. Apalagi ketika pandemi merongrong kesehatan dan merenggut banyak nyawa.

Pandemi global virus Corona (Covid 19) membuat dunia melirik kembali cara-cara tradisional untuk mengatasi sakit-penyakit. Di Yogyakarta yang masih bernuansa kerajaan, ada sebagian warga masyarakatnya yang berharap agar raja mereka berkenan mengibarkan pusaka tradisional bertuah Kanjeng Kyai Tunggul Wulung untuk mengusir Corona dari bumi nusantara. Sementara itu di Pasar Wage Purwokerto, Puji (50) menjual paket rempah dengan merek “*Empon-empon Corona*” (*kompas.com*).

Bukan hanya masker dan *sanitizer* yang ludes diburu masyarakat, ramuan tradisional *empon-empon* itu juga sangat laris. Di Yogyakarta, penjualan paket jamu yang terdiri dari ramuan rempah berupa kunyit, jahe, lengkuas, serai, temulawak, kencur, dan lainnya itu meningkat tajam. Sementara di Surabaya, Rektor Unair Mochammad Nasih mengatakan bahwa minuman herbal *empon-empon* itu berkhasiat memperkuat imun dan menangkal virus (*kompas.com*).

Gejala meminati kembali obat dan pengobatan tradisional muncul di mana-mana seiring dengan Corona yang juga merebak di banyak negara. Dalam studi antropologi kesehatan (*medical anthropology*) obat dan pengobatan tradisional disebut sebagai etnomedisin. Hughes (1968) sebagaimana dikutip

Foster dan Anderson (2005) menjelaskan etnomedisin sebagai kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit (*desease* dan *illness*) yang merupakan hasil perkembangan kebudayaan asli dan yang secara eksplisit tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern.

Setiap suku bangsa memiliki sistem pengetahuan asli tentang obat dan pengobatan. Meskipun banyak dari etnomedisin yang terbukti benar-benar efektif, masyarakat modern berbasis iptek – khususnya Barat – cenderung memandangnya sebelah mata. Etnomedisin lantas dilabel sebagai pengobatan rakyat (*folk medicine*) kuno, tradisional, primitif, tidak ilmiah, irasional, magis, biadab (*savage*). Hal itu dikontraskan dengan obat dan pengobatan modern, ilmiah, saintifik, kontemporeer.

Namun ketika budaya modern Barat mengglobal hingga mencapai titik jenuhnya dan di sisi lain bangkit semangat multikulturalisme yang juga mengglobal, etnomedisin mendapatkan panggungnya. Pada era 1990-an, futuris John Naisbitt dalam bukunya “Megatrends 2000” (1990) memprediksi kebangkitan kebudayaan non-Barat yang dicap primitif itu. Kebangkitan yang disebutnya sebagai nasionalisme kultural itu menjadi *counter trend* globalisasi budaya modern Barat.

Menurut Naisbitt, kebangkitan itu terlihat dalam pertumbuhan pesat gerakan-gerakan, komunitas-komunitas, dan organisasi-organisasi pegiat spiritualitas non-Barat di dunia Barat. Gerakan Abad Baru (*New Age Movement*) yang merebak di AS misalnya, merupakan gerakan multidimensional yang mempromosikan sistem-sistem dan praktik-praktik spiritualitas Timur yang bersifat holistik dalam berbagai bidang.

Etnomedisin mendapat tempat di dunia modern seiring dengan tumbuhnya minat besar akan pendekatan-pendekatan yang bersifat holistik itu. Pada era 1990-an, Naisbitt melaporkan bahwa di Florida AS misalnya, *New Age Ministries* di Clearwater memberi kursus “Ancangan Metafisik dan Spiritual terhadap Keberhasilan Bisnis”. Sementara *Rainbow Reflection Light Center* di Chicago mengajarkan kelas spiritual tentang bagaimana menjadi seorang penyembuh. Para praktisi modern terus memikirkan strategi-strategi yang komprehensif yang memadukan modernitas dan tradisionalitas, rasionalitas dan irasionalitas, intelektualitas dan spiritualitas. Paradigma inilah yang membuka ruang dan peluang bagi bangkitnya etnomedisin yang dipadukan dengan sistem dan praktek medis modern.

Menghadapi musuh bersama sekelas Corona, manusia sebagai pembelajar dituntut untuk bisa mengeksplorasi seluruh sistem pengetahuan yang ada. Manusia harus bisa menghargai semua pencapaian

pengetahuan yang ada, baik yang dicapai oleh dunia modern maupun yang telah lebih lama dicapai oleh dunia tradisional.

Ilmu dan praktek medis modern bukan segalanya. Para pelaku medis modern tidak bisa lagi memonopoli upaya pembangunan kesehatan masyarakat. Namun sebaliknya, etnomedisin harus pula dikontrol, dievaluasi, dikoreksi, dan direvisi oleh sistem pengetahuan obat, pengobatan, dan kedokteran modern berbasis iptek.

Sebab, tak jarang etnomedisin konyol dan fatal. Foster dan Anderson dalam “Medical Anthropology” (1986) melaporkan banyak kasus fatal etnomedisin. Sebagai contoh adalah tonik tradisional Agbo Tutu yang terkenal di Ibadan, Nigeria pada era 1970-an. Tonik untuk mengobati anak-anak yang sakit kejang-kejang itu dibuat dari daun tembakau yang direndam dalam air seni manusia atau sapi. Etnomedisin di Liberia juga konyol. Bayi yang sakit panas disembuhkan dengan cara dimandikan dengan lumpur, lalu dibasuh dengan air bersih, air bekas basuhan itu diminumkan pada si bayi, lalu asap tembakau ditiupkan masuk ke mulutnya.

Belajar dari kasus-kasus konyol dan fatal itu, etnomedisin perlu dilihat sebagai penemuan (*discovery*) yang masih harus terus diteliti. Setelah penemuan itu diuji, divalidasi, dan dikembangkan, barulah menjadi invensi (*invention*) yang layak

diterapkan. Etnomedisin jangan ditolak, namun dikembangkan dan disempurnakan.

Tetapi positifnya, praktik etnomedisin mengasah multikecerdasan dalam peri kehidupan manusia. Etnomedisin mengasah kecerdasan sosial (interpersonal). Sedangkan pendekatan medis modern cenderung individualistik dan mengisolir pasien dari interaksi sosial. Sedangkan penyembuhan etnomedisin justru memperkuat individu sakit dalam sistem relasi sosial yang semakin kuat dan sistem ritual penyembuhan komunal yang mengukuhkan kohesi sosial masyarakat.

Kebersamaan sosial adalah energi penyembuhan di dalam etnomedisin. Dalam konteks penanganan pandemi Corona, pembatasan interaksi sosial jangan sampai justru melemahkan kohesi sosial masyarakat. Di saat menghadapi musuh bersama seperti inilah kita membutuhkan energi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam etnomedisin, disharmoni sosial dimaknai sebagai penyebab wabah penyakit (Foster dan Anderson, 2005). Rasa benci dan dengki pada *liyan* membuat orang lain itu jatuh sakit. Jika masyarakat diliputi kebencian maka wabah penyakit melanda masyarakat itu. Solusinya, rekonsiliasi sosial secara menyeluruh. Adapun pendekatan medis modern tidak terkait dengan pembangunan kohesi sosial seperti itu.

Etnomedisin mengasah kecerdasan intrapersonal, menuntut individu sakit bermawas diri. Misalnya, banyak etnomedisin berbasis prinsip oposisi dan prinsip keseimbangan (Foster dan Anderson, 2005). Prinsip keseimbangan yang menyembuhkan ini sederhana, misalnya sakit karena terlalu banyak makan disembuhkan dengan berpuasa, sakit karena kurang makan disembuhkan dengan makanan bergizi, sakit karena bekerja terlalu keras disembuhkan dengan beristirahat.

Dalam berbagai etnomedisin, faktor kerapuhan emosional diidentifikasi sebagai penyebab rupa-rupa sakit-penyakit. Misalnya dalam etnomedisin Meksiko dikenal *susto* sebagai jenis penyakit yang disebabkan oleh rasa takut (Foster dan Anderson, 2005). Dalam perspektif tradisional mereka, ketakutan dalam jiwa membuka celah bagi roh-roh sakit-penyakit untuk merasuki raga manusia.

Jika dibersihkan dari aspek takhayul, paradigma etnomedisin *susto* itu relevan di era Corona sekarang ini. Sebab, orang jatuh sakit bukan hanya karena virus dan bakteri atau faktor biologis, tetapi karena faktor kerapuhan psikologis seperti dalam kasus-kasus psikosomatis. Kepanikan, ketakutan, dan rasa terintimidasi membuat jiwa masyarakat lemah sehingga tubuh mereka pun menjadi rentan.

Bab 8.

Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Membangun Perekonomian, Meningkatkan Kesejahteraan

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 2 September 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Narasumber :

- Nugraha Wahyu Winarno, SP., M.Sc (Plt. Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Paniradya Kaistimewan DIY)
- Kusno Wibowo, ST., M.Si (Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY)
- Suhut H, SH (Lurah Kelurahan Kepek, Kapanewon Saptosari Gunungkidul)

Moderator : Wijil Rachmadhani

Masyarakat awam perlu mengetahui bahwa Dana Keistimewaan (Danais) DIY juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan sarana-prasarana fisik yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan. Salah

satunya adalah untuk mendukung percepatan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang kehadirannya sangat signifikan mendongkrak perekonomian rakyat.

Respon Cepat

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY Kusno Wibowo, ST., M.Si mengawali diskusi dengan menjelaskan bahwa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di kawasan DIY ini merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sejak 2004, pemerintah pusat berencana memajukan infrastruktur kawasan pantai selatan Jawa.

Pada awalnya ada kesepakatan bersama antara 4 gubernur yaitu gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk bersama-sama membangun sarana-prasarana jalan di kawasan pantai selatan itu. Tujuan pembangunan itu adalah mempercepat pembangunan kawasan selatan Jawa yang sejauh ini tertinggal dibanding dengan kawasan utara Jawa. Kemajuan kawasan selatan Jawa ini diharapkan akan memajukan pertanian, perdagangan, perikanan, pertambangan, dan juga pariwisata.

Dari kesepakatan para gubernur itu, ternyata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang paling cepat menindaklanjuti. Pemerintah Daerah DIY bersegera untuk mewujudkan Jalur Jalan Lintas Selatan

(JJLS) di kawasan DIY yang terbentang sepanjang 116,07 km dari ujung Barat di Pantai Congot sampai ujung Timur di kawasan Gunungkidul. Proyek JJLS DIY dimulai pada tahun 2005 dan diharapkan tuntas selesai pada tahun 2025.

Dukungan Dana Keistimewaan (Danais)

Nugraha Wahyu Winarno, SP., M.Sc selaku Plt. Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Paniradya Kaistimewan DIY menegaskan bahwa Paniradya Kaistimewan ikut mendukung pembangunan JJLS yang merupakan proyek strategis tersebut. Dasar pemikirannya adalah terkait dengan Keistimewaan DIY di mana Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2017-2022 menetapkan visi Abad Samudera Hindia. Dengan visi ini kawasan Selatan DIY menjadi prioritas pembangunan karena menjadi “halaman depan” Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi pembangunan kawasan selatan DIY itu juga atas dasar pertimbangan bahwa sejauh ini kawasan itu masih tertinggal. Sebagai contoh adalah daerah Kapanewon Saptosari di Gunungkidul, miskin dan terbelakang secara ekonomi dan infrastruktur. Padahal kawasan selatan DIY sejatinya juga mempunyai banyak

potensi, termasuk potensi sumber daya alam laut dan potensi kepariwisataan.

Kusno Wibowo menjelaskan bahwa pembangunan JJLS itu mencakup dua proses yaitu (1) pengadaan tanah, yang sampai sekarang (2021) tinggal membebaskan spot-spot kecil saja, (2) pembangunan infrastruktur jalan itu sendiri. Rencananya JJLS akan terdiri dari 4 lajur dan diharapkan tuntas selesai pada tahun 2025.

Setelah UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan, sebagian dari Dana Keistimewaan (Danais) DIY dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan JJLS ini. Atas petunjuk Gubernur DIY Sultan HB X dukungan Danais untuk JJLS itu mulai direalisasikan sejak tahun 2014 untuk mempercepat pengadaan tanah.

Menurut Nugraha Wahyu Winarno, dukungan Danais untuk JJLS ini sudah sejalan dengan Kewenangan Istimewa DIY, yaitu kewenangan istimewa untuk membangun tata ruang DIY. Menurut Pasal 7 UUK DIY, ada lima urusan yang menjadi Kewenangan Istimewa Pemda DIY yaitu (1) urusan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, (2) urusan pembangunan kelembagaan pemerintahan, (3) urusan pembangunan kebudayaan, (4) urusan pengelolaan pertanahan, (5) urusan pembangunan tata ruang DIY.

Kusno Wibowo juga mengkonformasi bahwa Danais DIY sudah dialokasikan untuk mendukung JJLS sejak 2014 dan akan sampai selesai. Menurutnya, dengan dukungan Danais itu maka JJLS bisa selesai lebih cepat. Jika rencana semula diharapkan selesai pada 2025 maka dengan Danais diharapkan sebelum tahun itu sudah selesai.

Dari sudut pandang Paniradya Kaistimewan, menurut Nugraha Wahyu Winarno, alokasi Danais untuk percepatan proyek JJLS ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu sesuai dengan tujuan Keistimewaan DIY pada Pasal 5 UUK DIY. Dengan JJLS maka kemiskinan akan berkurang dan ketimpangan akan diatasi. JJLS akan memajukan kehidupan ekonomi di kawasan selatan DIY. Sederhananya saja, di kanan kiri jalur jalan ini pasti akan bertumbuh berbagai macam pusat kegiatan ekonomi yang menjadi peluang ekonomi masyarakat setempat.

Dalam perpektif pembangunan DIY yang lebih luas, Kusno Wibowo mengatakan bahwa JJLS ini akan terkoneksi dengan kawasan yang lebih luas. Misalnya JJLS akan diintegrasikan dengan jalan-jalan menuju Prambanan, Gayamharjo. Tawang, Ngalang. Dengan demikian wisatawan dari daerah utara bisa dengan mudah menjangkau JJLS di selatan. Semua itu jelas akan berdampak pada kemajuan ekonomi kawasan selatan DIY.

Karena didukung oleh Danais dan proyek ini juga menjadi salah satu unggulan Keistimewaan DIY maka JJLS didesain merepresentasikan Keistimewaan Yogya. Menurut Kusno, JJLS mempunyai beberapa ciri Keistimewaan DIY antara lain ada jalur *underpass* di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang menyajikan ornamen-ornamen budaya Yogyakarta. Kemudian JJLS akan melewati Jembatan Kretek yang mana terdapat monumen yang menggambarkan visi “Among Tani Dagang Layar” yang eksotik dan simbolik. JJLS juga melewati jalan “Luk 18” sepanjang 5,4 km yang jika kita melewatinya maka kita akan bisa melihat pemandangan pantai Parangtritis..

Menyentuh Langsung Rakyat

Dalam konteks Keistimewaan DIY, pengalokasian sebagian Danais untuk mendukung JJLS ini menjadi berkah langsung bagi rakyat. Kelurahan-kelurahan di sekitar JJLS akan menerima dampak positif JJLS. Kawasan sekitar JJLS akan maju. Apalagi nantinya JJLS akan terkoneksi juga dengan Jalan Tol Yogya-Solo.

Lurah Kelurahan Kepek, Kapanewon Saptosari Gunungkidul, Suhut H, SH memilih satu kata untuk menggambarkan JJLS, yaitu “wow”. Menurut Suhut, kata itulah yang secara langsung atau tidak langsung terucap dari penduduk Kelurahan Kepek sejak saat pertama mendapat informasi akan dibangunnya JJLS.

JJLS yang membelah daerah Kapanewon Saptosari langsung meningkatkan kehidupan ekonomi seluruh masyarakat setempat. Penduduk yang selama sekian lama hanya hidup dari pertanian, kini memikirkan dan mengembangkan multi usaha. Kami pun membangun *rest area* yang ramai pengunjung dan hal itu menggulirkan roda usaha masyarakat di berbagai bidang. Sementara itu nilai tanah di Saptosari sekarang naik ribuan persen.

Berbagai usaha rakyat pun berkembang. Usaha kuliner menjadi semakin kreatif karena meladeni para pengunjung dari berbagai tempat. Usaha kerajinan juga berkembang. Warga dari luar Saptosari pun melirik kawasan Saptosari untuk mengembangkan usahanya. Apalagi jalan masuk menuju pantai juga melewati Saptosari.

Suhut juga berterima kasih karena Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM bergerak cepat untuk melatih dan melakukan pendampingan. Di Kelurahan Saptosari tumbuh sekitar 60 UMKM yang sekarang berkompetisi secara sehat untuk berkarya produktif dan kreatif.

JJLS sebagai Program Pembangunan Unggulan DIY

Proyek JJLS didukung dengan Danais untuk merevitalisasi Kawasan Selatan DIY. Berikut ini adalah informasi *update* tahun 2021 dari Paniradya Kaistimewan tentang progres pembangunan JJLS.

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) mulanya merujuk pada kesepakatan 5 Gubernur yaitu Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur pada tahun 2004. Kesepakatan tersebut mempunyai maksud untuk mengembangkan potensi Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan tujuan kesepakatan bersama tersebut adalah untuk mengembangkan Pulau Jawa bagian selatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah antara lain di Bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri dan Perdagangan serta Pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing – masing wilayah. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) adalah solusi berkelanjutan terhadap upaya untuk menekan ketimpangan pembangunan wilayah selatan. JJLS dibangun membentang dari Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul sepanjang 116,07 km. JJLS merupakan infrastruktur strategis yang diharapkan mampu merevitalisasi kawasan selatan DIY menjadi lebih berdaya guna secara ekonomi, sosial, dan berkelanjutan. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa.

JJLS memiliki harapan untuk menumbuhkembangkan kawasan disekitarnya menjadi

lebih berkembang, sebagaimana diketahui tiga kabupaten yang dilewati JJLS merupakan kawasan yang rentan miskin. Adanya JJLS memberikan harapan keniscayaan terhadap pertumbuhan kawasan selatan secara lebih baik. Untuk itu, keberadaan JJLS harus dimaknai sebagai kebangkitan wilayah selatan, yang diharapkan seiring dengan pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo dan Pelabuhan Tanjung Adikarta, serta pengembangan wisata pantai selatan sepanjang pesisir Bantul & Gunungkidul. Adanya JJLS mengakibatkan kawasan selatan menjadi semakin terbuka terhadap kawasan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah bagian selatan, sehingga keberadaan jalan yang memiliki lebar 24-60 meter itu, menjadi penting untuk segera diwujudkan.

Pembiayaan pengadaan tanah JJLS, dimulai sejak 2005 merupakan kolaborasi dari APBD Pemerintah Daerah DIY dan APBD kabupaten setempat. Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini. Alokasi Dana Keistimewaan untuk pembangunan JJLS, terutama pada alokasi pengadaan tanahnya, menjadi titik ungit dalam melakukan percepatan pembangunan JJLS di DIY.

Pengadaan tanah untuk dua lajur telah selesai pada tahun 2020, sedangkan untuk empat lajur diharapkan selesai pada tahun 2025. Artinya, pada tahun 2020 kebutuhan tanah untuk 2 lajur sudah selesai terbebaskan sepanjang trase JJLS. Jalan Pantai Lintas

Utara (PANTURA) merupakan jalan nasional yang menjadi *backbone* sarana prasarana transportasi yang mempunyai trase sejajar dengan Pantai Utara. Keberadaan Jalan PANTURA menjadi salah satu faktor dalam perkembangan ekonomi yang pesat pada sisi utara di Pulau Jawa. Senada dengan hal tersebut, tujuan pembangunan JJLS mempunyai roh yang sama dengan Jalan PANTURA yaitu sebagai *backbone* sarana dan prasarana transportasi di sisi selatan Pulau Jawa, dengan fungsi jalan arteri primer dan dari segi aspek keselamatan jalan, pembebasan tanah untuk kebutuhan 4 lajur JJLS dirasa sangat diperlukan. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 pembebasan tanah untuk 4 lajur sepanjang JJLS dapat terbebaskan.

Pembangunan JJLS merupakan kolaborasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keduanya menyepakati pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing – masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah pantai selatan khususnya pembangunan jalan JJLS. Pemerintah daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, tanaman/tumbuhan/karangkitri maupun bangunan. Sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut dengan bangunan pelengkap pada lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah daerah.

Meskipun penyediaan lahan untuk 2 lajur telah terselesaikan di tahun 2020 ini, namun jaringan jalan JJLS belum tersambung sepenuhnya. Terdapat 3 titik penting yang masih belum terbangun untuk menyambungkan JJLS sesuai trase yang direncanakan. Adapun titik – titik adalah: (1) Jembatan Srandakan 3, (2) Jembatan Kretek 2, (3) Ruas Parangtritis – Giri jati (Kelok 18), (4) Jembatan Srandakan 3 berada di antara ruas Ngremen Pandansimo dan ruas Pandansimo - Samas. Jembatan ini direncanakan memiliki bentang sepanjang 240 m dan lebar 21 m (4 lajur). Jembatan ini menjadi sangat penting karena dapat menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul dan meningkatkan aksesibilitas pengguna jalan menuju Bandara YIA. Sampai dengan tahun 2020 ini, desain Jembatan Srandakan 3 masih dalam tahap *review design* oleh Kementerian PUPR.

Jembatan Kretek 2 berada di ruas Samas - Parangtritis dan melintasi Sungai Opak. Jembatan ini direncanakan memiliki bentang 139 m dan lebar jalan 14 m. Jembatan Kretek 2 mempunyai tipe *cabl stayed* dan telah mendapatkan sertifikat persetujuan pelaksanaan konstruksi oleh Menteri PUPR No. JB.02.02- Mn/2165 tanggal 31 Desember 2018. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan antara pantai Samas dan Pantai Parangtritis yang terbelah oleh keberadaan sungai Opak. Progress pembangunan jembatan Kretek 2 sampai dengan tahun 2020 ini

masih dalam tahap tender oleh Kementerian PUPR dan direncanakan terselesaikan pada tahun 2022.

Ruas Parangtritis - Girijati, atau lebih dikenal dengan kelok 18, mempunyai panjang mencapai 5,3 km. Nama Kelok 18 sendiri muncul merujuk pada lokasi pembangunan jalan yang berbukit sehingga mempunyai 18 kelokan agar dapat memenuhi persyaratan perencanaan teknis dan keselamatan jalan. Pembangunan ruas jalan Parangtritis - Girijati ini dilakukan oleh pemerintah nasional dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk proses konstruksinya.

Pelaksanaan konstruksi JJLS di DIY dilakukan secara bertahap. Pembebasan lahan selebar 30 m telah dilakukan untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur. Tahap pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 lajur dan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun 2018, dari target pembebasan tanah seluas 3.771.128 m² telah dapat dibebaskan seluas 2.969.354 m² (78.7%). Pada pembangunan konstruksi jalan, telah diselesaikan sepanjang 74,39 km (64,09%) dari target 116,07 km. Sepanjang 2,5 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot ke arah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0,5 km), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m. Status realisasi masing-masing segmen dari JJLS sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Table 1 Realisasi JJLS Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

No	Ruas	Tanah (m2)		Jalan 2 lajur (km)		Jalan 4 lajur (km)		Jembatan (Unit)	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Congot- Bugei/	300.473	114.868	19,35	17,35	19,35	2	4	1
	Ngre mang								
2	Srandakan3 (Pandansimo)	95.035	93.381	3,8	3,8	3,8	0	1	0
	Pandansimo- Samas								
3		96.442	96.442	6,28	4,58	6,28	0	0	0
4	Samas- Parangtritis	139.934	139.934	5	2,64	5	0	3	2
5	Parangtritis- Girijati	284.868	164.457	5,3	0	5,3	0	4	0
6	Girijati- Legundi	436.478	236.064	17,2	17,2	17,2	0	0	0
7	Legundi- Planjan	445.640	346.262	17,14	12,44	17,14	0	0	0

8	Planjian- Baron-Tepus	600.208	600.208	13	3,3	13	0	0	0
9	Tepus- Jerukwudel	821.892	821.892	17,9	0	17,9	0	1	0
10	Jerukwudel- Baran- Duwet	442.240	442.240	11,1	0	11,1	0,5	0	0
JUMLAH		3.663.210	3.055.748	116,1	61,31	116,1	2,5	13	3

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2020

Target penyelesaian JJLS hingga tersambung dua lajur pada bentang wilayah DIY diperkirakan dapat selesai pada tahun 2021. Pelebaran menjadi empat lajur diharapkan bisa selesai pada tahun 2023. Artinya, JJLS pada akhir tahun perencanaan jangka menengah, yakni tahun 2022 sudah bisa tersambung dari Kulon Progo hingga perbatasan Gunungkidul-Wonogiri.

Pembangunan JJLS secara berkelanjutan menunjukkan bahwa alokasi Dana Keistimewaan benar-benar digunakan untuk menyelesaikan problem keruangan, terutama terhadap upaya penyelesaian penggunaan ruang untuk JJLS dan kawasan pendukungnya. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam membangun ruas JJLS sangat kuat, terutama dalam hal pembangunannya yang perlu segera diikuti dengan penataan ruang sekitar JJLS agar tidak menjadi liar, sehingga memerlukan langkah pengelolaan kawasan sekitar JJLS yang terpadu dengan mengintegrasikan semua kepentingan secara berkelanjutan.

JJLS diharapkan sebagai pengungkit yang menegaskan bahwa kawasan selatan adalah pintu gerbang baru bagi DIY. Kawasan selatan akan menjadi daerah yang terbuka sekaligus menjadi pusat peradaban baru. JJLS adalah pengungkit perekonomian agraris sekaligus maritim yang bertopang pada perdagangan dan pariwisata, sehingga semangat *among tani dagang layar*, yang diinisiasi melalui

terbangunnya JJLS akan cepat terwujud. Masyarakat kawasan selatan yang menjadi lebih sejahtera adalah impian untuk menekan ketimpangan dan kemiskinan, melalui tersambungya JJLS dari barat hingga timur wilayah DIY atau tersambungya koridor perekonomian pada wilayah Jawa bagian selatan.

Sorotan Media

Proyek pembangunan JJLS mendapat sorotan dari berbagai media. Apalagi ketika progresnya mulai terasa signifikan. Salah satunya adalah berita dari www.krjogja.com (7 Feb 2021) yang berjudul “Butuh Alokasi Danais Rp. 484 M, Pembebasan Lahan JJLS Jalan Terus” sebagai berikut.

Pemda DIY masih terus berproses dalam pengadaan lahan untuk kebutuhan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dari dua lajur menjadi empat lajur hingga saat ini meskipun di tengah pandemi Covid-19. Kebutuhan anggaran Dana Keistimewaan (Danais) yang dibutuhkan sekitar Rp 484 miliar untuk pembebasan lahan JJLS segmen Garongan-Congot di Kulon Progo dari dua lajur menjadi empat lajur sepanjang 12 Kilometer (Km) pada 2021 ini.

“Proses pembebasan lahan untuk peningkatan lajur JJLS dari dua lajur menjadi empat lanjut terus berjalan hingga saat ini. Jadi kami harapkan program pembebasan lahan JJLS dengan total panjang 116 km

ini terus berproses dari lahan dua lajur yang sudah selesai menuju lahan empat lajur,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo kepada krjogja.com di Yogyakarta, Minggu (7/2/2021).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPESDM DIY Bambang Sugaib menyampaikan pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan JJLS tetap jalan terus sesuai tahapan yang telah dijadwalkan. Pihaknya masih terus berproses untuk membebaskan lahan JJLS dari yang sekarang dua lajur menjadi empat lajur masih melanjutkan di Kulon Progo.

“Proses pembebasan lahan dari dua lajur menjadi empat lajur dilanjutkan di Kulon Progo yang masih kurang sepanjang 12 km untuk segmen Garongan-Cogot. Kebutuhan anggaran yang diperlukan sesuai appraisal mencapai Rp 484 miliar, namun anggaran tersebut belum bisa dipenuhi tahun ini,” tandasnya.

Bambang menuturkan karena kebutuhan anggaran tidak bisa terpenuhi, maka proses pembebasan lahan dilaksanakan bertahap mulai 2021, kemudian diharapkan bisa selesai tahun depan untuk pengadaan lahan segmen Garongan-Cogot sepanjang 12 km tersebut. Sehingga pembebasan lahan untuk JJLS masih terus dilakukan dari dua lajur menuju empat lajur secara bertahap hingga sekarang.

“Kami sudah berhasil membebaskan lahan dua lajur untuk JJLS, sedangkan menuju lahan empat lajurnya masih terus berproses sesuai anggaran yang diberikan. Dari 116 km panjang JJLS, kami setidaknya telah berhasil membebaskan lahan empat lajur total 30 km dengan rincian 18 km di Gunungkidul dan 12 km di Kulon Progo,” terangnya.

Dinas PUPESDM DIY memang bertugas untuk membebaskan kebutuhan tanah atau penyediaan lahan untuk JJLS dari dua lajur menjadi empat lajur. Sedangkan pembangunan konstruksi fisik JJLS-nya dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) secara bertahap karena memang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Yang saya ketahui, pembangunan konstruksi fisik JJLS sedang berproses di segmen Jerukwudel-Baran-Duwet Gunungkidul yang telah dimulai 2019 lalu sampai sekarang. Pembangunannya dimungkinkan selesai tahun ini termasuk pembangunan fisik JJLS di segmen Legundi-Planjan Gunungkidul,” ungkap Bambang

RPJPD DIY 2005-2025

Pemda DIY mulai mengelola pembangunan JJLS sejak tahun 2005. Pembiayaan pengadaan tanah JJLS, dimulai sejak 2005 merupakan kolaborasi dari APBD Pemerintah Daerah DIY dan APBD kabupaten

setempat. Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini.

Jika JJLS DIY dimulai 2005 dan diharapkan selesai pada 2025 maka hal itu mencakup periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY periode 2005-2025. Dengan demikian, keberhasilan JJLS akan merupakan keberhasilan pencapaian visi RPJPD DIY 2005-2025 tersebut.

Untuk diskusi lebih lanjut, perlu dipahami visi-misi RPJPD DIY 2005-2025 tersebut. Berikut adalah bahan diskusi dari artikel Haryadi Baskoro, dimuat di Rubrik ANALISIS KR Harian Kedaulatan Rakyat (13 April 2021) dengan judul “Jogja 2025”.

Jogja Istimewa Televisi (JITV) yang merupakan televisi resmi Pemprov DIY akan punya program siaran baru bertajuk “Jogja 2025”. Tayangan *edutainment* berupa musik dan sharing ini bertujuan menyegarkan kembali semangat pemerintah dan masyarakat DIY untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY periode 2005-2025. Bahwa pada 2025 Yogya menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan destinasi pariwisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Visi itu dan RPJPD periode tersebut ditetapkan dan ditegaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2009.

Namun untuk mewujudkan visi besar itu perlu strategi, inovasi, dan kreativitas pembangunan yang besar pula. Sebab, untuk menjadi pusat pariwisata terkemuka di Asia Tenggara misalnya, Yogyakarta harus mampu bersaing dengan para kompetitornya seperti Georgetown, Malaka, dan Chiang May. Dalam indikator *output*, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DIY masih tertinggal jauh. Malaka dan Georgetown juga telah menjadi “UNESCO’s World Heritage City”, sementara Yogyakarta belum.

Di tengah-tengah berjalannya RPJPD DIY 2005-2025, muncul babakan baru dengan disahkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK). Penajaman karakteristik Keistimewaan DIY itu menuntut implementasi pembangunan tersendiri. Dengan demikian di DIY terdapat dua dimensi pembangunan yaitu pembangunan daerah (RPJPD) yang dikelola oleh Bappeda DIY dan pembangunan Keistimewaan DIY yang dikelola oleh lembaga khusus Paniradya Kaistimewan.

Dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi antara dua dimensi pembangunan tersebut. Apalagi UUK telah memberi energi luar biasa besar sehingga lahir visi-visi dahsyat seperti “Among Tani Dagang Layar”, “Yogyakarta Gumregah”. “Renaissance Yogyakarta”, dan “Abad Samudera Hindia”. Transformasi pemerintahan pun bergulir termasuk dengan perubahan nama-nama atau istilah-istilah kelembagaan berbasis kearifan Yogyakarta seperti

Dinas Kebudayaan ditransformasi menjadi *Kundha Kabudayan*.

Sinkronisasi dan harmonisasi sangat penting agar tidak terjadi semacam dualisme dalam pembangunan di DIY. Munculnya berbagai gagasan visioner yang inovatif-kreatif itu juga sangat perlu disistematisasi sehingga tidak terjadi kesemrawutan pola pikir. Sebab, pembangunan adalah perubahan terencana (*planned change*) yang menuntut serba keteraturan, keruntutan, dan keterukuran. Apalagi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah nasional (pusat) harus muncul satu dokumen utuh, holistik, komprehensif.

Semua itu membawa kita pada pertanyaan tentang di manakah letak Keistimewaan DIY di dalam pembangnnan DIY (RPJPD periode 2005-2025) itu? Dalam buku “Evaluasi Hasil RPJPD DIY 2005-2025” yang diterbitkan oleh Bappeda DIY tahun 2017 (hal 13), visi Yogya 2025 itu digambarkan sebagai terdiri dari dua lapis. Lapis pertama adalah “tujuan utama” (*ultimate vision*) yaitu terwujudnya masyarakat DIY yang maju, mandiri, dan sejahtera. Lapis kedua adalah “tiga pilar” yaitu visi Yogya sebagai (1) pusat pendidikan, (2) pusat kebudayaan, (3) daerah tujuan wisata – yang terkemuka di Asia Tenggara.

Bagan dua lapis visi Yogya 2025 itu sejatinya telah memberi posisi yang tepat bagi Keistimewaan DIY.

Ibarat bangunan rumah, tujuan utama (*ultimate vision*) tersebut adalah bagian atap rumah yang disangga oleh ketiga pilar itu. Adapun Keistimewaan DIY adalah bagian fondasi yang mendasari rumah. Hal itu seperti Pancasila di dalam pembangunan NKRI yang sejatinya bukan sekedar pilar tetapi dasar (fondasi). Keistimewaan DIY adalah “landasan historis”, “ruh”, “perjanjian luhur”, dan “ijab-qobul” pembangunan DIY. Kekuatan fondasi itu terletak pada 5 tujuan khusus Keistimewaan DIY (Pasal 5 UUK) dan 5 kewenangan khusus Keistimewaan DIY (Pasal 7 UUK).

Bab 9.

Tingkatkan Kesadaran Diri, Sudah Pandemi! Ayo Vaksin!

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 22 Juli 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Narasumber :

- Aris Eko Nugroho, SP., M.Si. (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)
- Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.MA (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah)
- Timotius Apriyanto (Koordinator Program Percepatan Vaksinasi KADIN DIY)

Moderator : Sandro Sandoro

Siaran *podcast* Rembag Kaistimewan yang tayang di kanal YouTube Paniradya Kaistimewan pada 22 Juli 2021 berlangsung di tengah kegawatdaruratan pandemi Covid-19 di DIY. Beberapa kali DIY memecahkan rekor kasus. Jumlah pasien yang meninggal pun sangat tinggi.

Dalam situasi demikian, di satu sisi Pemda DIY dituntut bergerak cepat dalam langkah-langkah emergensi, Dalam hal ini Keistimewaan DIY dan Dana

Keistimewaan (Danais) DIY menjadi sorotan. Namun di sisi lain Pemda DIY dalam hal ini Paniradya Kaistimewan tidak bisa serta merta mengalokasikan Danais itu untuk menangani Covid-19 karena semuanya sudah ada regulasi. Dilema inilah yang menjadikan diskusi kali ini menarik dicermati.

Tuntutan untuk Bergerak Cepat

Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.MA selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah membuka pembicaraan dengan melaporkan progres. Dalam situasi darurat pandemi ini, Dinas Koperasi dan UKM bergerak cepat karena dari kedinasan ini terkait dengan puluhan bahkan ratusan ribu UMKM. Dari aplikasi digital SiBakul Jogja saja tergabung 300.000 UMKM se-DIY. Penanganan Covid-19 perlu menysasar para pelaku UMKM karena disamping jumlah mereka signifikan juga karena keberadaan mereka yang menentukan pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho, SP., M.Si. mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM yang memelopori gerak cepat penanggulangan pandemi Covid-19. Paniradya Kaistimewan menggalang kerjasama dengan semua OPD untuk bersama-sama bergerak menangani pandemi. Karena itu, kepeloporan Dinas Koperasi dan UKM perlu diikuti oleh OPD-OPD lainnya.

Kritik dan Solusi

Timotius Apriyanto selaku Koordinator Program Percepatan Vaksinasi KADIN DIY pada kesempatan diskusi ini memberikan kritik sekaligus solusi untuk percepatan penanganan pandemi khususnya melalui vaksinasi Covid-19. Beberapa poin masukannya adalah sebagai berikut.

- Di dalam pengambilan kebijakan kita harus berbasis *need and problem*. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil akan relevan.
- Tentang upaya percepatan vaksinasi, kita jangan terpaku pada cara-cara lama yang rumit, misalnya untuk ikut vaksin harus ada KTP yang sesuai dengan lokasi pelayanan vaksinasi. Padahal virus dan lalu lintas kependudukan tidak dibatasi oleh teritorial. Karena itu, KADIN DIY memberikan solusi untuk melayani vaksin tanpa mensyaratkan KTP dan itu terbukti menjadi solusi.
- Penanganan pandemi Covid-19 yang serba darurat ini harus dihadapi dengan debirokratisasi pelayanan publik. Keselamatan rakyat harus diutamakan, birokrasi berpotensi memperlamban gerakan yang seharusnya cepat.
- Untuk melakukan percepatan vaksinasi perlu dilancarkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan elemen-elemen masyarakat yang mau

bergerak dinamis, dalam hal ini salah satunya adalah KADIN DIY. Pihak KADIN tidak menggantikan peran Pemda namun menjadi *supporting system* atau mitra strategis dalam hal SDM (Sumber Daya Manusia) dan pelaksanaan (eksekusi) kegiatan vaksinasi. Kolaborasi KADIN DIY dengan Pemda DIY itu sendiri terbukti efektif. Pada Tahap I (20-24 Juni 2021) sebanyak 28.978 orang berhasil divaksin. Vaksinasi dilakukan di Jogja Expo Center (22.507 orang divaksin) dan di 4 pabrik (6.471 orang karyawan divaksin). Hal itu membuktikan bahwa resistensi masyarakat terhadap vaksin dapat diatasi. Percepatan ini membuka *mindset* publik untuk tidak antivaksin.

- Percepatan vaksinasi harus dilandasi dengan penguatan kesadaran masyarakat akan vaksinasi itu sendiri.
- Dari keberhasilan vaksinasi yang dilakukan oleh KADIN DIY bekerjasama dengan Pemda DIY itu disimpulkan bahwa sangat penting untuk mendorong tumbuhnya pengengaruh (*influencer*) yang terus menerus mensosialisasi dan memotivasi masyarakat untuk divaksin.
- Dalam penanganan pandemi Covid-19 kita perlu membuat peta jalan (*road map*) yang strategis sehingga progres yang ada serba terukur, peta jalan itu menolong para pengambil kebijakan untuk

selalu mengevaluasi perkembangan dan tidak ragu melakukan terobosan-terobosan.

- Kolaborasi untuk percepatan vaksinasi harus terus digalang. Dalam konteks Keistimewaan DIY perlu digalang kerjasama Pentahelix 5K (Kaprajan, Kraton, Kampus, Kampung, Komunitas).
- Tidak perlu takut kekurangan vaksin. Banyak pihak yang siap mendukung dengan stok vaksin.

Sinergi dan Kolaborasi

Menanggapi kritik dan solusi itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nurkyatsiwi merespon positif dengan menekankan pentingnya kolaborasi, kerja sama antara KADIN dan Dinas Koperasi dan UKM misalnya, sangat strategis. Dinas mempunyai data tentang para pelaku UMKM karena sudah mengaktivasi sistem digital SiBakul Jogja. Sementara KADIN mampu menyediakan SDM dan mengeksekusi kegiatannya.

Kerja sama itu digambarkan sebagai strategi “menyisir dan menysar”. Dinas Koperasi dan UKM dengan sistem digitalnya menyisir data para pelaku UMKM dan para pekerja yang perlu divaksinasi. Kemudian bersama dengan KADIN DIY, kita menysar sasaran seperti halnya melakukan vaksinasi di beberapa pabrik. Kita tidak menunggu masyarakat datang, tetapi kita yang pro-aktif mendatangi mereka di tempat-tempat kerja mereka.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan, Aris Eko Nugroho menanggapi positif upaya percepatan vaksinasi itu. Aris mengatakan bahwa niat dan langkah cepat pemerintah daerah sering kali terbentur oleh regulasi, Sebagai contoh, dari Januari sampai Juni 2021 Danais belum dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 (vaksinasi) karena belum ada regulasi pendukungnya. Pemerintah perlu meneliti supaya apa yang dikakukan tidak menyalahi aturan. Harus ada dokumen yang lengkap dulu dan baru dilaksanakan.

Justeru karena keterbatasan itulah maka menurut Aris kolaborasi itu sangat penting. Paniradya Kaistimean misalnya lebih berfokus pada perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan di tingkat OPD-OPD yang ada. Kemudian perlu menggalang kerja sama secara lebih luas agar percepatan semakin kuat.

“Danais Migunani Tumrap ing Rakyat”

Diskusi tentang penggunaan Danais untuk mendukung penanggulangan pandemi Covid-19 sebenarnya sudah menghangat di ruang publik sejak pandemi itu semakin parah di DIY. Empat hari sebelum *podcast* ini, Haryadi Baskoro dan Bahrul Fauzi Rosyidi memberikan urian pemikiran mengenai hal itu, dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat edisi 16 Juli 2021 dengan judul “Danais Migunani Tumrap ing Rakyat” sebagai berikut.

Kementerian Keuangan RI sudah memberi surat arahan supaya Dana Keistimewaan (Danais) bisa digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 di DIY. Surat bernomor S-121/PK/2021 tertanggal 10 Juli 2021 itu dimulai dengan menegaskan kembali bahwa Danais adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa DIY. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUK DIY, Kewenangan Istimewa itu mencakup lima urusan (1) pengisian jabatan gubernur dan wakilnya, (2) pengembangan kelembagaan pemerintah DIY, (3) kebudayaan, (4) pertanahan, (5) tata ruang. Artinya, dalam kondisi normal Danais memang dialokasikan untuk mengelola kelima urusan khusus itu.

Karena itu dapat dipahami jika Pemda DIY cukup berhati-hati dalam menggunakan dana itu sesuai amanat UUK. Semua pengalokasian harus tepat sasaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Kecuali itu harus serba terukur, sehingga dapat dievaluasi bagaimana *output*, *outcome*, dan *impact* pada pembangunan (implementasi) Keistimewaan DIY.

Adapun situasi dan kondisi DIY sekarang berada dalam masa darurat. Kasus Covid-19 DIY meroket, sementara fasilitas kesehatan yang ada tertekan semakin berat (KR, 14/7/2021). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan mengatakan bahwa DKI

Jakarta dan DIY adalah dua provinsi yang akan mengalami masa berat jika penyebaran Covid-19 terus memburuk (*tempo.co*, 13/7/2021). Pandemi menciptakan darurat kesehatan dan darurat kesejahteraan. Mereka yang kini berada di garis kemiskinan bisa langsung terjun bebas menjadi kelompok miskin. Jumlah mereka tak sedikit, sekitar 70 juta jiwa (Suroto, 2021).

Darurat kesehatan harus diselesaikan lebih dulu, baru kemudian menangani darurat ekonomi. Ibarat ember yang berlubang, seberapa pun banyaknya air dipasok akan bocor keluar. Demikianlah ember ekonomi rakyat, bantuan dana diberikan akan cepat lenyap manakala terjadi kebocoran di bidang kesehatan. Derita sakit dan teror maut Covid-19 adalah lobang kebocoran yang kian hari kian menganga. Fokus kita haruslah menambal kebocoran kesehatan rakyat itu terlebih dahulu untuk kemudian memulihkan kapasitas ekonomi rakyat.

Pasal 5 ayat (1) mendaftarkan lima tujuan pengaturan Keistimewaan DIY. Fokus kita dalam masa darurat ini adalah tujuan nomor dua yaitu tujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Caranya sudah dijelaskan pada ayat (3) yaitu diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat. Kepentingan rakyat sekarang yang jelas di depan mata adalah mendapatkan

penanganan kesehatan hingga bebas dari cobaan Covid-19.

Benar bahwa Keistimewaan DIY berbasis pada kebudayaannya sehingga menurut rencana semula Danais 2021 paling banyak untuk kebudayaan, baru kemudian disusul untuk tata ruang, kelembagaan, dan pertanahan. Tetapi, ember kebudayaan Jogja sekarang sedang mengalami kebocoran akibat dua lubang besar masalah kesehatan dan kesejahteraan (ekonomi). Realokasi Danais untuk urusan Covid-19 bukan berarti mengabaikan kebudayaan namun justru dalam rangka membangunnya dengan menangani kebocoran-kebocoran itu.

Keistimewaan DIY sejatinya lebih besar dari sebatas urusan regulasi dan administrasi. Dari sejak bergabungnya Nagari Yogya ke dalam RI pada 1945 hingga lahirnya UUK DIY pada 2012, posisi tawar DIY sangat besar. Soal dana, sejarah mencatat bahwa Yogyakarta yang membiayai pemerintahan RI di masa revolusi (1946-1949). Ketika Ibukota RI kembali ke Jakarta, Ngarsa Dalem Sultan HB IX menyumbang 6 juta Gulden.

Kehati-hatian itu harus, transparan dan akuntabel itu mutlak, akurasi dalam alokasi adalah harga mati. Tetapi di hadapan Pemerintah Pusat janganlah *wong Yogya* menjadi *ewuh pakewuh* atau sebaliknya, mengemis dan menjilat. Inovasi pembangunan

membutuhkan pola pikir *out of the box*, langkah super cepat pro-rakyat, dan *sense of emergency* yang tinggi. Menangani kondisi darurat adalah bagian integral dari kewenangan dalam lima urusan Keistimewaan DIY. Dengan cara itu, pengelolaan lima urusan Keistimewaan DIY itu akan benar-benar *migunani tumrap ing* rakyat yang kini semakin menderita.

Prestasi Yogya di Masa Pandemi

Tetapi, meskipun DIY sempat begitu terpuruk dalam pandemi Covid-19 dan banyak dikritik karena terasa lamban dalam bertindak, ada pula prestasi dalam percepatan penanganan pandemi itu. Keberhasilan percepatan yang dikakukan di Puskesmas Mlati II Kabupaten Sleman di bawah kepemimpinan dr. V. Evita Setianingrum, MPH diakui secara nasional. Karena itu pulalah dokter yang juga dosen tamu di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada ini mendapat penghargaan sebagai “Tenaga Kesehatan Teladan Terbaik I Kategori Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2021”

Berikut ini adalah uraian konsep percepatan penanganan Covid-19 yang membawa dr. Evita meraih prestasi yang membanggakaniyu.

“Candak Mas Covid” Strategi Percepatan Penanganam Covid-19

***Good Practices* Puskesmas Mlati II**

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS CoV-2). SARS CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. (3)

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020,

WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.
(3)

Kementerian Kesehatan menegaskan, bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memiliki peran saat pandemi yaitu melakukan pencegahan, deteksi, dan respons. Dalam pengendalian pandemi covid-19 puskesmas memiliki peran yang besar sebagai gerbang utama pelayanan covid-19. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam melakukan 3T *testing, tracing, dan treatment*. Puskesmas memiliki peran aktif dalam penelusuran kontak erat pasien covid-19, selain itu puskesmas juga berperan sebagai pemantau bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun melakukan evakuasi pada kasus yang berat yang membutuhkan penanganan khusus di Rumah sakit. (7)

Puskesmas Mlati II telah melakukan inovasi dalam upaya percepatan penanganan kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terutama di Kabupaten Sleman, mengingat kasus di Kabupaten Sleman selalu menduduki peringkat tertinggi di DIY sejak terjadinya Pandemi Covid-19. Tercatat sebanyak 154.556 per tanggal 26 September 2021 (Sumber pusat informasi data Covid-19 Kabupaten Sleman) Langkah strategis untuk percepatan penanganan Covid-19 dilaksanakan melalui inovasi “Candak Mas Covid”, yang merupakan singkatan dari cari dan kendalikan masalah Covid-19. Candak Mas Covid

dilakukan dengan “SAMI MOCO” (surveilans aktif mencari informasi, menemukan dan obati kasus Covid-19), layanan *hotline* Covid-19 yang menyediakan informasi perkembangan kasus harian maupun pemetaan zonasi PPKM mikro setiap minggu. Upaya promosi kesehatan juga dilakukan melalui “Cita Mas Jajar” (cuci tangan, masker dan jaga jarak).(5)

Pengendalian Covid-19 di puskesmas juga dilakukan untuk mencegah penularan dari sesama tenaga kesehatan atau antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang mengunjungi puskesmas. Penerapan perlindungan tenaga kesehatan oleh puskesmas dilakukan melalui 5 cara, yaitu: 1) secara administrasi dengan membatasi jam layanan, skrining petugas secara berkala dan membentuk tim pengendalian Covid-19, terdiri dari Tim Swab, Tim Evakuasi, Tim Surveilans, Tim Pembina Wilayah 2) modifikasi layanan dengan mengubah layanan yang mendukung penerapan protokol kesehatan, membuat poli suspect Covid/poli infeksi dan memisahkan area pelayanan infeksius dan non infeksius. 3) eliminasi, yaitu dengan meniadakan untuk sementara layanan di poli gigi yang menimbulkan *aerosol* dan tidak memperbolehkan pasien rawat inap dikunjungi, 4) substitusi dengan memanfaatkan teknologi di dalam pelayanan kesehatan, misalnya pendaftaran melalui WhatsApp dan layanan inovatif untuk ibu hamil dan pencegahan *stunting* melalui program “Mami Cantik”

(manfaatkan media informasi *chatting* untuk pemantauan kehamilan dan kelahiran) dan “seribu *chatting*” (sebarikan informasi melalui *chatting* untuk mencegah *stunting*), serta menyediakan layanan Telekonsultasi dengan sebutan “Teko Pasar Cebongan” (Telekonsultasi, pasien nggak repot, berobat tanpa antrian), edukasi secara virtual melalui media sosial maupun whatsapp grup serta 5) puskesmas menjamin kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga Kesehatan, membuat ruangan untuk menggunakan dan melepas APD, serta area dekontaminasi petugas. (1,2,4,8)

Pada Bulan Juni 2020, FKMK UGM telah berhasil membuat alat Rapid Antibodi SARS Cov-2 karya anak negeri yaitu RI-GHA. Puskesmas Mlati II mendapat kehormatan untuk bisa berperan dalam implementasi deteksi dini di komunitas dan sebagai tempat penyelenggaraan peresmian RI-GHA oleh Rektor UGM dan Bupati Sleman. Alat ini sangat bermanfaat pada awal pandemi untuk mendeteksi secara dini adanya kasus penularan di masyarakat. (6)

Praktek nyata di lapangan dalam pemanfaatan RI-GHA adalah ketika terjadi penularan kasus di Pasar Cebongan yaitu sebuah pasar tradisional di wilayah kerja Puskesmas Mlati II, sekitar bulan September 2020. Saat itu kami melakukan *tracing* dan *testing* secara masif kepada pedagang pasar sekitar 300 orang sehingga dapat segera dilakukan antisipasi

untuk memutus rantai penularan Covid-19 di lingkungan pasar dan keluarga pedagang.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Dalam perpanjangan PPKM Mikro ini, puskesmas diposisikan sebagai peran sentral. Bersama lintas sektor kami berhasil mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Contohnya penanganan kasus Covid-19 di Pondok Pesantren Bumi Cendekia yang terletak di wilayah kerja puskesmas Mlati II, Desa Tirtoadi. Dengan gerak cepat satgas dan *tracing* serta *testing* yang masif segera terdeteksi adanya kasus Covid-19 di pondok pesantren yang jumlahnya 97 orang dari total penghuni pondok sebanyak 132 orang.(10) Evakuasi dilakukan dengan berkolaborasi antara TNI, POLRI, dan pihak pemerintah desa yang di koordinasikan langsung oleh Camat Mlati. Evakuasi ini di laksanakan sesuai dengan arahan dari Menkopolhukam terkait dengan tingginya kasus Covid-19 di DIY pada bulan Juli 2021, untuk membentuk Shelter Isolasi Terpusat (Isoter) di beberapa bangunan milik pemerintah.(9)

Percepatan penanganan kasus Covid-19 juga dilakukan dengan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, TNI, POLRI dan

pihak terkait. Percepatan Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara massal di balai desa/kelurahan, di sekolah, jadwal reguler di puskesmas maupun secara *door to door* terutama bagi kelompok rentan dan difabel serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) karena kelompok ini merupakan prioritas dalam vaksinasi Covid-19. Berdasarkan penelitian Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan bahwa ODGJ memiliki resiko 7 kali terpapar Covid-19 dan kemudian menularkannya. Vaksinasi Covid-19 pada ODGJ akan menurunkan angka kesakitan dan kematian. (11)

Selama masa Pandemi Covid-19, seluruh karyawan puskesmas tidak pernah libur. Kami bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu demi melaksanakan tugas baik *tracing*, pemantauan pasien yang isolasi mandiri di rumah, evakuasi pasien ke shelter maupun ke rumah sakit. Untuk percepatan vaksinasi, kegiatan vaksin masal juga dilaksanakan pada Hari Minggu atau tanggal merah. Seluruh tenaga dan pikiran kami dedikasikan untuk percepatan penanganan Covid-19. Kendala yang kami hadapi (tenaga kesehatan banyak yang terkonfirmasi Covid-19) tidak mematahkan semangat sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Sebagai dokter fungsional yang diberikan tugas tambahan menjadi Kepala Puskesmas Mlati II peran yang dilakukan adalah 1)Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektor, tergabung dalam Satgas

Covid Kecamatan 2)Membuat kebijakan dalam modifikasi pelayanan disesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru, yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mlati II No. 188/005 tentang Tim Penanganan Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Mlati II, SK No. 188/009 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Poli Infeksi, Telekonsultasi dan tempat pengambilan swab, serta SK No. 188/08 tentang Tim Vaksinasi Covid-19 3)Terlibat langsung dalam penyuluhan kepada masyarakat 4)Ikut dalam kegiatan 3T dan vaksinasi.

Inovasi ini telah memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat yaitu menurunnya kasus Covid-19 dari **1221** kasus pada bulan Juli menjadi **24** kasus pada bulan September. Meningkatnya cakupan vaksinasi Covid-19 di masyarakat dari **29%** pada bulan Juni 2021 menjadi **67,21%** pertanggal 27 September 2021.(12) Peran aktif lintas sektor dalam penanganan jenazah Covid di masyarakat oleh tim kelurahan, bantuan jaminan hidup bagi pasien, bantuan obat-obatan dari TNI dan bantuan vaksin dari POLRI.(10) Inovasi “Candak Mas Covid” terbukti berhasil memutus rantai penularan Covid-19 dengan semangat petugas yang profesional dan dukungan lintas sektor yang berkomitmen tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pedoman Manajemen Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2016
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
4. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid -19, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kememterian Kesehatan 2020
5. Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID-19 Dalam 107 Bahasa Daerah Badan Nasional Penanganan Bencana 2020
6. <http://www.slemankab.go.id/16804/launching-uji-kelayakan-pengguna-test-ri-gha-19-oleh-bupati-sleman.slm>,
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/278486/pemkab-sleman-sambut-baik-keberadaan-righa-19>)

7. <https://www.liputan6.com/health/read/4471764/menkes-peran-puskesmas-dalam-penanganan-covid-19-di-sisi-hulu-sangat-penting>
8. <https://chbp.fk.ugm.ac.id/2021/04/28/press-release-asm-peran-strategis-puskesmas-dalam-membangun-literasi-publik-dan-tenaga-kesehatan-selama-pandemi-covid-19/>
9. <https://mediacenter.slemankab.go.id/pasien-covid-19-lebih-disarankan-untuk-jalani-isolasi-terpusat/>
10. <https://yogya.inews.id/berita/84-santri-ponpes-bumi-cendekia-sleman-positif-covid-19>

Biodata dr. V. Evita Setianingrum, MPH

- Nama: dr. V. Evita Setianingrum, MPH
- Tgl lahir : 25 Mei 1976
- Alamat rumah : Gancangan V, Sidomulyo, Godean, Sleman
- Penghargaan yang pernah diterima :
 1. Certificate of Participation with oral Presentation in The Seventh Postgraduate Forum, “Health System and Policy for The ASEAN Economic Shared Vision and Goals” Signed by Professor Supasit Pannarunothai, M.D.Ph.D, Dean of Faculty of Medicine Naresuan University
 2. Penghargaan dari dekan Fakultas kedokteran UGM sebagai lulusan Pasca sarjana S2 dengan Predikat *Cumlaude* pada Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
 3. Dokter Teladan Kabupaten Sleman Tahun 2019
 4. Dokter Teladan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
 5. Tenaga Kesehatan Teladan Terbaik I Kategori Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2021

Bab 10.

Arah Strategi Perencanaan dan Kebijakan Dana Keistimewaan

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 28 Oktober 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya Kaistimewan

Narasumber :

- GKR Mangkubumi (Parampara Praja DIY)
- Aris Eko Nugroho, SP, M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)
- Eko Suwanto, ST., M.Si (Ketua Komisi A DPRD Provinsi DIY)

Moderator : Ninda Fillasputri

Pandemi Covid-19 menuntut adaptasi dalam banyak kebijakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Adaptasi itu juga terjadi di DIY, misalnya perubahan atau pembaruan kebijakan untuk mengalokasikan sebagian Dana Keistimewaan (Danais) DIY untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19,

Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) yang sudah diterjemahkan ke dalam Peraturan-peraturan Daerah

Istimewa (Perdais-Perdais) juga memberikan arah strategi perencanaan dan kebijakan Dana Keistimewaan (Danais) tersebut.

Kebudayaan dan Kesejahteraan

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho, SP, M.Si membuka pembicaraan dengan menekankan bahwa berbicara soal Keistimewaan DIY, sangat penting untuk memperhatikan tentang tujuan Keistimewaan dan Kewenangan Istimewa sebagaimana diamanatkan dalam UUK.

Dari masalah “tujuan” dan “kewenangan” itu, Keistimewaan DIY adalah urusan kebudayaan dan kesejahteraan, Tentang tujuan pengaturan Keistimewaan DIY, pada Pasal 5 UUK dibebankan ada 5 tujuan. Namun tujuan yang menjadi penting bagi masyarakat luas adalah tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman. Tujuan inilah yang sekarang dan ke depan menjadi fokus kita.

Sementara itu, dari kelima Kewenangan Istimewa sebagaimana dibebankan dalam Pasal 7 UUK, kewenangan di dalam urusan kebudayaan menjadi perhatian utama. Sebab, Keistimewaan Kebudayaan DIY itu adalah ruh-nya DIY. Keempat urusan yang lain sebenarnya juga berbasis pada kebudayaan asli DIY. Urusan tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah masalah kebudayaan berbasis kepemimpinan Kraton Kasultanan dan Kadipaten

Pakualaman, Urusan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah yang khas juga berbasis kebudayaan, seperti sekarang diadakan perubahan nomenklatur-nomenklatur kelembagaan yang berbasis pada Bahasa Jawa. Urusan soal pertanahan juga berkaitan langsung dengan kebudayaan Kraton. Demikian juga dengan urusan pengelolaan tata ruang, juga berbasis budaya asli Yogyakarta.

Pembangunan kebudayaan DIY itu luas, bukan hanya soal seni pertunjukan atau perhelatan kesenian semata-mata. Dalam Perdais telah dijabarkan tentang obyek-obyek kebudayaan yang sangat luas, dari sistem nilai-nilai hingga teknologi. Kebudayaan Yogyakarta menjadi ciri keistimewaan DIY.

Menurut GKR Mangkubumi, Keistimewaan DIY itu lebih luas dan dalam daripada sekadar urusan Danais. Artinya, jangan mengidentikkan Keistimewaan DIY sama dengan Danais DIY.

Karena sebagian masyarakat hanya memikirkan “dana” maka pada saat mereka berkarya untuk Keistimewaan DIY, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mendapatkan Danais itu. Orientasi kita bukan berkarya untuk memajukan peradaban tetapi bekerja untuk mendapatkan Danais.

Karena orientasinya Danais maka semangat berkarya budaya justru sering menjadi merosot. Dulu sebelum ada Danais, masyarakat desa secara swadaya

dan gotong royong menggalakan tradisi seperti halnya “merti desa”. Sekarang kegiatan budaya di desa baru akan marak manakala ada Danais dikucurkan. Kebudayaan menjadi lesu jika tidak ada suntikan dana.

Prinsipnya, pengutamaan pada pembangunan kebudayaan akan mendatangkan kesejahteraan. Namun jika kita hanya mengejar kesejahteraan maka kebudayaan bisa terabaikan atau kita malah mengkomodifikasi kebudayaan itu. Sebagai contoh adalah soal pariwisata. Jika kita hanya mengejar keuntungan maka pengembangan pariwisata bisa mengabaikan kebudayaan atau menjual kebudayaan demi keuntungan. Namun jika kita serius dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan maka daerah kita, desa kita, kota kita akan menjadi destinasi wisata yang menguntungkan. Kebudayaan maju, pariwisata bangkit, dan masyarakat sejahtera.

Target besar DIY menurut GKR Mangku adalah menjadikan Yogyakarta sebagai *the world heritage* yang diakui oleh dunia. Hal itu bukan hanya urusan melestarikan dan memperkuat kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan juga berarti bagaimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai, tradisi, dan berkarya budaya itu sendiri.

Keistimewaan dan Danais

GKR Mangkunumi mengisyaratkan Danais itu seperti oli bagi mobil. Bensin atau bahan bakarnya adalah

semangat rakyat untuk hidup dan berkarya peradaban. Adapun Danais yang jumlahnya tidak banyak itu berfungsi mempercepat jalannya mobil.

Paniradya Pati Aris Eko Nugroho mengatakan bahwa secara kuantitas Danais itu hanya bagian kecil dibanding APBD. Karena itu Pemerintah Daerah DIY harus cermat dalam menggunakannya, bidang pembangunan mana yang harus didanai dengan Danais dan bidang pembangunan mana yang didanai dengan APBD. Untuk itu pemerintah daerah harus mengikuti petunjuk regulasi yang sudah mengaturnya.

Aris menekankan bahwa “ruh Keistimewaan DIY” adalah kebudayaan. Dalam konteks pembangunan Keistimewaan DIY, urusan kebudayaan adalah kembangnya Keistimewaan DIY. Karena itu pula pembangunan Keistimewaan DIY harus selalu selaras dengan visi-misi Ngarso Dalem Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin kultural.

Aspirasi Rakyat

Sedangkan pandangan dari Eko Suwanto, ST., M.Si selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi DIY menunjukkan konsistensi dan komitmen untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Namun nampak dalam perspektifnya, suara rakyat itu mendukung penuh Keistimewaan DIY dan kepemimpinan di dalam Keistimewaaan DIY.

Beberapa poin aspirasi rakyat yang disuarakan adalah sebagai berikut:

- Penggunaan Danais harus dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan Keistimewaan DIY seperti yang digariskan dalam UUK khususnya Pasal 5 yaitu (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis, (2) mewujudkan kesejahteraan, (3) mewujudkan tatanan sosial dan pemerintahan berbasis kebhinnekatunggalikaan, (4) mewujudkan pemerintahan yang baik, (5) melembagakan peran kasultanan dan kadipaten dalam membangun kebudayaan Yogyakarta. Tujuan-tujuan ini berpihak pada kepentingan rakyat.
- Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mendorong penggunaan Danais untuk kepentingan rakyat supaya memajukan kesejahteraan mereka. Pandemi telah menyebabkan penghasilan turun, orang kehilangan pekerjaan, dan daya beli turun. Danais perlu dikerahkan untuk pemulihan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
- Untuk bisa mengelola Danais untuk kepentingan rakyat maka perlu dilakukan beberapa konsolidasi yaitu (1) konsolidasi perundang-undangan, yaitu bagaimana mensinkronkan antara UUK, UU, Perda, Perdais, dan berbagai regulasi yang sedemikian sehingga mendukung penggunaan Danais untuk kesejahteraan masyarakat, (2) konsolidasi Sumber Daya Manusia, (3) konsolidasi kelembagaan, (4) konsolidasi anggaran.

- Kebijakan Gubernur DIY Sultan HB X sejak tahun 2018 sudah sangat bagus, yaitu memberikan kewenangan pada desa dan kelurahan untuk menggunakan Danais untuk kesejahteraan rakyat. Peraturan Gubernur yang diterbitkan menjadi payung hukum yang kuat. Danais tidak berhenti hanya di level OPD tetapi sekarang juga ada di desa dan kelurahan.
- Menindaklanjuti kebijakan yang pro-rakyat desa itu, di desa atau kelurahan harus segera diperkuat kemampuan SDM atau kelembagaan untuk merencanakan pembangunan desa. Hal itu tidak mudah mengingat perencanaan pembangunan di desa harus pula selaras dengan perencanaan pembangunan di DIY (RPJMD, RPJPD). Tetapi jika perencanaan pembangunan di level desa itu berhasil maka desa akan menjadi pusat peradaban, pusat perekonomian, dan pusat pelayanan publik.
- Musrenbang khusus Keistimewaan DIY perlu dikembangkan agar masyarakat selalu diajak berdiskusi, diserap aspirasinya, dan disalurkan keinginan dan harapannya. Dengan demikian Keistimewaan DIY akan berguna bagi masyarakat luas. Meskipun implementasinya belum sempurna, namun jika masyarakat selalu diajak untuk berkolaborasi maka masyarakat tidak hanya bisa memprotes tetapi ikut berjuang untuk perbaikan.

“Danais Kebudayaan”

Dari diskusi di atas, disimpulkan bahwa Dana Keistimewaan DIY itu harus difokuskan untuk kebudayaan dan kesejahteraan. Pembangunan kebudayaan adalah visi dan ruh Keistimewaan DIY. Pembangunan untuk kesejahteraan adalah kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pembangunan kebudayaan dan kesejahteraan harus integral, seperti ditekankan GKR Mangkubumi, pembangunan kebudayaan yang serius akan berdampak pada kesejahteraan. Namun jika dibalik maka belum tentu kebudayaan terbangun. Jika kita hanya memperjuangkan kesejahteraan dengan cara-cara yang semata-mata “ekonomi” maka kebudayaan justru akan terabaikan, terpinggirkan, dan terbuang,

Keistimewaaan Yogya berbasis pembangunan kebudayaan dan kesejahteraan merupakan bahan diskusi berkelanjutan. Ruang diskusi terbuka bagi semua pihak untuk berkontribusi. Berikut adalah salah satu aspirasi yang disampaikan oleh Haryadi Baskoro dalam Rubrik ANALISIS KR Harian Kedaulatan Rakyat (25 Januari 2018).

Kehadiran Peraturan Daerah Istimewa bidang kebudayaan (Perdais Kebudayaan) DIY yang mengatur budaya dalam arti luas seperti industri, kuliner, pertanian, pariwisata, dan sebagainya sangat mungkin berperan atau ikut andil dalam mengentaskan

kemiskinan di DIY (KR, 16/1/2018, hal 9). Semoga Danais (Dana Keistimewaan DIY) yang untuk tahun ini tembus Rp 1 miliar dapat *migunani tumraping liyan* (bermanfaat bagi orang banyak),

Penggunaan Danais untuk sektor seni dan budaya menjadi sorotan karena porsi alokasinya besar sekali. Untuk 2017 saja, Danais sebesar Rp 800 M dibagi untuk bidang kebudayaan sebesar Rp 439 M. Sementara untuk bidang tata ruang Rp 325,8 M, bidang pertanahan Rp 17,1 M, dan bidang kelembagaan Rp 14,2 M (KR, 15/9/2017). Persoalannya adalah sejauh mana sokongan untuk kebudayaan itu berdampak pada kesejahteraan.

Danais sejauh ini memang telah banyak menopang dan mengakselerasi pembangunan kebudayaan dalam arti seni dan budaya. Menurut informasi Bappeda Kota Yogya, pada tahun anggaran 2016 yang lalu sebesar 77 persen (Rp 4 M) dari total Danais di Kota Yogya dipakai untuk urusan kebudayaan. Sisanya untuk urusan pertamahan (Rp 800 juta) dan urusan tata ruang (Rp 370 juta). Bidang kebudayaan yang didanai adalah urusan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya sebesar Rp 1,7 M, aktualisasi kesenian tradisional dan kontemporer sebesar Rp 1,04 M, serta kegiatan promosi dan publikasi seni budaya sebesar Rp 1,17 M. Sebelumnya pada 2015 ada 200-an agenda seni-budaya di Kabupaten Bantul yang ditopang Danais. Pengembangan seni yang berkualitas memang

membutuhkan dana sehingga injeksi dari Danais sangat berarti.

Alokasi besar untuk sektor seni-budaya kemudian menuai kritik karena dinilai tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Padahal, problem utama Yogya adalah masalah kesejahteraan, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan penghasilan, kenaikan upah minimum, dan pengurangan jurang antara si kaya dan si miskin. Muncul evaluasi kritis bahwa pelaksanaan Keistimewaaan selama 5 tahun ini (2012-2017) belum membumi. Ditambah lagi tantangan bahwa Yogya merupakan daerah yang rawan bencana alam, kerentanan ekonomi semestinya jadi perhatian utama.

Dr Suranto pernah menyarankan supaya dilakukan terobosan dalam penggunaan Danais (*KR*, 15/92017). Menurutya, soal Danais untuk kesejahteraan bisa masuk lewat sektor kebudayaan. Caranya adalah jangan mempersempit urusan kebudayaan hanya pada masalah seni dan benda materi saja. Pemikiran tersebut mengingatkan kita bahwa kebudayaan itu sendiri luas cakupannya. Kesenian hanyalah salah satu bidang atau sektor saja.

Sejatinya Danais Kebudayaan justru menjadi pintu masuk untuk mendukung pembangunan di banyak sektor. Sebab, secara antropologis kebudayaan merupakan karya, rasa, dan cipta manusia yang

mencakup tujuh unsur universal: (1) sistem pengetahuan, (2) bahasa, (3) sistem kepercayaan, (4) sistem mata pencaharian, (5) sistem sosial dan kekerabatan, (6) sistem peralatan dan teknologi, dan (7) kesenian. Jadi tidak salah jika Danais diarahkan untuk mendukung misalnya pengembangan industri pariwisata atau kewirausahaan kuliner. Dengan demikian pembangunan budaya berdampak langsung pada kesejahteraan.

Secara antropologis, kebudayaan dalam suatu masyarakat akan tumbuh dalam sub-sub kultur yang berbasis komunitas. Kampung dan desa adalah contoh-contoh komunitas yang sebagai sebuah entitas budaya juga mengandung ketujuh unsur di atas. Karena itu jika Danais diterapkan untuk mendukung pembangunan “desa budaya” dan “desa wisata” harus dalam rangka pembangunan komunitas (*community development*) yang komprehensif yang salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah peningkatan kesejahteraan komunitas tersebut.

Kecuali itu, kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan tidak bisa dibangun secara terpisah. Sebagai unsur kebudayaan, kesenian punya fungsi untuk mendukung unsur-unsur kebudayaan lainnya. Kesenian punya fungsi memperkuat sistem kepercayaan. Kesenian punya fungsi memperkokoh sistem sosial. Kesenian tentunya juga punya fungsi ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat. Alokasi

Danais untuk kesenian justru harus diperkuat asalkan pembangunan sektor kesenian berkorelasi dan berdampak pada multi sektor terutama ekonomi. Program-program kesenian harus berdampak pada kemajuan ekonomi rakyat.

Kiranya Perdais Kebudayaan memperkuat komitmen kita pada “trilogi pembangunan” yang mencakup sinergi antara “Keistimewaan”, “Kebudayaan”, dan “Kesejahteraan”. Di sinilah benang merah antara idealisme dan pragmatisme. Keistimewaan DIY sekali-kali jangan meninggalkan sejarah dan filosofi. Tetapi fokus pada kebudayaan justru menggiring implementasi keistimewaan itu sedemikian rupa sehingga berdampak pada kesejahteraan.

Bab 11.

Kalurahan Maritim Menyongsong Abad Samudra Hindia

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 9 September 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Narasumber :

- Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)
- Suwardi, S.Pd (Lurah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul)
- Ir. Bayu Mukti Sasongko, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY)

Moderator : Ninda Fillasputri

Pembangunan Nasional periode 2015-2019 mengarah pada penguatan Indonesia sebagai negara maritim. Selaras dengan itu, visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2017-2022 adalah “Menyongsong Abad Samudera Hindia”.

Menterjemahkan Visi Abad Samudera

Aris Eko Nugroho, SP., M.Si selaku Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY menekankan bahwa visi Gubernur DIY Sultan HB X itu harus diwujudkan. Visi itu mengandung tujuan agar pembangunan di kawasan selatan DIY harus menjadi prioritas karena selama ini masih lemah. Adapun di kawasan pesisir Laut Selatan DIY itu sendiri terdapat 34 kelurahan, ada 11 kecamatan, mencakup di Kabupaten Kulon Progo (4 kecamatan dan 10 kelurahan), di Kabupaten Gunungkidul (3 kecamatan dan 5 kelurahan, serta di Kabupaten Bantul (4 kecamatan dan 19 kelurahan).

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY periode 2017-2022 juga mengandung tujuan untuk memuliakan martabat manusia Yogyakarta. Menurut Aris, martabat manusia Yogyakarta itu akan tercermin dari kemampuan dan kemajuannya dalam mengelola samudera itu. Karena itu pembangunan kelurahan-kelurahan di kawasan pantai selatan menjadi prioritas. Apalagi sejak tahun 2021 ini Dana Keistimewaan (Danais) DIY bisa dikucurkan untuk mendukung pembangunan di level desa.

Kalurahan-kalurahan Maritim

Ir. Bayu Mukti Sasongko, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengatakan bahwa Visi Abad Samudera ini merupakan penajaman lebih lanjut

dari visi sebelumnya yaitu “Among Tani Dagang Layar”. Intinya kita putar kemudi dan menjadikan laut sebagai yang utama dan menjadikan kawasan selatan DIY sebagai halaman muka/depan Yogyakarta.

Dana Keistimewaan (Danais) sejak 2021 mulai dikerahkan untuk membangun kelurahan-kelurahan di kawasan selatan ini. Pada tahun 2021 Danais (Dana Keistimewaan) DIY untuk kelurahan pertama kali dimulai di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Bugel di Kulon Progo, Kelurahan Gampingsari di Bantul, dan Kelurahan Tileng di Gunungkidul. Berawal dari tiga kelurahan itu sekarang terus merambah ke kelurahan-kelurahan lain.

Intinya, Bayu mengatakan bahwa Danais untuk kelurahan-kelurahan itu adalah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat maritim. Di harapkan setiap kelurahan maritim akan berkembang sesuai dengan potensi khas masing-masing. Jadi jangan semua mengerjakan usaha yang sama, tetapi ada keunikan masing-masing. Usaha rumput laut misalnya bisa di kawasan Sepanjang dan Ngestirejo.

Karena kelurahan-kelurahan maritim itu dikembangkan secara unik maka pembangunan maritim ini bisa melibatkan banyak OPD. Ada desa maritim yang berfokus pada pengembangan pariwisata, maka Dinas Pariwisata banyak aktif. Ada kelurahan yang berfokus pada usaha-usaha kelautan, maka Dinas

Koperasi dan UKM bisa lebih aktif di sana. Kecuali itu tentu saja pembangunan kawasan selatan DIY ini menuntut kolaborasi lintas OPD.

Paniradya Pati Aris juga menekankan pentingnya setiap kalurahan maritim mempunyai spesialisasi dan unggulan. Sebagai contoh, sekarang di Kalurahan Tileng sudah ada “Sekolah Alam Pesisir”, ini sangat bagus. Desa-desa lain jangan menjiplaknya, tetapi masing-masing menggali potensinya sendiri-sendiri. Lalu semua kalurahan itu saling berkolaborasi.

Paniradya Kaistimewan berkomitmen untuk mendukung pembangunan kalurahan-kalurahan maritim. Sekarang kalurahan-kalurahan sudah mendapat BKK (Bantuan Khusus Kalurahan) dari Danais DIY. Dukungan Danais ini diharapkan menjadi faktor pengungkit untuk memajukan SDM dan fasilitas pembangunan di kalurahan-kalurahan.

Aris juga menekankan pentingnya kolaborasi. Ia mengatakan bahwa Paniradya Kaistimewan terkadang tidak ada teman kolaborasi. Paniradya Kaistimewan sebagai perencana pembangunan di bidang-bidang urusan Keistimewaan harus bekerjasama dengan para pelaksana yaitu OPD-OPD terkait. Kerjasama selanjutnya adalah dengan para lurah dan jajarannya untuk mengeksekusi program-program pembangunan di lapangan.

Mengenai mengapa Paniradya Kaistimewan merasa tidak punya teman, Aris menjelaskan karena Paniradya Kaistimewan itu unik dan satu-satunya di Yogyakarta dan Indonesia. Kalau Dinas Kominfo misalnya, ada banyak teman di seluruh Indonesia. Ada pula asosiasi kepala-kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia. Sedangkan Paniradya Kaistimewa tidak punya mitra sejenis yang berkerja membangun Keistimewaan DIY. Karena itu Panioradya Kaistimewan membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak yang berfokus dan berkomitmen membangun Keistimewaan DIY.

Abad Samudera itu Nyata

Bayu Mukti Sasongko mengatakan bahwa Abad Samudera Hindia itu bukan hanya menjadi mimpi tetapi kenyataan. Sekarang Dinas Kelautan tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur “Gerbang Abad Samudera” yang meliputi pembangunan (1) pelabuhan laut di Gesing sebagai pintu tengah, (2) pelabuhan laut di Sadeng sebagai pintu timur, dan (3) pelabuhan laut Tanjung Adikarto di Kulon Progo sebagai pintu barat.

Dalam pengembangan kelurahan-kelurahan maritim, Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pengampunya. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan tentu menjalin kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya. Sebagai contoh, sekarang sudah ada 460-an unit pengolahan hasil laut

yang dikerjakan oleh banyak UMKM. Yang sudah mendapatkan sertifikat kelayakan ada 36. UMKM-UMKM ini sudah bergabung dalam sistem digital “SiBakul Jogja” yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini merupakan wujud nyata kolaborasi silang OPD dalam Keistimewaan DIY.

Suardi, S.Pd selaku Lurah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul memberikan testimoni untuk meneguhkan apa yang sudah disharingkan oleh Paniradya Pati Aris Eko Nugroho dan Kepala DKP DIY Bayu Mukti Sasongko itu. Suardi menggambarkan bagaimana potensi di Kalurahan Tileng yang garis pantainya sepanjang 7,2 km, lebih dari sepuluh persen dari panjang pantai di Gunungkidul (65 km). Kalurahannya mencakup kawasan seluas 108.641 hektar yang mana dua pertuganya berupa pesisir.

Kalurahan Tileng dijadikan Kalurahan Maritim yang pertama dengan dukungan Danais DIY. Penetapan itu dan dukungan Danais yang menyertainya membangkitkan semangat kemaritiman masyarakat di Tileng, Sampai tahun 2021 sudah ada 510 nelayan aktif di Tileng. Sebagian mereka adalah nelayan yang mencari ikan di laut dan sebagian lainnya adalah “nelayan tebing” yang menangkap lobster dengan jaring.

Program pembangunan unggulan di Tileng saat ini adalah “Sekolah Alam Pesisir”. Ini adalah sekolah non-formal untuk mendidik para nelayan pemula. Dari praktek para nelayan yang dididik ini diperoleh hasil-hasil laut yang diolah dalam “Rumah Olah Ikan” yang menghasilkan produk-produk kuliner laut. Dengan demikian pendidikan kemaritiman ini berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kilas Balik Visi Abad Samudera Hindia

Diskusi kali ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan visi Abad Samudera Hindia yang harus terukur pencapaiannya pada akhir periode RPJMD 2017-2022. Karena itu penting sekali untuk kita mereview kembali visi Gubernur DIY Sultan HB X mengenai visi itu yang disampaikan pada 2 Agustus 2017 silam. Berikut adalah sebagian dari pidato visi itu yang menjelaskan 4 dasar pemikiran mengapa harus Samudera Hindia yaitu alasan-alasan (1) Fenomena IORA (Indian Ocean Rim Association), (2) Fenomena Kra-Canal atau Thai-Canal Project, (3) Fenomena Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan, dan (4) Fenomena Kesejarahan. Demikian penggalan pidato Sultan HB X tersebut,

Mengenai pemilihan tema “Abad Samudera Hindia” yang dikatakan sebagai Visi Gubernur 2017-2022,

dilandasi latar belakang sebagai berikut. Pertama, Fenomena IORA (Indian Ocean Rim Association).

IORA atau Indian Ocean Rim Association (Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia) adalah asosiasi yang digagas oleh Nelson Mandela saat kunjungannya ke India pada bulan Maret 1995, yang dua tahun kemudian yakni pada Maret 1997 resmi berdiri menjadi organisasi dunia yang penting dan dihormati dengan nama Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation dan kemudian berubah nama dipersingkat menjadi Indian Ocean Rim Association (IORA, 2017). Asosiasi ini memiliki anggota dari negara-negara yang memiliki pantai yang disentuh dan disatukan oleh air laut Samudera Hindia, yang mencakup negara-negara ASEAN, Australia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-kesepakatan kerja sama di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Wilson Center, Washington DC pada 22 September 2015, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menekankan peran penting Samudera Hindia sebagai episentrum kekuatan dunia di abad ke-21. “Dari sudut pandang strategi, abad ke-19 ditentukan oleh Samudera Atlantik, abad ke-20 oleh Samudera Pasifik,

dan abad ke-21 ditentukan oleh Samudera Hindia.... Samudera Hindia menjadi tempat tinggal bagi 2,6 miliar orang atau dua perlima jumlah penduduk dunia....strategi maritim Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi harus mampu menjadi episentrum dunia, sepertiga lalu lintas kargo, dan dua pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia.” (Marsudi, 2015).

Kedua, Fenomena Kra-Canal atau Thai-Canal Project. Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand) adalah suatu proyek terusan raksasa yang mirip dengan Terusan Suez dan Terusan Panama yang akan menyudet leher semenanjung Thailand-Malaysia untuk menghubungkan perairan laut Andaman dengan perairan laut Teluk Thailand sehingga memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China (Abdul Rahmat, et.al, 2016). Presiden Xi pada saat berpidato di depan parlemen Indonesia pada tahun 2013 mengangkat fenomena ini menjadi konsep “21st Century Maritime Silk Road” atau “Jalur Sutera Maritim Abad 21” dan pada bulan Januari 2017 raja baru Thailand Vajiralongkorn mengindikasikan proyek ini segera dibangun (Billington, 2017, Larouche, 2017). Dampak dari Kra-Canal terhadap peta intensitas lalu lintas pelayaran di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada

meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II) yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Meningkatnya intensitas ALKI-II tentu akan membawa dampak pada meningkatnya intensitas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia – Samudera Pasifik. Pada posisi seperti itulah peran kawasan-kawasan di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menjadi sangat penting terutama dalam penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata.

Ketiga, fenomena kemiskinan di kawasan jogja selatan. Jumlah penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 adalah sekitar 488 ribu jiwa atau sekitar 13,02 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan presentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen (BPS DIY, 2017). Kalau dilihat dari distribusinya, maka jumlah warga miskin di wilayah pedesaan (16,11 persen) lebih besar daripada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11,72 persen). Kondisi yang memprihatinkan menunjukkan bahwa warga miskin di wilayah pedesaan masih terjerat sebagian besar pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras (sebesar 33,08 persen), sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31 persen.

Kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta juga cukup tinggi yang ditunjukkan dengan angka Rasio Gini sebesar 0,432

tertinggi di Indonesia dan disusul Gorontalo sebesar 0,41. Kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,435) dibanding kesenjangan yang terjadi di pedesaan (0,340). Sementara indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan (2,29) juga menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan (2,15) yang berarti warga miskin pedesaan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan membayar pengeluaran konsumsi yang lebih besar daripada warga miskin perkotaan.

Kesenjangan tersebut nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan di mana angka kemiskinan di wilayah bagian selatan Yogyakarta yang mencakup wilayah Gunungkidul (20,83 persen), Bantul (15,89 persen), dan Kulon Progo (20,64 persen) lebih tinggi dibanding dengan wilayah bagian utara yakni Sleman (9,50 persen) dan Yogyakarta (8,678 persen) (BPS DIY, 2015). Fenomena ini memberikan latar belakang penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lima tahun ke depan harus memberikan fokus dan perhatian terhadap perkembangan wilayah bagian selatan Yogyakarta, selain untuk menyongsong “Abad Samudera Hindia” juga meningkatkan “Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh wilayah Yogyakarta pada umumnya”.

Keempat, Fenomena Kesejarahan. Samudera Hindia pada abad ke-1 ternyata telah menjadi perairan yang

cukup ramai oleh lalu lintas kapal besar berukuran bobot mati 200 ton yang mampu mengangkut ratusan penumpang dan barang menyusul surutnya lalu lintas “Jalur Sutera Lintas Utara” yang menghubungkan China ke Timur Tengah, karena faktor meningkatnya ancaman keamanan berkaitan dengan terjadinya banyak orang dan kerusuhan lokal di sepanjang jalur tersebut (Munoz, 2006).

Kapal-kapal dari Persia dan Arab berlayar menyusur Teluk Persia menuju India dan Asia Tenggara dengan menggunakan pengetahuan “angin musim”. Menurut penuturan Munoz, kapal-kapal dagang meninggalkan Teluk Persia pada bulan April agar dapat mencapai pantai barat India sebelum bulan Mei. Pada bulan-bulan Juni, Juli, dan Agustus adalah waktu yang sangat berbahaya bagi pelayaran karena adanya gelombang tinggi akibat arus kencang barat daya, sehingga pada bulan-bulan tersebut pelabuhan-pelabuhan di India Barat ditutup. Apabila kapten kapal beruntung karena perjalanan yang dibawa angin lebih cepat dari waktu yang seharusnya, maka dia akan meneruskan pelayaran ke Pantai Timur India, Teluk Bengali, dan tiba di pantai barat Pulau Sumatera atau di Semenanjung Malaysia pada bulan September. Kapal-kapal akan kembali lagi ke perairan Arab dan Teluk Persia pada angin musim timur laut, yakni pada bulan November dan Desember.

Pada jeda waktu menunggu angin musim datang untuk dapat mendorong kapal-kapal untuk dapat berlayar lagi, maka kapten kapal dan para pedagang beristirahat, bergaul dan saling bertukar budaya dengan penduduk setempat, sehingga apa yang kita sebut saat ini sebagai “multikulturalisme”, “kosmopolitanisme”, dan “globalisme” sebetulnya telah ada dan terjadi pada abad ke-1 melalui kekuatan maritim Samudera Hindia. Hal itu menunjukkan bukti bahwa Samudera Hindia yang memiliki bentang ruang air sangat luas, ternyata bukan menjadi pemisah kantong-kantong peradaban yang tersebar di ujung-ujung perairannya, melainkan justru menyatukannya ke dalam satu jaringan peradaban yang sangat kuat dan jejaknya telah menjadi bagian kehidupan dan penghidupan kita saat ini.

Bab 12.

BKK DANAIS: Bantuan Keuangan Khusus

Dana Keistimewaan dalam Penanggulangan Covid-19

Acara : Podcast Rembag Kaistimewan

Waktu : 5 Agustus 2021

Disiarkan : YouTube Channel Paniradya
Kaistimewan

Narasumber :

- Drs. Noviar Rahmad, M.Si. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY)
- KPH. Yudanegara, Ph,D, (Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tata Pemerintahan Setda DIY)
- Drs. Wajiran (Lurah Kalurahan Sarimulyo Kapanewon Piyungan Bantul)

Moderator : Sandro Sandoro

Pandemi Covid-19 telah menjadi momentum pembuktian bahwa Keistimewaan DIY adalah keistimewaan untuk rakyat. Secara riil, Dana Keistimewaan (Danais) DIY sekarang sudah bisa dinikmati langsung untuk mendukung usaha-usaha penanggulangan masalah pandemi yang menerpa

seluruh masyarakat. Refokusing Danais untuk penanggulangan pandemi itu juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2021.

Kecuali itu pandemi Covid-19 juga memacu kohesi sosial yang dikelola dengan sistem “Jaga Warga” yang menjadi semacam “sistem pertahanan keamanan rakyat semesta” untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Jaga Warga

Drs. Noviar Rahmad, M.Si. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY (Satpol PP) menjelaskan bahwa program Jaga Warga yang sejak tahun 2015 diampu oleh Kesbangpol itu sejak 2021 dikelola oleh Satpol PP. Kelompok-kelompok Jaga Warga di bentuk di tingkat padukuhan baik di desa maupun di kota. Setiap kelompok terdiri dari 25 orang yang menurut Pergub Nomor 28 Tahun 2021 terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, dan perwakilan RT-RW. Pada dasarnya seluruh warga masyarakat adalah anggota dari Jaga Warga. Adapun pengurus Jaga Warga yang terdiri dari 25 orang itu ditetapkan dengan SK Kelurahan.

Menurut Noviar, perkembangan kelompok-kelompok Jaga Warga sekarang semakin menguat. Sekarang di DIY sudah ada 1.224 kelompok Jaga Warga yang ada di 190 kelurahan. Jumlah itu masih sedikit, baru mencapai 26 persen.

Payung hukum Jaga Warga itu sendiri sudah kuat. Dari masa ke masa sudah ada regulasi yang mengaturnya, yaitu dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2015, lalu dengan Pergub Nomor 6 Tahun 2019, dan kemudian Pergub Nomor 28 Tahun 2021.

Jejaring kelompok-kelompok Jawa Warga inilah yang menjadi kekuatan-kekuatan sosial untuk menangani masalah pandemi Covid-19. Karena itu untuk memaksimalkan kinerja diadakan kolaborasi antara Satpol PP, Paniradya Kaistimewaan, dan Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY. Dana Keistimewaan (Danais) dikucurkan untuk memperkuat gerak nyata kelompok-kelompok Jaga Warga dalam mengatasi masalah pandemi.

Dalam rangka mengefektifkan Jaga Warga untuk mengatasi pandemi, kolaborasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Satpol PP membantu kelompok-kelompok Jaga Warga dalam hal (1) membimbing teknis seperti penyusunan proposal program, (2) melakukan verifikasi atas proposal-proposal yang diajukan, (3) mengirim proposal-proposal yang sudah terverifikasi untuk diproses lebih lanjut sampai pada pencairan Danais. Dalam hal ini Satpol PP dan Biro Tata Pemerintahan saling berkomunikasi untuk mempercepat semua proses-proses tersebut.

- Satpol PP bersama Biro Tapem dan Paniradya Kaistimewan kemudian bersama-sama melakukan pendampingan ke masing-masing kelurahan.
- Pendampingan dilakukan untuk memantau pelaksanaan di lapangan. Implementasi di lapangan tidak semudah apa yang diancangkan di atas kertas, sehingga pendampingan sangat diperlukan. Dalam hal proposal misalnya, masih banyak yang salah pemahaman.

Kolaborasi

KPH. Yudanegara, Ph.D. (Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY menekankan pentingnya kolaborasi untuk memajukan Jaga Warga. Dalam hal ini tugas Biro Tapem secara horisontal adalah berkomunikasi dengan Paniradya dan Satpol PP. Sedangkan tugas secara vertikal adalah menginformasikan kepada OPD-OPD dan kelurahan/kalurahan.

Kolaborasi itu sangat penting apalagi berkaitan dengan pengalokasian dana untuk mendukung program-program. Koordinasi harus kuat dan kontroling juga harus ketat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi penyalahgunaan. Dengan demikian kinerja akan cepat dan akurat karena ada filter yang jelas.

Tetapi ketertiban dan ketelitian yang sangat diutamakan itu, menurut Noviar tidak lantas membuat

kinerja lamban. Sosialisasi dan informasi mengenai petunjuk-petunjuk teknis misalnya, disebarakan dengan cepat melalui WA Group lurah-lurah se DIY. Kecepatan dalam tanggap darurat dipercepat dengan pendekatan-pendekatan online.

Kecuali itu, menurut KPH. Yudanegara, dalam rangka penguatan kolaborasi maka silaturahmi terus-menerus dijaga. Setiap hari Sabtu dan Minggu diadakan kegiatan dengan nama “Tapem Srawung” di mana kita berkunjung ke kelurahan-kelurahan di seuruh DIY secara bertahap. Kecuali itu di kantor KPH. Yudanegara para lurah sering datang untuk berdiskusi dari hari Senin hingga Jumat.

Percepatan Penanganan Pandemi

Noviar mengatakan bahwa aktivasi Jaga Warga dikonsentrasikan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19. Secara teknis, tim-tim Jaga Warga sudah sangat berkontribusi dalam penanganan kedaruratan seperti evaluasi pasien, pemulasaraan, dan pemakaman.

Menurut Noviar, melalui sistem Jaga Warga ini nilai-nilai Keistimewaan DIY seperti gotong-royong dan kekeluargaan diterapkan langsung untuk mengatasi masalah pandemi. Untuk itu pulalah Danais dikucurkan untuk mendukung tindakan-tindakan teknis yang memang membutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan kedaruratan pandemi. Sejak

Januari 2021, dengan didampingi oleh Satpol PP, Jaga Warga mempunyai fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung dalam penanganan pandemi.

KPH. Yudanegara mengatakan bahwa fokus untuk penanganan pandemi menuntut keakuratan dalam melakukan program. Dalam pengajuan proposal misalnya, terkadang masih ditemukan usulan-usulan pendanaaan yang tidak sesuai. Hal ini harus diverifikasi dan direvisi karena kita ingin supaya akurat dan tepat sasaran. Dengan kontrol ketat itu diharapkan percepatan penanggulangan pandemi bersama gerakan dan jejaring Jaga Warga ini dapat efisien dan efektif.

Penanda dan Kekuatan Keistimewaan DIY

Menurut Noviar, sistem Jaga Warga ini bisa menjadi pananda dan kekuatan Keistimewaan DIY. Jaga Warga menunjukkan bagaimana masyarakat Yogyakarta bersatu. Dalam konteks memelihara ketenteraman dan keamanan, Jaga Warga dapat menjadi seperti “Pecalang” yang berkembang di Pulau Bali. Pecalang adalah satuan keamanan masyarakat yang bersifat adat untuk melancarkan setiap kegiatan masyarakat. Penjagaan keamanan dan ketenteraman akan efektif jika di level masyarakat sudah bisa diatasi, tidak perlu ada masalah sedikit saja harus ke Polisi dan Pengadilan.

Drs. Wajiran selaku Lurah Kelurahan Sarimulyo Kapanewon Piyungan Bantul mengatakan bahwa Jaga Warga adalah “penanda Keistimewaan DIY”. Menurutnya, Jaga Warga adalah Sistem Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) yang berbasis budaya rembugan, musyawarah, dan gotong royong. Jaga Warga adalah representasi kekuatan seluruh rakyat Yogyakarta.

Wajiran menjelaskan bahwa Jaga Warga di kelurahannya telah menjadi kekuatan sosial yang sangat nyata di masa pandemi. Kelompoknya telah memiliki tim-tim yang bertugas cepat di urusan evaluasi, pemulasaran, dan penguburan cepat. Jaga Warga di desanya juga sudah membangun shelter pandemi yang bisa menampung 70-an pasien dengan penanganan yang bagus.

Diskusi Berlanjut

Pernyataan “Jaga Warga adalah Penanda Keistimewaan” menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Yogya istimewa bukan hanya karena sejarah dan kebudayaannya, tetapi juga karena masyarakatnya. Khususnya, istimewa karena desa dan kampungnya memang istimewa.

Siaran *podcast* Rembag Kaistimewaan tentang Masyarakat Istimewa perlu dilanjutkan. Banyak pemikiran tentang hal itu, salah satunya ditulis Haryadi Baskoro dalam rubrik ANALISIS KR Harian Kedaulatan

Rakyat edisi 28 April 2020 dengan judul “Kampung Istimewa” sebagai berikut.

Sejak pandemi Covid-19 memaksa masyarakat untuk berjaga jarak dan tinggal di rumah saja, suasana kampung-kampung pun berubah. Jalan masuk dan gang-gang diblokir. Lalu yang memprihatinkan adalah merebaknya pajangan tulisan-tulisan yang tidak ramah dan tidak santun seperti “*Lock down* atau *smackdown*” (*lock down* atau dipukul-dibanting sampai roboh), “*Keno Korona Mati Radilayati*” (jika terkena korona, mati tidak akan ada yang melayat), “*Wani ngeyel, baku hantam*” (kalau berani membantah, baku hantam).

Orang Yogya dikenal suka bercanda dengan ‘candaan rakyat’ (*gojek kere*). Artinya, kalimat-kalimat yang ketika dibaca sekilas terkesan intimidatif itu, mungkin dikreasi bukan dengan maksud negatif. Namun, jika orang luar mengamatinya baik secara langsung maupun lewat media termasuk medsos, tulisan-tulisan itu jelas merusak *city branding* Yogya. Apalagi ditulis dengan coretan-coretan yang sama sekali tidak estetik, terpajang asal-asalan. Budayawan Sumbo Tinarbuko pasti mengkategorikannya sebagai sampah visual.

Itulah sebabnya pemerintah Yogya mengelola pandemi ini secara komprehensif. Bukan hanya dengan pendekatan teknis tetapi pendekatan kultural. Sultan HB X sebagai Raja sekaligus Gubernur DIY nampak

menekankan perpaduan kedua pendekatan ini. Dalam 'sapa aruh' yang beberapa kali beliau sampaikan, Sultan berbicara banyak tentang keutamaan nilai-nilai luhur. Semestinya, di tingkat masyarakat kampung juga diterapkan pendekatan holistik seperti itu. Adapun salah satu bentuk pendekatan kultural adalah penggunaan tutur kata yang arif, bijak, dan santun. Secara antropologis, bahasa mendahului kebudayaan, logika bahasa akan membangun nilai, norma, dan perilaku (Nur Syam, 2007).

Jangan meremehkan bahasa. Ada ungkapan 'bahasa menunjukkan bangsa' yang berarti bahwa bahasa merepresentasikan kualitas masyarakat. Ada pula ungkapan Jawa '*ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana*' yang berarti bahwa bahasa itu cermin harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif antropologi strukturalisme, kebudayaan merupakan produk dari aktivitas nalar manusia (*human mind*) dalam hal mana aktivitas nalar manusia itu memiliki kesejajaran dengan bahasa (Nur Syam, 2007).

Vandalisme dalam berbahasa merupakan indikator kebobrokan budaya. Dalam interaksi digital modern hal itu sudah jelas. Merebaknya ujaran kebencian (*hate speech*), kabar bohong (*hoax*), perundungan (*cyber bullying*), *cyber radicalism*, dan *cyber terrorism* merupakan indikator kebobrokan masyarakat. Konflik sosial dan perang fisik senantiasa dipicu dan dimulai dari provokasi kebahasaan.

Kampung-kampung adalah basis sejarah kebudayaan dalam Keistimewaan Yogya. Sistem kampung di bawah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sudah ada sejak jaman kolonialisme. Di masa pendudukan Jepang, Kasultanan Yogya melakukan reorganisasi sistem pemerintahan (reorganisasi *pangreh praja*) pada April 1945. Dalam reorganisasi itu, *kawedanan* (distrik) dihapus. Setiap kabupaten langsung dibagi menjadi beberapa asistenan dan dinamakan *kanewon* yang dipimpin oleh *panewu pangreh praja*. Kawedanan dan asistenan yang berada di dalam Kabupaten Kota Yogyakarta dihapus. Kabupaten kota dibagi menjadi beberapa *kemantren* yang masing-masing dipimpin oleh *mantri pangreh praja*. Setiap *kemantren* dibagi menjadi beberapa Rukun Kampung (*Aza Shokai*). Setiap Rukun Kampung itu terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (*Tonari Kumi*).

Dalam buku “Toponimi Kota Yogyakarta” (2007), perkampungan di Kota Yogya memiliki akar sejarah kebudayaan. Ada kampung-kampung yang namanya berdasar pada ketokohan bangsawan, misalnya kampung Suryoputran yang mencakup kawasan di sekitar kediaman GPH Suryoputro yang adalah putera Sultan HB VI. Ada kampung-kampung yang namanya terkait keahlian para abdi dalem Kraton, misalnya kampung Pandean yang dulu didiami abdi dalem yang bertugas membuat peralatan dari besi.

Dalam Keistimewaan Yogya, kampung-kampung dikembangkan berbasis 'toponim' yang mana dari nama-namanya saja sudah sarat makna kultural. Kampung di Yogya lebih dari sekedar entitas pemukiman, tetapi pusat-pusat kearifan lokal dalam kebhinnekaan budaya. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi kita untuk membangun kampung-kampung yang bukan hanya sehat, aman, dan makmur, namun berbudaya luhur.

Lampiran 1.
Data Podcast Rembag Kaistimewan
Paniradya Kaistimewan 2021

Podcast “Rembag Kaistimewan” yang dibahas dalam buku ini hanya sejumlah 12 karena keterbatasan tempat. Adapun keseluruhan seri podcast “Rembag Kaistimewan” yang telah diunggah di Kanal YouTube Paniradya Kaistimewan adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Judul	Narasumber	Host/ Moderator
1	26 Januari 2021	Kesiapan Kalurahan Pagerharjo menjadi Desa Mandiri Budaya di DIY	Aris Eko Nugroho, SP., M.Si. (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY) Singgih Raharjo, SE, M.Ed (Kepala Dinas Pariwisata DIY)	

2	2 Februari 2021	Museum Sonobudoyo menuju Museum Berkelas Internasional	Pangky Arbindarta K, SE. Setyawan Sahli, SE, MM Erwn Djunaedi	Argamoja
3	9 Februari 2021	Keistimewaan DIY dalam Hal Keragaman Budaya	Nur Ikhwani Rahmanto, S.Ant., M.URP (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY) Dra. Y. Eni Lestari Rahayu (Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga, Budaya, Semi Dinas Kebudayaan DIY)	

			Drs. Tendeon Herry Setio (Ketua Jogja Chinese Art and Culture Center)	
4	16 Februari 2021	Pengembangan Potensi Kalurahan Putat menjadi Desa Mandiri Budaya DIY	Aris Eko Nugroho, SP., M.Si. (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY) Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.MA (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah) Sukardi (Lurah Putat)	
5	23 Februari 2021	Peran Dana Keistimewaan dalam Pengelolaan	Sugiyarta, SH, MM (Perencana Madya Paniradya Kaistimewan)	

		Bangunan Tinggalan Budaya	Ir. Suyata (Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya DIY) RM Kristiadi (Penghuni Dalem Mangkubumen) S. Sudjono (Ketua Paguyuban Werkreise) Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY) Wahyudi, S.Pd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah DIY)	
6	2 Maret 2021	Serangan Oemoem 1 Maret Tonggak Perjuangan Kemerdekaan NKRI oleh Masyarakat DIY		
7	9 Maret 2021	Memperingati Jumenengan Dalem Sri Sultan	KPH. Yudanegara, Ph.D, (Kepala Bagian Bina Pemerintahan	

8		Hamengku Buwono X	<p>Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tata Pemerintahan Setda DIY)</p> <p>Aris Eko Nugroho, SP., M.Si. (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>GKR Bendara (Penghageng KHP Nityabudaya Kraton Yogyakarta)</p>	
	16 Maret 2021	Memperingati Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat	<p>Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY)</p>	

9	15 Juli 2021	Peran Satlinmas Rescue Instimewa (SRI) dan Jaga Warga di Kala Pandemi Covid-19	<p>Prof.. Dr. Inajati Adrisijanto (Guru Besar Arkeologi Universitas Gadjah Mada)</p> <p>Widihasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY)</p> <p>Nugroho W, SP, M.Sc (Kepala Bidang Urusan Kebudayaan Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Mukijem, S.Sos (Kepala Sub Bagian Program Satpol PP DIY)</p> <p>Eko Sri Widodo (Jaga Warga Gancangan V)</p>	Reyno Arum
---	--------------	--	--	------------

10	22 Juli 2021	Tingkatkan Kesadaran Diri, Sudah Pandemi! Ayo Vaksin!	Marjono (Koordinator Wilayah Satlinmas) Aris Eko Nugroho, SP., M.Si. (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY) Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.MA (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah) Timotius Apriyanto (Koordinator Program Percepatan Vaksinasi KADIN DIY)	Sandro Sandoro
11	28 Juli 2021	Jamu Mempertahankan Eksistensi di Masa Pandemi	dr. Sistia Utami, M.Si (Kepala Puskesmas Sedayu Kab. Bantul)	Ninda Fillasputri

			<p>Wagiyanti (Ketua Kelompok Jamu Jati Usaha Mulia)</p> <p>dr. Wahyu Pamungkasih, M.Sc (Kepala Puskesmas Bantutan Kab. Bantul)</p> <p>Drs. Noviar Rahmad, M.Si. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY)</p> <p>KPH. Yudanegara, Ph.D. (Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tata Pemerintahan Setda DIY)</p>	Sandro Sandoro
12	5 Agustus 2021	<p>BKK DANAIS: Bantutan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan dalam Penanggulangan Covid-19</p>		

13	5 Agustus 2021	Realisasi BKK DAIS Penanganan Covid-19 Menuju Bebas Corona! Merdeka!	Drs. Wajiran Kalurahan Kapanewon Bantul) Nur Ikhwān Rahmanto, S.Ant., M.URP (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY) Drs. Ilham Junaidi, M.Acc (Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Palong Praja DIY) Mashuri (Lurah Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul)	Alit Jabang Bayi
----	----------------	--	---	---------------------

14	12 Agustus 2021	HUT UMKM ke-6 Go Digital, Go Global	<p>Ir. Hermawan Ardiyanto, MBA (Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi, dan Digital Marketing KADIN DIY)</p> <p>Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Muhammad Sumpeno (Owner Pheryno Leather)</p>	Wijil Rachmadh ani
15	26 Agustus 2021	Sepanggal Asa dari Lereng Merapi di Masa Pandemi	<p>Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.MA (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah)</p>	Wijil Rachmada ni

16	2 September 2021	Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Membangun Perekonomian, Meningkatkan Kesejahteraan	Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pari Paniradya Kaistimewan DIY) Andromeda Sincoro, S,Pt (Founder dan CEO Sweet Sundae Ice Cream dan Ademuy Gelato)	
			Nugraha Wahyu Winarno, SP., M.Sc (Plt. Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Paniradya Kaistimewan DIY)	Wijil Rachmadh ani

			<p>Kusno Wibowo, ST., M.Si (Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY)</p> <p>Suhut H, SH (Lurah Kelurahan Kepek, Kapanewon Saptosari Gunungkidul)</p>	
17	3 September 2021	9 Tahun Undang- Undang Keistimewaan DIY	<p>Tri Agus Nugroho, S.Sos., M.Sc (Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseum Dinas Kebudayaan DIY)</p>	Wijil Rachmadh ani

18	5 September 2021	Amanat 5 September 1945	<p>Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pari Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Resti Dian Puspita Sari (pelajar SMAN 1 Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman)</p> <p>Drs. Bakhtiar Nurhidayat (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY)</p>	Wawan Isnawan
----	---------------------	----------------------------	---	------------------

19	9 September 2021	Kalurahan Maritim Menyongsong Abad Samudra Hindia	<p>Hendro Muhaimin, MA (tenaga ahli Parampara Praja, Peneliti pada Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada)</p> <p>Dr. Haryadi Baskoro (kolumnis isu-isu Keistimewaan DIY)</p> <p>Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Suwardi, S.Pd (Lurah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul)</p> <p>Ir. Bayu Mukti Sasongko, M.Si (Kepala Dinas</p>	Ninda Fillasputri
----	---------------------	--	--	----------------------

			Kelautan dan Perikanan DIY)	
20	16 September 2021	Geliat Wisata di Kulon Progo	Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY) Joko Mursito, S,Sn, MA (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulom Progo) Antonius Nugroho, S.Pd (Ketua Desa Wisata Nglingga Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo)	Nionda Fillasputri
21	23 September 2021	Padat Karya Jogja Istimewa Membuka Lapangan Kerja,	Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)	Firman Saputra

		Masyarakat Sejahtera	Aria Nugrahadi, ST, M.Eng (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Saryana (Lurah Kelurahan Jewukwudel Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul)	
22	30 September 2021	Grand Design Keistimewaan: Strategi Perencanaan Kebijakan menuju Kesejahteraan	Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec (Tenaga Ahli Grand Design Keistimewaan DIY) Aris Eko Nugroho, SP., M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY) GKR Mangkubumi (Parampara Praja DIY)	Firman Putra, S.Sn.

23	7 Oktober 2021	Peringatan Boyongan dari Ambarketawang menuju Kraton Ngayogyakarta	Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY) KPH. Yudahadiningrat (Wakil Penghageng Parentah Ageng Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Wahyudi, S.Pd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia DIY)	Wijil Rachmada ni
24	14 Oktober 2021	Penyediaan Akses Internet bagi Warga DIY	Nur Ikhwan Rahmanto, S.Ant., M.URP (Kepala Bidang Perencanaan dan	Ninda Fillasputri

			<p>Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Ir. Rony Primanto Hari, M.T, (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY)</p> <p>Sukohadi (Pengelola Kebun Teh Ki Suko Dusun Nglinggo Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo DIY)</p>	
25	20 Oktober 2021	Sekaten, Warisan Adat dan Tradisi yang Tetap Lestari	Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY)	Wijil Rachmada ni

			<p>KPH Notonegoro (Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Krodhomardowo)</p> <p>KRT Rinto Isworo (Wakil Penghageng II Kawedanan Hageng Punokawan Widyobudoyo Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat.</p>	
26	21 Oktober 2021	Keistimewaan Urusan Pertanahan di DIY	<p>Aris Eko Nugroho, SP, M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Suyitno, SH, MS (Ahli Pertanahan Parampara Praja DIY)</p>	Wijil Rachmada ni

			<p>Drs. Krido Suprayitno, SE, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIU)</p>	
27	28 Oktober 2021	<p>Arah Strategi Perencanaan dan Kebijakan Dana Keistimewaan</p>	<p>GKR Mangkubumi (Parampara Praja DIY)</p> <p>Aris Eko Nugroho, SP, M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)</p> <p>Eko Suwanto, ST., M.Si (Ketua Komisi A DPRD Provinsi DIY)</p>	Ninda Fillasputri
28	29 Oktober 2021	<p>Revitalisasi Kawasan Pleret sebagai Pusat</p>	<p>Aris Eko Nugroho, SP, M.Si (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY)</p>	Wiji Rachmada ni

29	4 November 2021	Peradaban Mataram Islam melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Singgih Raharjo, SE, M.Ed (Kepala Dinas Pariwisata DIY) Dian Lakhsmi Pratiwi, SS, MA (Kepala Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan DIY)	Ninda Fillasputri
		Basa Jawi Pangukuhing Kaistimewan Ngayogyokarto	Prof. Dr. Suwarna Dwijonagoro, M.Pd (Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta) Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY)	

30	11 November 2021	Unggah-Ungguh sebagai Tata Nilai Budaya Masyarakat Yogyakarta	Abdul Afif Rosyidi, S.Pd (Guru SMAN 1 Mlati Sleman)	Ninda Fillasputri
			KPH. Yudahadiningrat (Wakil Penghageng Parentah Ageng Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY) Prof. Dr, Suwardi Endraswara, M.Hum (Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta)	

31	15 November 2021	Menuju Desa Mandiri Budaya yang Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Keluarga Berkualitas	Ariyanti Luhur Tri Setyarini, SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan DIY) Erlina Hidayati Sumardi, SIP., M.M. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY).	Wijil Rachmadh ani
32	18 November 2021	Pembangunan Ruas Jalan Tawang – Ngalang	Diana Setiyawari, M.HSc.Psy, Ph.D. (Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada)	Firman Saputra

		<p>Pemantik Perekonomian</p>	<p>Kusno Wibowo, ST., M.Si (Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY)</p> <p>Sukasto (Lurah Kelurahan Ngoro-oro, Pathuk, Gunungkidul, DIY)</p>	
--	--	----------------------------------	---	--

Lampiran 2.

Apresiasi untuk Forum-forum Dialog DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan sangat kental dengan tradisi rembugan baik yang bernuansa sosial maupun akademis. Ada banyak forum rembugan yang telah berkontribusi besar. Karena itu dalam lampiran ini, tim penulis hendak mengapresiasi semuanya, salah satunya dalam forum dialog “YogyaSemesta” yang diasih oleh Rama Heri Dendi.

Dialog yang mengedepankan kecendekiaan dan keluhuran budi adalah budaya asli Yogya. Komunitas Yogya Semesta bersama Pemprov DIY merepresentasikannya dalam format komprehensif baru bertajuk “NgopiBar” (*Ngopi Bareng*). Dialog lintas elemen Keistimewaan Yogya yang digelar secara berkala di Pendapa Wiyatapraja Kantor Gubernur DIY itu mencakup aktivitas “3-Ng” yaitu *ngolah pikir, ngudar gagasan, nguda rasa*.

Komunitas Yogya Semesta yang diasuh oleh tokoh senior Heri Dendi itu sendiri telah sejak 2007-an menggelar dialog budaya secara rutin. Sampai sekarang Dialog Yogya Semesta sudah lebih dari 130-an edisi. Pandemi Covid-19 tak mengendorkan semangat berdialog itu. Bahkan pada momen peringatan 5 September 2020 lalu diadakan dialog dan

gelar budaya Yogya Semesta khusus Refleksi Sewindu UUK DIY bersama Gubernur dan Wagub DIY.

Tiga belas tahun sudah Dialog Yogya Semesta (2007-2020) memperkuat basis budaya rembugan di dalam Keistimewaan DIY. Budaya rembugan khas Yogya Semesta perlu terus ditumbuhkembangkan. *Pertama*, kita semakin sangat membutuhkan budaya dialog yang sehat nalar dan sehat nurani. Sebab, interaksi sosial masyarakat kita semakin bersifat kontraventif. Hasut-menghasut, hujat-menghujat, dan rupa-rupa kebencian semakin mewabah. Goreng-menggoreng hoaks selalu berujung anarkisme. Acara-acara Dialog Yogya Semesta yang melibatkan unsur Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DIY sebagai pengundang menunjukkan adanya *political will* yang kuat untuk membangun budaya rembugan yang luhur.

Kedua, dialog dan gelar budaya Yogya Semesta adalah perpaduan *tontonan* dan *tuntunan* yang mencerdaskan. Hal itu penting sebab dunia hiburan (*tontonan*) masa kini merupakan arus ganas yang membodohkan lagi menyesatkan. Sementara itu *tuntunan* (pengajaran) terkadang tidak menarik karena kurang menghibur. Ajaran moral dan agama juga sering dikomunikasikan tanpa sentuhan seni sehingga tidak mengolah rasa (*olah rasa*) namun malah memicu fanatisme sempit, intoleransi, radikalisme, dan angkara murka.

Ketiga, dialog Yogya Semesta memperkuat basis akademik bagi kinerja pemerintah dan peri kehidupan masyarakat. Nampak Pemda DIY aktif merangkul para ahli/pakar dari berbagai bidang ilmu untuk berdiskusi dan memberi kritik serta masukan. Hal ini memperkuat budaya meritokrasi sehingga kinerja pemerintahan DIY berbasis kompetensi. Hal yang perlu ditambahkan adalah penguatan budaya tulis sehingga semua diskusi menghasilkan naskah-naskah akademik yang serba terukur keilmiahannya.

Keempat, dialog Yogya Semesta menjadi ruang partisipasi publik dalam pembangunan. Bukan hanya jadi forum untuk menampung aspirasi dan menyampaikan sosialisasi. Kritik dan beragam perbedaan pendapat pun diakomodir. Dalam diskusi-diskusi tak jarang program-program pemerintah disanggah dan gagasan-gagasan liar pun berkeliaran. Namun tetap dalam suasana santun dan bermartabat.

Kelima, dialog Yogya Semesta menjadi sangat penting sebagai forum konsolidasi Keistimewaan Yogya. Di sinilah ego-sektoral organ-organ pemerintah diluruhkan. Ketegangan sosial juga direlaksasi untuk kemudian bersama-sama menemukan benang merah. Forum ini menjadi momen untuk merajut kolaborasi dan menciptakan konvergensi dalam berkarya bersama. Diskusi soal program Desa Mandiri Budaya misalnya, mendorong semua pihak untuk

bergandengan tangan, menyamakan persepsi, dan berkarya bersama.

Keenam, visi Yogya untuk Semesta adalah substansi Keistimewaan Yogya. Pada *Analisis KR* edisi 5/9/2020 lalu penulis mengkritik tentang merosotnya Keistimewaan. Kemerosotan terjadi jika Keistimewaan hanya difokuskan untuk diri Yogya itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa Yogya itu istimewa dalam kontribusinya untuk Indonesia, sebagai ibu pengasuh bayi RI (Slamet Sutrisno, *KR* edisi 17/3/2008). Keistimewaan Yogya jangan dikerdilkan atau dibonsai. Yogya untuk Semesta adalah bagaimana Yogya berkiprah dan berkarya untuk berdampak riil bagi kemajuan peradaban dunia yang kini terus merosot.